



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/PMK.05/2016

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
9. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
11. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLU dan/atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan BLU telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.

12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU merupakan bagian dari SAI.
- (2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satker BLU selaku UAKPA.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satker BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
- (2) Subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen

sumbernya yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional.

- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLU, Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pencatatan; dan
 - c. pengikhtisaran,data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (2) Pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada Laporan Keuangan BLU, Satker BLU melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai rekonsiliasi.

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan:

- a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan konsolidasian tingkat eselon I; dan
 - b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan keuangan Satker BLU, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan oleh Satker BLU kepada unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki fungsi pembinaan keuangan BLU.

BAB III

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Satker BLU membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLU.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan BLU dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai format dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLU yang disajikan oleh BLU selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan BLU.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
- (3) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern BLU, reviu dilakukan oleh APIP kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahi Satker BLU.
- (4) Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat Pernyataan Telah Direviu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan.
- (5) Dalam rangka menjalankan kewenangan reviu atas Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang

secara organisatoris membawahi Satker BLU, APIP melakukan reviu atas Laporan Keuangan BLU, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses reviu atas Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga dimaksud.

- (6) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil reviu satuan pemeriksaan intern BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai digunakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2016.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2142

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.05/2016
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	14
BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU.....	20
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU.....	67
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU.....	91
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU.....	124
BAB VI	KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU.....	138
BAB VII	KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU.....	152
BAB VIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD BLU.....	173
BAB IX	KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU.....	204
BAB X	KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU.....	209
BAB XI	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU.....	227
BAB XII	KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU.....	240
BAB XIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU.....	249
BAB XIV	KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.....	262
BAB XV	ILUSTRASI TRANSAKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU.....	277

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, satuan kerja (Satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain: pengelolaan pendapatan dan belanja; pengelolaan kas; pengelolaan utang-piutang; pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa; kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS); serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengendalian secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban menjadi karakteristik penting pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk mengimbangi kekhususan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan keuangan BLU selaku pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, Satker BLU wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dimaksud memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Satker BLU sesuai PSAP 13 disusun dan disajikan untuk kebutuhan pelaporan keuangan bertujuan umum, dan selanjutnya dapat digunakan, baik untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU maupun untuk analisis dan penyusunan laporan keuangan yang lebih khusus dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi penyusunan, penyajian dan penyampaian laporan keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13, perlu disusun

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (SA BLU). Modul SA BLU ini termasuk kegiatan penyusunan dan penyajian laporan untuk kebutuhan penggabungan dan konsolidasian Laporan Keuangan BLU pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul SA BLU mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan Satker BLU yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAP 13 dalam rangka pelaporan keuangan bertujuan umum serta kebutuhan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Modul SA BLU ini tidak mengatur panduan atau pedoman yang berhubungan dengan:

1. Sistem akuntansi biaya yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan maupun pengendalian biaya;
2. Pedoman penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban maupun evaluasi BLU; dan/atau
3. Pedoman penyusunan dan penyajian informasi lainnya untuk kepentingan manajerial.

C. Maksud

Modul SA BLU dimaksudkan sebagai petunjuk bagi unit akuntansi dan pelaporan pada Satker BLU untuk memahami dan mengimplementasikan proses SA BLU berbasis akrual berdasarkan PSAP 13 sehingga Satker BLU dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, seragam, transparan, dan akurat.

D. Tujuan

Tujuan modul SA BLU adalah:

1. Memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi BLU berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi BLU;
2. Memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satker BLU berbasis akrual yang bertujuan umum; dan

3. Memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satker BLU berbasis akrual dalam kerangka sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi pemerintah pusat.

E. Sistematika

Modul SA BLU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sistematika modul BLU

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU

Bab II meliputi pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAKPA BLU, penggunaan data dan laporan keuangan BLU dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat eselon I dan tingkat kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU, dan ilustrasi format laporan keuangan BLU.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU

Bab III meliputi definisi dan jenis pendapatan BLU, pengakuan pendapatan BLU, pengukuran pendapatan BLU, pengesahan pendapatan BLU secara periodik, penyesuaian pendapatan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian pendapatan BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi pendapatan BLU, jurnal transaksi pendapatan BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU

Bab IV meliputi definisi dan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU, pengukuran beban BLU, proses pencatatan (*on-treasury*) beban BLU secara periodik melalui pengesahan, penyesuaian beban BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian beban BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi beban BLU, dokumen akuntansi yang digunakan, definisi dan jenis belanja BLU, pengakuan belanja BLU, pengukuran belanja BLU, penyajian belanja BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi belanja BLU, dokumen akuntansi yang digunakan, dan jurnal transaksi beban dan belanja BLU.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU

Bab V meliputi definisi dan jenis kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengakuan kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengukuran kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengesahan kas dan setara kas yang dikelola BLU secara periodik, penyesuaian kas dan setara kas yang dikelola BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian kas dan setara kas yang dikelola BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi kas dan setara kas yang dikelola BLU, perlakuan selisih kurs terhadap kas dan setara kas yang dikelola BLU yang menggunakan mata uang asing, jurnal transaksi kas dan setara kas yang dikelola BLU, dan Dokumen Akuntansi yang Digunakan

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU

Bab VI meliputi definisi dan jenis persediaan BLU, pengakuan persediaan BLU, pengukuran persediaan BLU, penyesuaian persediaan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian persediaan BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi persediaan BLU, jurnal transaksi persediaan BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU

Bab VII meliputi definisi dan jenis piutang BLU, pengakuan piutang BLU, pengukuran piutang BLU, penyesuaian piutang BLU, penyajian piutang BLU, Segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi piutang BLU, jurnal transaksi piutang BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD BLU

Bab VIII meliputi aset tetap BLU, aset tak berwujud BLU, perlakuan pengesahan aset tetap BLU dan aset tak berwujud BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi aset tetap BLU dan aset tak berwujud BLU, jurnal transaksi aset tetap BLU dan aset tak berwujud BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU

Bab IX meliputi definisi investasi jangka pendek BLU, pengakuan investasi jangka pendek BLU, pengukuran investasi jangka pendek BLU, pengesahan pendapatan hasil investasi jangka pendek BLU,

pelepasan (divestasi) investasi jangka pendek BLU, penyajian investasi jangka pendek BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi investasi jangka pendek BLU, jurnal transaksi investasi jangka pendek BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU

Bab X meliputi definisi dan jenis investasi jangka panjang BLU, pengakuan investasi jangka panjang BLU, pengukuran investasi jangka panjang BLU, pengesahan pendapatan hasil investasi jangka panjang BLU, pelepasan (divestasi) investasi jangka panjang BLU, penyajian investasi jangka panjang BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi investasi jangka panjang BLU, jurnal transaksi investasi BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU

Bab XI meliputi definisi dan jenis aset lainnya BLU, pengakuan aset lainnya BLU, pengukuran aset lainnya BLU, perlakuan aset lainnya BLU setelah tanggal perolehan, penyajian aset lainnya BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi aset kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya, Jurnal transaksi aset kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU

Bab XII meliputi definisi dan jenis hibah BLU, pengakuan hibah BLU, pengukuran hibah BLU, pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, penyajian pendapatan BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi hibah BLU, jurnal transaksi pendapatan BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU

Bab XIII meliputi definisi dan jenis kewajiban BLU, pengakuan kewajiban BLU, pengukuran kewajiban BLU, penyesuaian nilai kewajiban BLU secara periodik, penyajian kewajiban BLU, segmen akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian transaksi

kewajiban BLU, jurnal transaksi kewajiban BLU, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB XIV KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Bab XIV meliputi penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, akun-akun yang digunakan dalam eliminasi laporan keuangan konsolidasian, jurnal eliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian kementerian negara/lembaga, kertas kerja konsolidasi, ilustrasi format laporan keuangan konsolidasian, dan dokumen akuntansi yang digunakan.

BAB XV ILUSTRASI TRANSAKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU

Bab XV meliputi ilustrasi transaksi dan penyajiannya dalam laporan keuangan BLU sehubungan dengan ilustrasi skenario data dan informasi awal, transaksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU, transaksi perolehan hibah BLU, transaksi belanja alokasi dana DIPA rupiah murni, transaksi perolehan kas dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN, transaksi pengesahan penggunaan dana SAL BLU untuk pembiayaan BLU bentuk investasi jangka panjang, transaksi penyeteroran ke kas negara, transaksi-transaksi akrual dan penyesuaian, dan transaksi kas dan bank BLU yang menggunakan mata uang asing.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU

A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU (SA BLU) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi pada kementerian negara/lembaga (SAI), dan untuk menjalankan SA BLU tersebut perlu dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di satker BLU. UAKPA secara umum melaksanakan sistem, subsistem dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional, dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU secara periodik dalam kerangka SAI, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, UAKPA di satker BLU secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sub-sistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik pelayanan BLU. Sub-sistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional. Penyelenggaraan dan pengembangan sub-sistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

B. Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BLU

Kegiatan transaksi yang berhubungan dengan sub-sistem akuntansi secara mandiri, termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar transaksional, dan dokumen sumber transaksional, merupakan fase *input*. Data yang dihasilkan dari fase *input* diselaraskan untuk dapat diproses pada fase *process*, baik secara format dokumen pengesahan, bagan akun standar, jurnal standar, laporan keuangan, maupun format data dalam arsip data komputer.

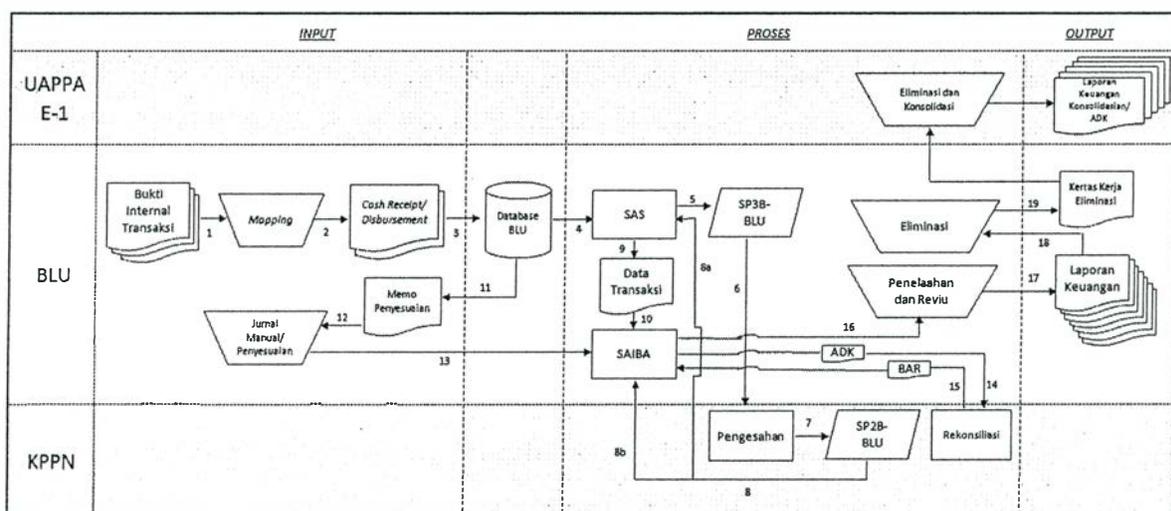
Hasil utama dari proses bisnis SA BLU ini adalah laporan keuangan BLU yang bertujuan umum yang terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas BLU (LAK BLU); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dengan memperhatikan bahwa SA BLU merupakan bagian dari SAI, terdapat proses bisnis untuk membantu menggabungkan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan tingkat eselon I dan tingkat kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU.

Secara umum proses bisnis sistem SA BLU yang dilakukan oleh UAKPA BLU dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 1. Proses Bisnis SA BLU.

Gambar 1. Proses Bisnis SA BLU



Keterangan:

1. *Mapping* akun

- Bukti-bukti internal atas transaksi BLU seperti kuitansi, faktur, dokumen penagihan, bon, dan lain-lain bukti transaksi yang dipersamakan dibukukan oleh petugas yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan secara periodik dalam rangka proses pengesahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Pencatatan atau pembukuan transaksi ekonomi oleh petugas akuntansi dan pelaporan keuangan ke dalam sub-sistem akuntansi internal BLU dapat dikembangkan secara mandiri oleh BLU dalam rangka mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU.
- Bukti-bukti dan/atau pembukuan dari petugas akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator/validator untuk memastikan keselarasan akun-akun pengesahan yang digunakan. Penyelarasan akun tersebut merupakan proses konversi atau *mapping* akun-akun transaksional secara internal

- BLU ke dalam akun-akun sesuai dengan Bagan Akun Standar yang diatur oleh Menteri Keuangan.
- d. Proses konversi (*mapping*) akun-akun tersebut dituangkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dalam rangka pembentukan dokumen transaksi proses pengesahan pada KPPN.
2. Pembuatan Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang Dipersamakan
 - a. Dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU pada KPPN, yang secara kas telah diterima dan/atau dikeluarkan oleh BLU.
 - b. Format dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dapat dibuat sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing BLU. Namun demikian, secara substansi dokumen tersebut sekurang-kurangnya harus menyajikan akun internal BLU dan jumlahnya serta hasil *mapping* (akun sesuai BAS) beserta jumlahnya.
 3. Penyimpanan Data Transaksi Harian BLU
 - a. Bentuk, format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi harian BLU disesuaikan dengan kemandirian BLU.
 - b. Data transaksi harian BLU (database BLU) tersebut digunakan untuk keperluan pada fase *process*, yaitu:
 - i. Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada KPPN dengan interaksi menggunakan aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker); dan
 - ii. Proses pencatatan jurnal manual/penyesuaian atas transaksi-transaksi akrual untuk penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan, dengan interaksi menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual).
 4. Perekaman resume data transaksi harian BLU ke dalam Aplikasi SAS
Dalam rangka perekaman dokumen SP3B-BLU (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja – BLU) untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas pada KPPN.
 5. Penerbitan SP3B – BLU
Hasil verifikasi dan validasi secara internal BLU terhadap perekaman transaksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas dalam aplikasi SAS, satker BLU menerbitkan SP3B – BLU.



6. Penyampaian SP3B – BLU ke KPPN mitra kerja
Penyampaian SP3B – BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerja dapat dilakukan secara periodik dan/atau sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan transaksi BLU.
7. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU secara kas oleh KPPN
Berdasarkan SP3B – BLU yang diajukan oleh Satker BLU, KPPN mitra kerja menerbitkan SP2B – BLU dan disampaikan ke Satker BLU untuk dokumentasi akuntansi dan administrasi.
8. Perekaman SP2B – BLU
Dokumen dan data SP2B – BLU yang diterima dari KPPN dilakukan perekaman melalui aplikasi SAIBA dengan dua cara, yaitu:
 - a. Dokumen SP2B-BLU (nomor SP2B-BLU) dicatat pada aplikasi SAS untuk mempermudah penarikan data transaksi secara otomatis oleh aplikasi SAIBA pada proses selanjutnya; atau
 - b. Dokumen SP2B-BLU (nomor SP2B-BLU) dicatat secara manual pada aplikasi SAIBA untuk mengakomodasi perlakuan database aplikasi SAS tidak terkoneksi dengan database aplikasi SAIBA.
9. Penarikan Data Transaksi oleh Aplikasi SAIBA.
10. Proses pada Aplikasi SAIBA
Data hasil penarikan dari Aplikasi SAS disimpan dalam database Aplikasi SAIBA. Data ini akan digabungkan dengan data lain hasil penginputan jurnal manual dan data transaksi hasil kiriman Aplikasi SIMAK BMN. Seluruh data kemudian diproses membentuk buku besar, neraca percobaan, dan komponen laporan keuangan BLU.
11. Penyediaan Data untuk Keperluan Jurnal Manual
Tidak seluruh data transaksi diproses melalui dokumen SP3B-BLU. Transaksi-transaksi penyesuaian maupun koreksi hanya dapat dilakukan melalui penginputan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/atau jurnal balik. Data untuk melakukan jurnal manual ini disuplai melalui database atau buku pembantu transaksi periodik BLU yang dikembangkan secara mandiri.
12. Memo Penyesuaian
Transaksi periodik yang direkam dengan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/atau jurnal balik dituangkan dalam dokumen akuntansi berupa Memo Penyesuaian.

13. Jurnal Manual/Penyesuaian

Atas dasar Memo Penyesuaian, dilakukan penginputan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA.

14. Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Proses ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan.

15. Memperbarui (*Updating*) Data

Apabila hasil rekonsiliasi mengharuskan adanya perbaikan data, maka perlu dilakukan perbaruan (*updating*) data pada SAIBA.

16. Penelaahan dan Reviu *Draft* Laporan Keuangan

Data Laporan Keuangan yang telah melewati proses rekonsiliasi masih perlu ditelaah dan direviu lagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas penyajian laporan keuangan. Proses penelaahan dapat dilakukan secara periodik dan mandiri oleh petugas akuntansi dan atasannya. Selain ditelaah, Laporan Keuangan BLU direviu oleh SPI-BLU dan/atau oleh APIP.

17. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan BLU terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan BLU yang disajikan tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan.

18. Proses Eliminasi Transaksi

Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik oleh entitas atau kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU maupun oleh entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Satker BLU melakukan proses eliminasi dan membuat laporan atau kertas kerja eliminasi terhadap akun-akun transaksi antar-entitas pemerintah pusat. Proses eliminasi dimaksud dilakukan setelah penyusunan Laporan Keuangan BLU.

19. Penyusunan Kertas Kerja Eliminasi dan Penyampaian LK BLU ke Entitas yang Membawahi BLU



- a. Kertas kerja eliminasi yang dibuat satker BLU dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian oleh entitas yang membawahi BLU.
- b. Penyampaian kertas kerja eliminasi ini dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan BLU.
- c. Laporan Keuangan BLU yang utama disampaikan disajikan secara utuh tanpa ada eliminasi transaksi.
- d. Dalam hal diperlukan untuk analisis dan konfirmasi data, Satker BLU dapat menyajikan Laporan Keuangan BLU yang telah menyertakan penyajian eliminasi.

Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2. Ilustrasi Formulir Memo Penyesuaian.

Gambar 2. Ilustrasi Formulir Memo Penyesuaian

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : () _____
Eselon I : () _____
Wilayah : () _____
Satuan Kerja : () _____
No. Dokumen : _____
Tanggal : _____
Tahun Anggaran : _____
Keterangan : _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	17	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
2	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
3	<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	19	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
4	<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20	<input type="checkbox"/>	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	21	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di BLU
6	<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	22	<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
7	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	23	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Penerimaan	24	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung
10	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	26	<input type="checkbox"/>	
11	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban	27	<input type="checkbox"/>	
12	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	<input type="checkbox"/>	
13	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	<input type="checkbox"/>	
14	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang	30	<input type="checkbox"/>	
15	<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya	31	<input type="checkbox"/>	
16	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Pendek	32	<input type="checkbox"/>	Jurnal Umum

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit

Keterangan:

Dibuat oleh : _____ Disetujui oleh : _____ Direkam oleh : _____
Petugas Verifikasi/Akuntansi _____ Petugas Komputer _____

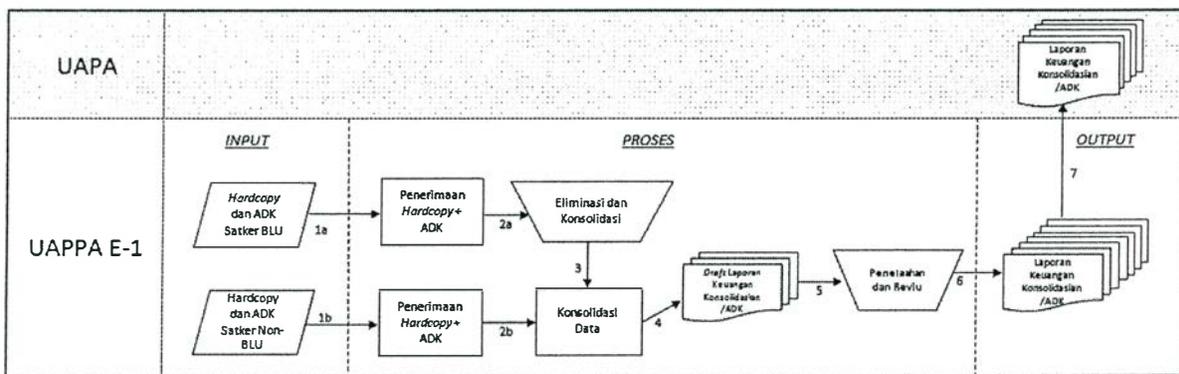
Tanggal : _____ Tanggal : _____ Tanggal : _____

C. Penggunaan Data dan Laporan Keuangan BLU dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang Membawahi BLU

Laporan Keuangan BLU merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh entitas eselon I dan kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU untuk melakukan konsolidasian data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Keseluruhan pengiktisaran data transaksi diproses oleh satker BLU, termasuk apabila terdapat perubahan dan perbaikan data transaksi.

Kegiatan entitas Eselon I (UAPPA E1) dan Kementerian Negara/Lembaga (UAPA) dalam menggunakan data Laporan Keuangan BLU dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 3. Kegiatan Penggunaan Data Laporan Keuangan BLU dalam Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

Gambar 3. Kegiatan Penggunaan Data Laporan Keuangan BLU dalam Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian



Keterangan:

1. Penerimaan Data

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat Eselon 1, UAPPA E1 menerima data dan laporan keuangan dari Satker BLU (1a) dan Satker non-BLU (1b) yang berada dalam lingkup kerja Eselon 1 yang bersangkutan.

2. Pemrosesan Data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian

a. Terhadap data dan laporan keuangan BLU (2a), UAPPA E-1 melakukan penggabungan atau konsolidasi data dan proses eliminasi transaksi terhadap akun-akun transaksi antar-entitas pemerintah pusat. Untuk mempermudah proses eliminasi, UAPPA E-1 dapat memanfaatkan kertas kerja eliminasi dan/atau laporan keuangan BLU yang disajikan setelah eliminasi yang disusun oleh BLU.

- b. Terhadap data dan laporan keuangan satker non-BLU (2b), UAPPA E-1 mengkonsolidasikan dengan menggabungkan data dan laporan keuangan.
3. Penggabungan data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Format Laporan Keuangan BLU yang telah dieliminasi dan data siap dikonsolidasi dilakukan penggabungan dengan laporan keuangan dari satker non-BLU. Format Laporan Keuangan BLU dengan telah siap dikonsolidasi berupa komponen laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, dan LPE.
4. Pencetakan *Draft* data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan UAPPA E-1 konsolidasian tingkat UAPPA E-1.
5. Penelaahan dan Reviu *Draft* data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan konsolidasian tingkat UAPPA E-1.
6. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA E-1 secara periodik.
7. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA E-1 ke entitas Kementerian Negara/Lembaga (UAPA).

D. Ilustrasi Format Laporan Keuangan BLU

Laporan Keuangan BLU disusun untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan ringkasan transaksi yang dilakukan BLU selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan BLU yang bertujuan umum tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Laporan Keuangan BLU bertujuan umum disusun secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar-generasi tanpa secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan tertentu.

Komponen Laporan Keuangan BLU bertujuan umum terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Ilustrasi format komponen Laporan Keuangan BLU bertujuan umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 4. Laporan Realiasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA pada BLU paling kurang menyajikan pos-pos antara lain:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/defisit-LRA;
 - d. Penerimaan pembiayaan;
 - e. Pengeluaran pembiayaan;
 - f. Pembiayaan neto; dan
 - g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Gambar 4. Ilustrasi Format LRA – BLU

<Nama Satker BLU>
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	Uraian	TA 20X1				TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggran	% Real. Anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.1.	Pendapatan PNBP Lainnya					
A.2.	Pendapatan Badan Layanan Umum:					
A.2.1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
A.2.2.	Pendapatan Hibah terikat – uang					
A.2.3.	Pendapatan Hibah tidak terikat – uang					
A.2.4.	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
A.2.5.	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat					
A.2.6.	Pendapatan BLU Lainnya					
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)					
	BELANJA NEGARA					
B.1.	Belanja Pegawai					
B.2.	Belanja Barang dan Jasa					
B.2.1.	Belanja Barang					
B.2.2.	Belanja Jasa					
B.2.3.	Belanja Pemeliharaan					
B.2.4.	Belanja Perjalanan Dinas					

	Uraian	TA 20X1			TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggran	% Real. Anggaran
B.2.5.	Belanja Badan Layanan Umum:				
B.2.5.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan				
B.2.5.2.	Belanja Barang				
B.2.5.3.	Belanja Jasa				
B.2.5.4.	Belanja Pemeliharaan				
B.2.5.5.	Belanja Perjalanan				
B.2.5.6.	Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>				
B.2.5.7.	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit				
B.2.5.8.	Belanja Ketersediaan Layanan BLU				
B.2.5.9.	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				
B.2.5.10.	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU				
B.3.	Belanja Modal				
B.3.1.	Belanja Modal Tanah				
B.3.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
B.3.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
B.3.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
B.3.5.	Belanja Modal Lainnya				
B.3.6.	Belanja Modal Badan Layanan Umum:				
B.3.6.1.	Belanja Modal Tanah – BLU				
B.3.6.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU				
B.3.6.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU				
B.3.6.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan – BLU				
B.3.6.5.	Belanja Modal Lainnya – BLU				
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B)				
	SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)				
	PEMBIAYAAN				
D.1.	Penerimaan Pembiayaan				
D.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)				
D.2	Pengeluaran Pembiayaan				
D.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)				
	Pembiayaan Neto (D= D I– D II)				
	SILPA / (SIKPA) (E = C + D)				

Keterangan:

- A.1. Pos Pendapatan PNBPN Lainnya berasal dari pendapatan realisasi PNBPN umum yang sumber dananya rupiah murni dan telah disetor ke rekening kas negara;
- A.2. Pos Pendapatan Badan Layanan Umum merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional BLU yang sudah disahkan antara lain:

- A.2.1. Pos Pendapatan Jasa Layanan Umum berasal dari realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU yang sudah disahkan.
- A.2.2. Pos Pendapatan Hibah terikat – uang berasal dari realisasi Pendapatan Hibah terikat – uang yang sudah disahkan.
- A.2.3. Pos Pendapatan Hibah tidak terikat – uang berasal dari realisasi Pendapatan Hibah tidak terikat – uang yang sudah disahkan.
- A.2.4. Pos Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU yang sudah disahkan.
- A.2.5. Pos Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat berasal dari realisasi Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat yang sudah disahkan.
- A.2.6. Pos Pendapatan BLU Lainnya berasal dari realisasi Pendapatan BLU Lainnya yang sudah disahkan.
- B.1. Pos Belanja Pegawai berasal dari realisasi belanja pegawai atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
- B.2. Pos Belanja Barang dan Jasa berasal dari realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:
 - B.2.1. Pos Belanja Barang berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.2.2. Pos Belanja Jasa berasal dari realisasi belanja jasa atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.2.3. Pos Belanja Pemeliharaan berasal dari realisasi belanja pemeliharaan atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.2.4. Pos Belanja Perjalanan Dinas berasal dari realisasi belanja perjalanan dinas atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.2.5. Pos Belanja Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:
 - B.2.5.1. Pos Belanja Gaji dan Tunjangan berasal dari realisasi belanja gaji dan tunjangan atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
 - B.2.5.2. Pos Belanja Barang berasal dari realisasi belanja barang atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.

- B.2.5.3. Pos Belanja Jasa berasal dari realisasi belanja jasa atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.4. Pos Belanja Pemeliharaan berasal dari realisasi belanja pemeliharaan atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.5. Pos Belanja Perjalanan berasal dari realisasi belanja perjalanan atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.6. Pos Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund* berasal dari realisasi belanja *endowment fund* atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.7. Pos Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berasal dari realisasi belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.8. Pos Belanja Ketersediaan Layanan BLU berasal dari realisasi belanja ketersediaan layanan BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.9. Pos Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya berasal dari realisasi belanja penyediaan barang dan jasa BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.2.5.10. Pos Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU berasal dari realisasi belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- B.3. Pos Belanja Modal berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja modal atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:
 - B.3.1. Pos Belanja Modal Tanah berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.3.2. Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.3.3. Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.
 - B.3.4. Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D.

- B.3.5. Pos Belanja Modal Lainnya berasal dari realisasi belanja modal lainnya atas alokasi DIPA Rupiah Murni (RM) yang sudah diterbitkan SPM/SP2D;
- B.3.6. Pos Belanja Modal Badan Layanan Umum berasal dari realisasi belanja modal BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan, terdiri dari pos-pos antara lain:
 - B.3.6.1. Pos Belanja Modal Tanah – BLU berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah – BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
 - B.3.6.2. Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
 - B.3.6.3. Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
 - B.3.6.4. Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – BLU bersal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
 - B.3.6.5. Pos Belanja Modal Lainnya – BLU berasal dari realisasi Belanja Modal Lainnya – BLU atas alokasi DIPA PNBPN yang sudah disahkan.
- D.1. Pos Penerimaan Pembiayaan berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan BLU yang sudah disahkan, antara lain:
 - D.1.1. Pos Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri BLU yang sudah disahkan, antara lain: penerimaan pembiayaan utang BLU; penerimaan pengembalian pembiayaan investasi permanen BLU; dan/atau penerimaan pengembalian pembiayaan investasi non permanen BLU.
- D.2. Pos Pengeluaran Pembiayaan berasal dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan BLU yang sudah disahkan, antara lain:
 - D.2.1. Pos Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri BLU yang sudah disahkan, antara lain: pengeluaran pembiayaan utang BLU dalam rangka cicilan/pelunasan pokok utang; pengeluaran pembiayaan investasi permanen BLU; dan/atau pengeluaran pembiayaan investasi non permanen BLU.

2. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL) dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 5. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP SAL pada BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- Saldo Anggaran Lebih awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - Lain-lain; dan
 - Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Gambar 5. Ilustrasi Format LP SAL

<Nama Satker BLU>
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	Uraian	20X1	20X0
A	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal		
B	Penggunaan SAL		
C	Sub Total (A+B)		
D	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
E	Penyesuaian SiLPA/SiKPA:		
F	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
G	Pendapatan alokasi APBN		
H	Penyetoran PNBPN ke Kas Negara		
I	Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara		
J	Pengembalian pendapatan BLU TAYL		
K	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian (D+G+H+I+J)		
L	Sub Total (C+K)		
M	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
N	Lain-Lain		
O	Saldo Anggaran Lebih Akhir (L+M+N)		

Keterangan:

- Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya;
- Pos Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B/SP2B – BLU;
- Pos SiLPA/SiKPA merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari penyajian LRA;



- G. Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun 5xxxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas);
 - H. Pos Penyetoran PNBPN ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBPN yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 423xxx pada Buku Besar Kas);
 - I. Pos Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas penyetoran surplus BLU ke Kas Negara dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan;
 - J. Pos Pengembalian pendapatan BLU TAYL berasal dari pengesahan transaksi pendapatan BLU TAYL;
 - M. Pos Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan pos untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU;
 - N. Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BLU yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
3. Ilustrasi Format Neraca dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 6. Neraca menyajikan posisi keuangan BLU mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang dari kegiatan BLU;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Aset lainnya;
 - h. Kewajiban jangka pendek;
 - i. Kewajiban jangka panjang; dan
 - j. Ekuitas.

Gambar 6. Ilustrasi Format Neraca

<nama Satker BLU>
NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
A	Aset Lancar				
A.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran				
A.2.	Kas Lainnya dan Setara Kas				
A.3.	Kas pada Badan Layanan Umum				
A.4.	Investasi Jangka Pendek-BLU				
A.5.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)				
A.6.	Uang Muka Belanja (prepayment)				
A.7.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
A.8.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
A.9.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi				
A.10.	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU				
A.11.	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU				
A.12.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU				
A.13.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU				
A.14.	Persediaan				
	Jumlah Aset Lancar (A)				
B	Investasi Jangka Panjang				
B.1.	Dana Bergulir				
B.2.	Investasi dalam Obligasi				
B.3.	Investasi Non Permanen BLU				
B.4.	Investasi Permanen BLU				
B.5.	Investasi Non Permanen Lainnya				
B.6.	Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)				
C	Aset Tetap				
C.1.	Tanah				
C.2.	Peralatan dan Mesin				
C.3.	Gedung dan Bangunan				
C.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
C.5.	Aset tetap Lainnya				
C.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C.7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
C.8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
C.9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
C.10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Aset Tetap Bersih (C)				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
D	Piutang Jangka Panjang				
D.1.	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
D.2.	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU				
D.3.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
D.4.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU				
D.5.	Piutang Jangka Panjang lainnya				
D.6.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya				
	Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)				
E	Aset Lainnya				
E.1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
E.2.	Aset Tak Berwujud				
E.4.	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya				
E.5.	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum				
E.6.	Aset Lain-lain				
E.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
E.8.	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya				
	Jumlah Aset Lainnya (E)				
	JUMLAH ASET (A s.d. E)				
	KEWAJIBAN				
F	Kewajiban Jangka Pendek				
F.1.	Utang kepada Pihak Ketiga				
F.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
F.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
F.4.	Uang Muka dari KPPN				
F.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)				
G	Kewajiban Jangka Panjang				
G.1.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan				
G.2.	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN				
G.3.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)				
	EKUITAS				
H	Ekuitas (H)				
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)				

Keterangan:

A. Pos Aset Lancar antara lain:

A.1. Pos Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada buku besar akrual yang merupakan transaksi permintaan Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.

- A.2. Pos Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari saldo akhir Kas Lainnya dan Setara Kas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi uang pihak ketiga yang disimpan oleh BLU.
- A.3. Pos Kas pada Badan Layanan Umum berasal dari saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan akumulasi bersih dari pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU.
- A.4. Pos Investasi Jangka Pendek-BLU berasal dari saldo akhir Investasi Jangka Pendek-BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi jangka pendek dengan menggunakan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- A.5. Pos Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berasal dari saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.
- A.6. Pos Uang Muka Belanja (*prepayment*) berasal dari saldo akhir Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.
- A.7. Pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan atas piutang yang belum jatuh tempo.
- A.8. Pos Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan penjualan angsuran.
- A.9. Pos Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi (TP/TGR) berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan TP/TGR.
- A.10. Pos Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.
- A.11. Pos Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada buku besar akrual yang

merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan selain layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.

- A.12. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada buku besar akrual.
- A.13. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada buku besar akrual.
- A.14. Pos Persediaan berasal dari saldo akhir Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan saldo nilai Persediaan atas barang persediaan yang tersedia dan belum digunakan serta dalam keadaan baik.
- B. Pos Investasi Jangka Panjang antara lain:
 - B.1. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).
 - B.2. Pos Investasi dalam Obligasi berasal dari saldo akhir Investasi dalam Obligasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan obligasi yang menggunakan sumber dana dari APBN (BA BUN Investasi).
 - B.3. Pos Investasi Non Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi nonpermanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
 - B.4. Pos Investasi Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Permanen BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi permanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
 - B.5. Pos Investasi Non Permanen Lainnya berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi non permanen lainnya yang sumber dananya dari APBN (BA BUN Investasi).
 - B.6. Pos Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih berasal dari saldo akhir Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan kontra



akun Investasi yang diperoleh dari perhitungan akuntansi atas estimasi kualitas dana bergulir dan/atau investasi berupa tagihan.

C. Pos Aset Tetap antara lain:

- C.1. Pos Tanah berasal dari saldo akhir Tanah pada buku besar akrual.
- C.2. Pos Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir pada buku besar akrual.
- C.3. Pos Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.
- C.4. Pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada buku besar akrual.
- C.5. Pos Aset tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Aset tetap Lainnya pada buku besar akrual.
- C.6. Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan pada buku besar akrual.
- C.7. Pos Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada buku besar akrual.
- C.8. Pos Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.
- C.9. Pos Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada buku besar akrual.
- C.10. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada buku besar akrual.

D. Pos Piutang Jangka Panjang antara lain:

- D.1. Pos Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU pada buku besar akrual.
- D.2. Pos Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU pada buku besar akrual.
- D.3. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU pada buku besar akrual.
- D.4. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU pada buku besar akrual.

- D.5. Pos Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya berasal dari saldo akhir Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya pada buku besar akrual.
- D.6. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya pada buku besar akrual.
- E. Pos Aset Lainnya antara lain:
 - E.1. Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada buku besar akrual.
 - E.2. Pos Aset Tak Berwujud berasal dari saldo akhir Aset Tak Berwujud BLU pada buku besar akrual.
 - E.3. Pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari saldo akhir Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang telah melalui pengesahan.
 - E.4. Pos Dana Kelolaan BLU berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, penggunaan SAL BLU untuk pembiayaan, dan/atau pengembalian pokok investasi dari masyarakat.
 - E.5. Pos Aset Lain-lain berasal dari saldo akhir Aset Lain-lain BLU pada buku besar akrual.
 - E.6. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU pada buku besar akrual.
 - E.7. Pos Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada buku besar akrual.
- F. Pos Kewajiban Jangka Pendek antara lain:
 - F.1. Pos Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Utang kepada Pihak Ketiga pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga.
 - F.2. Pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada buku besar akrual.
 - F.3. Pos Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Kas dari pihak ketiga yang dicatat sebagai kas lainnya BLU.

- F.4. Pos Uang Muka dari KPPN berasal dari saldo akhir Uang Muka dari KPPN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan untuk alokasi DIPA rupiah murni yang belum dipertanggungjawabkan.
 - F.5. Pos Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.
 - G. Pos Kewajiban Jangka Panjang antara lain:
 - G.1. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan;
 - G.2. Pos Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, dan/atau pengembalian pokok dananya dari masyarakat ke dana kelolaan BLU.
 - G.3. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan lainnya BLU.
 - H. Pos Ekuitas berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Ilustrasi Format Laporan Operasional (LO) dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 7. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO pada BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d. Kegiatan nonoperasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.

Gambar 7. Ilustrasi Format LO – BLU

<Nama Satker BLU>
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	1	2	3	4	5
	KEGIATAN OPERASIONAL				
A	PENDAPATAN OPERASIONAL				
A.1.	Pendapatan dari Alokasi APBN				
A.2.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
A.3.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain				
A.4.	Pendapatan Hibah BLU				
A.5.	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU				
A.6.	Pendapatan BLU Lainnya				
	Jumlah Pendapatan (A)				
B	BEBAN OPERASIONAL				
B.1.	Beban Pegawai				
B.2.	Beban Persediaan				
B.3.	Beban Barang dan Jasa				
B.4.	Beban Pemeliharaan				
B.5.	Beban Perjalanan Dinas				
B.6.	Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat				
B.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
B.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih				
	Jumlah Beban (B)				
C	SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)				
D	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
D.1.	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
D.2.	Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
	Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
D.3.	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
D.4.	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)				
E	SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)				
F	POS LUAR BIASA				
F.1.	Pendapatan Luar Biasa				
F.2.	Beban Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa (F)				
G	SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)				

Keterangan:

A. Pos Pendapatan Operasional antara lain:

- A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari saldo akhir pendapatan dari alokasi APBN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA rupiah murni berdasarkan SPM/SP2D.
- A.2. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
- A.3. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
- A.4. Pos Pendapatan Hibah BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan hibah BLU berupa kas sesuai SP3B/SP2B – BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan hibah BLU berupa barang dan/atau jasa.
- A.5. Pos Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
- A.6. Pos Pendapatan BLU Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan BLU Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

B. Pos Beban Operasional antara lain:

- B.1. Pos Beban Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pegawai berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pegawai dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja pegawai berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban pegawai dari alokasi DIPA PNBK.

- B.2. Pos Beban Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset berupa persediaan yang dikelola oleh BLU.
- B.3. Pos Beban Barang dan Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang dan Jasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP.
- B.4. Pos Beban Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pemeliharaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pemeliharaan berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pemeliharaan dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP, dan/atau perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset persediaan berupa pemeliharaan.
- B.5. Pos Beban Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Perjalanan Dinas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja perjalanan dinas berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA rupiah murni, pengesahan belanja perjalanan dinas berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA PNBP.
- B.6. Pos Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dari alokasi DIPA rupiah murni, dan/atau perhitungan akuntansi atas penggunaan, penyerahan, atau pemakaian habis aset persediaan berupa barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
- B.7. Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi

atas penyusutan dan/atau amortisasi barang milik negara yang dikelola oleh BLU.

- B.8. Pos Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
- C. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dengan Beban Operasioanal.
- D. Pos Kegiatan Non operasional antara lain:
 - D.1. Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.
 - D.2. Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada buku besar akrual.
 - D.3. Pos Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendaptan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
 - D.4. Pos Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban atau kerugian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau setoran PNBPN untuk keuntungan rekening kas negara.
- E. Pos Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit Kegitan Operasional dengan Kegiatan Non Operasional.
- F. Pos Luar Biasa antara lain:
 - F.1. Pos Pendapatan Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.

F.2. Pos Beban Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.

5. Ilustrasi Format Laporan Arus Kas (LAK) dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 8. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Gambar 8. Ilustrasi Format LAK – BLU

<Nama Satker BLU>
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas:		
A.1.	Pendapatan dari Alokasi APBN		
A.2.	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		
A.3.	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		
A.4.	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama		
A.5.	Pendapatan dari Hibah		
A.6.	Pendapatan Usaha Lainnya		
A.7.	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL		
A.8.	Pendapatan PNBPN Umum		
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)		
B	Arus Keluar Kas:		
B.1.	Pembayaran Pegawai		
B.2.	Pembayaran Barang		
B.3.	Pembayaran Jasa		
B.4.	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		
B.5.	Pembayaran Pemeliharaan		
B.6.	Pembayaran Perjalanan Dinas		
B.7.	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		
B.8.	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		
B.9.	Penyetoran PNBPN ke Kas Negara		
	Jumlah Arus Keluar Kas (B)		
C	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
D	Arus Masuk Kas:		
D.1.	Penjualan atas Tanah		
D.2.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
D.3.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
D.4.	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		

	URAIAN	20X1	20X0
D.5.	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya		
D.6.	Penerimaan dari Divestasi		
D.7.	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen		
D.8.	Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Masuk Kas (D)		
E	Arus Keluar Kas:		
E.1.	Perolehan atas Tanah		
E.2.	Perolehan atas Peralatan dan Mesin		
E.3.	Perolehan atas Gedung dan Bangunan		
E.4.	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
E.5.	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		
E.6.	Pengeluaran Penyertaan Modal		
E.7.	Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen		
E.8.	Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)		
F	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
G	Arus Masuk Kas:		
G.1.	Penerimaan Pinjaman		
G.2.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		
G.3.	Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
G.4.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas (G)		
H	Arus Keluar Kas:		
H.1.	Pembayaran Pokok Pinjaman		
H.2.	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		
H.3.	Penyetoran ke Kas Negara		
H.4.	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		
H.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas (H)		
I	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
J	Arus Masuk Kas:		
J.1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
J.2.	Penerimaan Transitoris lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)		
K	Arus Keluar Kas:		
K.1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
K.2.	Pengeluaran Transitoris lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)		
L	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)		
M	Kenaikan/ Penurunan Kas (M= C+F+I+L)		
N	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs		
O	Koreksi Saldo Kas		

	URAIAN	20X1	20X0
P	Saldo Awal Kas		
P.1	Saldo Awal		
P.2	Koreksi Saldo Awal		
Q	Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)		
R	Rincian Saldo Akhir Kas (Q) antara lain:		
R.1.	Saldo Akhir Kas pada BLU		
R.2.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		
R.3.	Investasi Jangka Pendek BLU		
R.4.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		
R.5.	Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
S	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
S.1.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		
S.2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		

Keterangan:

- A. Arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain:
- A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari seluruh saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja sesuai dengan SPM/SP2D belanja yang bersumber dari alokasi DIPA rupiah murni.
- A.2. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan Jasa Layanan Umum yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.3. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.4. Pos Pendapatan dari Hasil Kerja Sama berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hasil kerja sama BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.5. Pos Pendapatan dari Hibah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hibah BLU berupa uang yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.6. Pos Pendapatan Usaha Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan usaha lainnya BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.7. Pos Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL berasal dari akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan kas berupa pengembalian belanja BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

- A.8. Pos Pendapatan PNBPN Umum berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan PNBPN umum yang disetor ke rekening kas umum negara sesuai surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
- B. Arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain:
- B.1. Pos Pembayaran Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pegawai sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.2. Pos Pembayaran Barang berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja barang sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.3. Pos Pembayaran Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja jasa sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.4. Pos Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja persediaan yang menghasilkan persediaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.5. Pos Pembayaran Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.6. Pos Pembayaran Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja perjalanan dinas sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU;
- B.7. Pos Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pengesahan barang dan jasa kekhususan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, antara lain belanja pengelolaan *endowment fund*, belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, belanja ketersediaan layanan BLU, dan/atau belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya;
- B.8. Pos Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU serta mempengaruhi perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
- B.9. Pos Penyetoran PNBPN ke Kas Negara berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk PNBPN umum yang disetor ke kas umum

negara sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.

- C. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi;
- D. Arus masuk kas dari aktivitas investasi antara lain:
 - D.1. Pos Penjualan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas tanah sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.2. Pos Penjualan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas peralatan dan mesin sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.3. Pos Penjualan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas gedung dan bangunan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.4. Pos Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.5. Pos Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.6. Pos Penerimaan dari Divestasi berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari divestasi dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - D.7. Pos Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi non permanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - D.8. Pos Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa kas dari kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.



- E. Arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain:
- E.1. Pos Perolehan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal tanah sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.2. Pos Perolehan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.3. Pos Perolehan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.4. Pos Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.5. Pos Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.6. Pos Pengeluaran Penyertaan Modal berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran penyertaan modal dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - E.7. Pos Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran atas pembelian investasi nonpermanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - E.8. Pos Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa penggunaan kas untuk kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
- F. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas investasi.
- G. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- G.1. Pos Penerimaan Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pinjaman jangka panjang pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - G.2. Pos Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan

atas pengembalian pemberian pinjaman kepada pihak lain pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

- G.3. Pos Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
- G.4. Pos Penerimaan Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pendanaan lainnya pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- H. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - H.1. Pos Pembayaran Pokok Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pembayaran pokok pinjaman dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - H.2. Pos Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pemberian pinjaman kepada pihak lain dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - H.3. Pos Penyetoran ke Kas Negara berasal dari saldo akun pada buku besar akrual untuk setoran kas dan bank BLU ke rekening kas negara sebagai surplus BLU (391141) sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - H.4. Pos Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian
 - H.5. Pos Pengeluaran Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan lainnya dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- I. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas pendanaan.
- J. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain:
 - J.1. Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 - J.2. Pos Penerimaan Transitoris Lainnya berasal dari transaksi selain dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.

- K. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain:
- K.1. Pos Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo debit akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
 - K.2. Pos Pengeluaran Transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- L. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris.
- M. Kenaikan/penurunan kas transitoris merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- N. Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs merupakan selisih antara saldo Pendapatan Selisih Kurs dengan saldo Beban Selisih Kurs atas penjabaran mata uang asing ke dalam rupiah yang disajikan dan mempengaruhi nilai pos-pos Kas di Neraca.
- O. Koreksi saldo kas merupakan koreksi atau akumulasi koreksi pembukuan transaksi tahun berjalan terhadap saldo kas pos Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- P. Saldo Awal Kas merupakan saldo akhir Kas periode sebelumnya yang dapat dipengaruhi adanya koreksi saldo awal yang dilakukan pada tahun berjalan, meliputi penyajian kas pada pos-pos Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Q. Saldo Akhir Kas merupakan penambahan dan/atau pengurangan saldo awal Kas terhadap transaksi berjalan yang mempengaruhi kas dan penyesuaian karena adanya selisih kurs dan/atau koreksi saldo kas. Saldo akhir kas meliputi penyajian pos Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya
- R. Rincian Saldo Akhir Kas merupakan rincian saldo dari pos di Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU, dan reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

- R.1. Kas pada BLU, berasal dari saldo kas dan bank BLU yang telah dilakukan proses pengesahan, kas dan bank BLU belum Disahkan atas pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, dan penyesuaian atas reklasifikasi kas dan bank BLU yang telah disahkan pada periode tertentu.
 - R.2. Kas Lainnya dan Setara Kas, berasal dari transaksi transitoris pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan atau menyalurkannya kepada yang berhak
 - R.3. Investasi Jangka Pendek, berasal reklasifikasi jurnal penyesuaian atas saldo investasi jangka pendek yang menggunakan sumber Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
 - R.4. Dana Kelolaan BLU, berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan dari BA BUN yang belum digunakan dalam penugasan kepada BLU.
 - R.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya, berasal dari saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian terhadap Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
 - S. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca merupakan transaksi yang mempengaruhi Kas pada BLU yang Belum Disahkan dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan tidak tercatat dalam aktivitas kas masuk maupun aktivitas kas keluar, baik aktivitas operasi, aktivitas, investasi, aktivitas pendanaan, maupun aktivitas transitoris.
 - S.1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, berasal dari saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas transaksi pendapatan BLU dan/atau belanja BLU tahun anggaran berjalan yang belum disahkan sampai dengan akhir periode tahun anggaran berjalan.
 - S.2. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran atas transaksi permintaan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan untuk alokasi dana DIPA rupiah murni pada periode tertentu.
6. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 9. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos antara lain:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Gambar 9. Ilustrasi Format LPE – BLU

<Nama Satker BLU>
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	1	3	4	5	6
A	EKUITAS AWAL				
B	SURPLUS/DEFISIT LO				
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR				
C	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
C.1.	Penyesuaian Nilai Aset				
C.2.	Koreksi Nilai Persediaan				
C.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap				
C.4.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi				
C.5.	Lain-Lain				
D	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
E	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (B+C+D)				
F	EKUITAS AKHIR (A + E)				

Keterangan:

- A. Pos Ekuitas awal merupakan saldo ekuitas akhir periode sebelumnya.
- B. Pos Surplus/Defisit LO merupakan surplus/defisit pada Laporan Operasional.
- C. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas antara lain:
 - C.1. Pos Penyesuaian Nilai Aset berasal dari penyesuaian ekuitas atas transaksi Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara dan/atau transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu.
 - C.2. Pos Koreksi Nilai Persediaan berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persediaan.
 - C.3. Pos Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penyesuaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap.

- C.4. Pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.
- C.5. Pos Lain-lain berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Lainnya dan Ekuitas Transaksi Lainnya.
- D. Pos Transaksi Antar Entitas digunakan untuk menampung transaksi Ditagihkan Ke Entitas Lain, Diterima Dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
- Ilustrasi struktur CaLK dapat disusun sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

- A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker BLU
- A.1.1. Latar Belakang
Bagian ini menjelaskan latar belakang berdirinya Badan Layanan Umum. Dapat ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya BLU.
- A.1.2. Struktur Organisasi
Bagian ini menjelaskan struktur organisasi BLU. Dapat disertakan juga bagan struktur organisasi BLU.
- A.1.3. Visi
Bagian ini menjelaskan visi BLU.
- A.1.4. Misi
Bagian ini menjelaskan misi BLU.
- A.1.5. Maksud dan Tujuan
Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan pendirian BLU.
- A.1.6. Nilai-nilai
Bagian ini menjelaskan nilai-nilai organisasi yang dimiliki BLU.
- A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran
Bagian ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Peran BLU.

A.1.8. Kegiatan BLU

Bagian ini menjelaskan kegiatan BLU.

A.1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bagian ini menjelaskan susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian ini menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan dan menyajikan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Bagian ini menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran

Bagian ini menjelaskan definisi pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam bagian ini juga dijelaskan mata uang pelaporan, termasuk penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/atau konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan mata uang asing.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran/estimasi dengan realisasinya;
- Perbandingan realisasi pendapatan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;

- Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi belanja untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran dengan realisasinya;
- Perbandingan realisasi belanja periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.3. Pembiayaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut;
- Penjelasan mutasi atau pembentukan SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan SAL Awal;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SAL;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan SiLPA/SiKPA periode berjalan dengan periode lalu;

- Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian transaksi penyesuaian SiLPA/SiKPA;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan SAL akhir;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Aset

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun aset;
- Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun kewajiban;
- Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.3. Ekuitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Kegiatan Operasional

E.1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pendapatan operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan beban operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.2. Kegiatan Non Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan surplus/defisit kegiatan non operasional, nilai tukar, dan kerugian/keuntungan penurunan nilai aset periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat pada kegiatan non operasional;

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas investasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas pendanaan menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.5. Kas pada BLU

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pos Kas pada BLU periode berjalan dengan periode lalu;

- Penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/atau reklasifikasi saldo Kas pada BLU;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.6. Kas dan Dana yang dikuasai diluar Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Penjelasan atas penyajian dan/atau mutasi kas dan dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, antara lain berupa kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, dan/atau dana kelolaan BLU;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan periode lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus

mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :

- Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Laporan Keuangan BLU ditandatangani oleh Pimpinan BLU selaku UAKPA BLU, dan sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan BLU yang dituangkan ke dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan BLU, dan diilustrasikan sebagaimana Gambar 10.

Gambar 10. Ilustrasi Format Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan Keuangan BLU<...<i>nama satker</i>...> selaku UAKPA BLU yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode <<i>Semester / Tahun Anggaran</i>> sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Tempat, Tanggal Kepala/pimpinan BLU</p> <p><Tanda tangan></p> <p><Nama Terang></p>

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU

A. Definisi dan Jenis Pendapatan BLU

Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan BLU dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Hal transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLU meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM;
merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai, barang dan jasa dan/atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBPNBP;
merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBPNBP;
merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah pusat yang membawahi maupun yang tidak membawahi organisasi vertikal BLU.
4. Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBPNBP;
merupakan perolehan pendapatan BLU dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
5. Pendapatan hibah bentuk uang/barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNBPNBP;
merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas non pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
6. Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBPNBP;
merupakan pendapatan BLU yang tidak berhubungan secara langsung

dengan tugas dan fungsi BLU yang dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLU, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.

7. Pendapatan umum PNBPN yang disetor ke kas negara – DIPA RM; merupakan pendapatan dari realisasi PNBPN umum yang sumber dananya rupiah murni dan/atau untuk keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke rekening kas negara.

B. Pengakuan Pendapatan BLU

Pendapatan BLU diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih; merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN – DIPA RM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan direalisasi; merupakan realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Berdasarkan jenis pendapatan BLU, pengakuan pendapatan BLU diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
2. Pendapatan umum PNBPN yang disetor ke rekening umum kas negara – DIPA RM diakui pada saat penerimaan masuk ke rekening kas umum negara sesuai dokumen sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBPN; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBPN; Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBPN; dan Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBPN; diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada

saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLU.

4. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLU.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

C. Pengukuran Pendapatan BLU

Pengukuran pendapatan BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
2. Pendapatan umum PNBPN diukur sebesar nilai realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBPN; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBPN; Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBPN; dan Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBPN diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan.
4. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang dipersamakan.
5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodifikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan BLU secara Periodik

Secara periodik, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLU yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLU. Pendapatan BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya meliputi:

1. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBP;
2. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBP;
3. Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBP;
4. Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBP; dan
5. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNBP



Proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik atas transaksional pendapatan BLU pada KPPN mitra kerja BLU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik hanya untuk mengesahkan transaksi pendapatan BLU yang telah diterima atau dikeluarkan secara kas.
2. nilai pengesahan pendapatan BLU yang digunakan adalah berdasarkan nilai saldo masing-masing buku pembantu pendapatan (secara kas) pada tanggal pengajuan pengesahan pendapatan BLU, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU.
3. proses peringkasan menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU untuk kepentingan pengesahan dilakukan menggunakan sistem *batch* dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
5. dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan BLU, pengesahan pendapatan BLU secara periodik juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan BLU.
6. dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
7. dokumen yang digunakan dalam pencatatan pendapatan BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
8. mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Pendapatan BLU yang tidak dilakukan pengesahan pendapatan meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan dari alokasi APBN merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi belanja berdasarkan SP2D Belanja.
2. Pendapatan umum PNBPN yang disetor ke kas negara – DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan umum

PNBP telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan negara pada saat diterima di rekening kas negara.

3. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNBP; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi non kas.
4. Pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksional pendapatan secara non-kas dan bank BLU; hal ini tidak dilakukan karena pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian pendapatan yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU.

E. Penyesuaian Pendapatan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian pendapatan BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BLU pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan.

Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan, misalnya:

1. Pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas.
2. Pendapatan non layanan BLU secara akrual non kas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan memo penyesuaian atas pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan, contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo. Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non Layanan BLU dan Piutang BLU.
3. Pendapatan yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi secara akrual non kas dengan mengakui Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan

awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi.

Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan tahunan antara lain:

1. pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode sampai dengan tahunan pada tahun anggaran berjalan dengan contoh transaksi sebagaimana pendapatan akrual di periode semesteran di atas.
2. Pengakuan transaksi pendapatan *deferral* (ditangguhkan) di periode tahunan tahun anggaran berjalan, misalnya pendapatan layanan BLU dan pendapatan non layanan BLU secara kas telah diterima oleh BLU namun prestasi layanan BLU atau non layanan BLU belum selesai dilakukan pada periode tahunan tahun anggaran berjalan sehingga pengakuan pendapatannya ditangguhkan dan akan dicatat pendapatannya pada periode berikutnya. Penyesuaian pendapatan BLU dalam transaksi pendapatan *deferral* berdasarkan memo penyesuaian sesuai hasil analisis buku pembantu Pendapatan Diterima di Muka.

F. Penyajian Pendapatan BLU

Penyajian pendapatan BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Nilai pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional.
2. Nilai pendapatan umum PNBPN sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
 - a. di LRA sebagai PNBPN dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
3. Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBPN; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBPN; Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBPN; dan Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBPN yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.

4. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
 5. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di Neraca sesuai dengan definisi asetnya.
 6. Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU disajikan:
 - a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
 - b. di LAK dalam arus masuk kas aktivitas operasi.
 7. Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas disajikan:
 - a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
 - b. di Neraca sebagai Piutang BLU dalam pos Piutang PNBP.
 8. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non-Operasional
- G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Pendapatan BLU
1. Pendapatan dari alokasi APBN – atas realisasi belanja DIPA RM 424411 Pendapatan Alokasi APBN atas Penerbitan SPM/SP2D DIPA Rupiah Murni
 2. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara – DIPA RM Semua akun yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit antara lain:

- 42311X Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
- 42312X Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
- 42314X Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- 42315X Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
- 42321X Pendapatan Jasa I
- 42322X Pendapatan Jasa II
- 42326X Pendapatan Jasa Kepolisian I
- 42327X Pendapatan Jasa III
- 42328X Pendapatan Jasa Kepolisian II
- 42329X Pendapatan Jasa Lainnya
- 42331X Pendapatan Bunga
- 42336X Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah
- 42351X Pendapatan Pendidikan
- 42371X Pendapatan Iuran Badan Usaha
- 42372X Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
- 42373X Pendapatan dari Perlindungan Hutang dan Konservasi Alam
- 42374X Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
- 42375X Pendapatan Denda
- 42376X Pendapatan Denda II
- 42377X Pendapatan Ijin Pemanfaatan Hutan
- 42391X Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
- 42392X Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan
- 42393X Pendapatan dari Penutupan Rekening
- 42394X Pendapatan dari Selisih Kurs
- 42395X Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
- 42399X Pendapatan Lain-lain

3. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBP

- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
- b. Akun periodik pengesahan pendapatan layanan BLU

Semua akun yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit sehubungan dengan pendapatan layanan BLU antara lain:

- 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
 - 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
 - 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
 - 424114 Pendapatan Jasa Pencetakan
 - 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
 - 424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
 - 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
 - 424118 Pendapatan Penyediaan Barang
 - 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
 - 424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
 - 424122 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
 - 424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
 - 424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
 - 424131 Pendapatan Program Dana Penjaminan
 - 424132 Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
 - 424133 Pendapatan Program Modal Ventura
 - 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
 - 424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
 - 424136 Pendapatan Investasi
 - 424137 Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
 - 424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
 - 424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
 - 424141 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
4. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBP
- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
 - b. Akun periodik pengesahan pendapatan BLU dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBP antara lain:

- 42442 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu K/L
- 424421 Pendapatan dari belanja entitas pemerintah dalam satu K/L untuk beasiswa dengan realisasi belanja akun 521219
- 424429 Pendapatan dari belanja entitas pemerintah dalam satu K/L dengan realisasi belanja identifikasi lainnya
- 42443 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar K/L yang membawahi BLU
- 424431 Pendapatan dari belanja entitas pemerintah antar K/L untuk beasiswa dengan realisasi belanja akun 521219
- 424432 Pendapatan dari belanja entitas pemerintah antar K/L untuk bansos dengan realisasi belanja akun 575111 (misal biaya rumah sakit utk org miskin ditanggung Kemensos)
- 424433 Pendapatan dari belanja entitas pemerintah antar K/L untuk bansos dengan realisasi belanja akun 575112 (misal biaya rumah sakit utk org miskin ditanggung Kemensos)
- 424439 Pendapatan dari Belanja Entitas Pemerintah antar K/L dengan realisasi belanja identifikasi lainnya

5. Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNB

- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
- b. Akun periodik pengesahan pendapatan BLU hasil kerja sama – DIPA PNB antara lain:

- 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
- 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
- 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah

6. Pendapatan hibah BLU bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNB

- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
- b. Akun periodik pengesahan pendapatan pendapatan hibah BLU bentuk uang antara lain:

- 42421 Pendapatan Hibah Terikat – Uang
 - 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
 - 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
 - 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
 - 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
 - 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
 - 42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
 - 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
 - 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
 - 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
 - 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
 - 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
7. Pendapatan hibah bentuk uang/barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNBPN antara lain:
- 42423 Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
 - 424231 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa
 - 424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
 - 424233 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/Jasa
 - 424234 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang/Jasa
 - 424235 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
 - 424236 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa
 - 424239 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Barang/Jasa
 - 42424 Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang/Jasa
 - 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa

- 424242 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
- 424243 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/Jasa
- 424244 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang/Jasa
- 424245 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
- 424246 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa
- 424249 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang/Jasa

8. Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBP

- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodifikasi segmen akun pada BAS.
- b. Akun periodik pengesahan pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBP antara lain:
 - 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
 - 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
 - 424913 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
 - 424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
 - 424915 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
 - 424916 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
 - 424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara - BLU
 - 424919 Pendapatan Lain-lain BLU
 - 424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
 - 424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
 - 424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
 - 424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin

- 424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
- 424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
- 424931 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
- 424932 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
- 424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
- 424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
- 424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
- 424941 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
- 424942 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
- 424943 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
- 424944 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
- 424945 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
- 424949 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU

9. Pendapatan Penyesuaian BLU Sehubungan dengan Perhitungan Akuntansi

- a. Akun transaksional pendapatan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodifikasi segmen akun pada BAS.
- b. Akun periodik dalam rangka penyajian laporan keuangan sehubungan dengan perhitungan akuntansi antara lain:

- 491112 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
- 491312 Pendapatan Penyesuaian Lainnya BLU
- 421412 Pendapatan Pelepasan Aset BLU
- 421428 Pendapatan Perolehan Aset BLU

H. Jurnal Transaksi Pendapatan BLU

- 1. Jurnal pendapatan dari alokasi APBN sesuai dengan SPM/SP2D Belanja dari DIPA RM

a. Jurnal realisasi Belanja:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual				D/K	Lap
51XXXX	Belanja Pegawai			D	LRA,	51XXXX	Beban Pegawai			D	LO
52XXXX	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)			D	LAK	52XXXX	Beban Barang (selain Belanja Barang BLU)			D	LO
52XXXX	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU) yang menghasilkan barang persediaan			D		117911	Persediaan yang Belum Diregister			D	Nrc
53XXXX	Belanja Modal (selain Belanja Modal BLU)			D		13XXXX	Aset Tetap Belum Diregister			D	Nrc
115612	Piutang dari KPPN			K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain			K	LPE

b. Jurnal ikutan (korolari) pengakuan pendapatan alokasi APBN:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual				D/K	Lap
						313111	Ditagihkan ke Entitas Lain			D	LPE
						424411	Pendapatan Alokasi APBN			K	LO, LAK

2. Jurnal pendapatan umum PNBPN sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan:

a. Jurnal realisasi PNBPN untuk keuntungan rekening kas negara:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual				D/K	Lap
219711	Utang kepada KUN			D		313121	Diterima dari Entitas Lain			D	LPE
423XXX	PNBPN Lainnya (pasangan akun sebagaimana huruf G.2 di atas)			K	LRA, LAK	423XXX	PNBPN Lainnya (pasangan akun sebagaimana huruf G.2 di atas)			K	LO

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual				D/K	Lap
						596411	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara			D	LO, LAK
						313121	Diterima dari Entitas Lain			K	LPE

3. Jurnal transaksional pendapatan BLU secara kas diterima oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional pendapatan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional pendapatan BLU yang diterima secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

4. Jurnal periodik pengesahan pendapatan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU

a. Jurnal pengakuan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang kepada Kas BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK
424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	K	LRA, LAK	424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	K	LO

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank - BLU	D	Nrc, LAK
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc, LAK

5. Jurnal transaksional pengembalian pendapatan BLU secara kas dikeluarkan oleh BLU

- a. Satker BLU membuat jurnal transaksional pengembalian pendapatan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
- b. Dalam hal transaksional pendapatan BLU tahun anggaran berjalan dikembalikan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).
- c. Dalam hal pengembalian pendapatan BLU merupakan pendapatan bagian tahun anggaran yang lalu, akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu tersebut adalah akun koreksi terhadap ekuitas.

6. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU

- a. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran berjalan sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

1) Jurnal realisasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	D	LRA, LAK	424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	D	LO
219721 Utang kepada Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc, LAK

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	Buku Besar Akrual
	111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan D Nrc, LAK
	111911 Kas dan Bank - BLU K Nrc, LAK

b. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU untuk tahun anggaran yang lalu:

1) Jurnal realisasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lahu	D	LPSAL LAK	311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lahu	D	LPE LAK
219721 Utang kepada Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc, LAK

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc, LAK

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan BLU yang diterima secara kas yang tidak atau belum dilakukan pengesahan pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK
			424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	K	LO

8. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan non layanan secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			1157xx* Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D	Nrc
			1158xx* Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D	Nrc
			424xxx* Pendapatan BLU	K	LO

Catatan: *Akun dan jurnal detail piutang dari kegiatan operasional dan non operasional BLU serta pendapatannya dibahas lebih lanjut dalam Bab VII Kebijakan Akuntansi Piutang BLU.

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan non layanan secara akrual belum jatuh tempo:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - BLU	D	Nrc
			424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	K	LO

c. Jurnal penyesuaian pada awal periode pelaporan berikutnya melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan non layanan secara akrual belum jatuh tempo dengan membalik akun pengakuan pendapatan yang masih harus diterima BLU dengan pendapatannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	D	LO
			114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - BLU	K	Nrc

d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan akrual yang berasal dari tagihan penjualan angsuran

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan tagihan penjualan angsuran untuk keuntungan rekening kas negara:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum	D	Nrc
			423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	K	LO
			423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LO
			423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli	K	LO
			423124 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina	K	LO

2) Jurnal realisasi PNBPN untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219711 Utang kepada KUN	D		313121 Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	K	LRA, LAK	423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	K	LO
423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LRA, LAK	423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LO
423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli	K	LRA, LAK	423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli	K	LO
423124 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina	K	LRA, LAK	423124 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina	K	LO

3) Jurnal ikutan (korolari) I realisasi PNBPN atas tagihan penjualan angsuran untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			596411 Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	D	LO, LAK
			313121 Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

- 4) Jurnal ikutan (korolari) II realisasi PNBPN atas tagihan penjualan angsuran untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	D	LO
			423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	D	LO
			423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli	D	LO
			423124 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina	D	LO
			151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	K	Nrc

- 5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan tagihan penjualan angsuran BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum	D	Nrc
			424931 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LO
			424932 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
			424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
			424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
			424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO

- 6) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
219721	Utang kepada Kas BLU		D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK	
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LRA, LAK		424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LO	
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LRA, LAK		424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LO	
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LRA, LAK		424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LO	
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LRA, LAK		424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO	
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LRA, LAK		424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO	

- 7) Jurnal ikutan (korolari) I pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
					111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK	
					111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc, LAK	

- 8) Jurnal ikutan (korolari) II pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
					424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	D	LO	
					424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	D	LO	
					424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	D	LO	
					424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	D	LO	
					424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	D	LO	
					111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc, LAK	

e. Pendapatan akrual yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR)

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan TP/TGR untuk keuntungan rekening kas negara:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran- Badan Layanan Umum	D	Nrc
			423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	K	LO
			423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	K	LO

2) Jurnal realisasi PNBPN atas TP/TGR untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219711 Utang kepada KUN	D		313121 Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	K	LRA, LAK	423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	K	LO
423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	K	LRA, LAK	423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	K	LO

3) Jurnal ikutan (korolari) I realisasi PNBPN atas TP/TGR untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			596311 Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	D	LO, LAK
			313121 Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

4) Jurnal ikutan (korolari) II realisasi PNBPN TP/TGR untuk keuntungan rekening kas negara sesuai dengan surat setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	D	LO
			423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	D	LO
			152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	K	Nrc

- 5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan TP/TGR – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi- Badan Layanan Umum	D	Nrc, LAK
			424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	K	Nrc, LO

- 6) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
219721 Utang kepada Kas BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK
424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	K	LRA, LAK	424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	K	Nrc, LO

- 7) Jurnal ikutan (korolari) I pengesahan pendapatan atas pelunasan TP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc, LAK

- 8) Jurnal ikutan (kiorolari) II pengesahan pendapatan atas pelunasan TP/TGR sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	D	LO
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc, LAK

- f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan atas transaksi pendapatan *deferral*:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			424XXX Pendapatan BLU (pasangan akun sebagaimana huruf G.3.b; G.4.b; G.5.b; G.6.b; dan G.8.b di atas)	D	LO
			219214 Pendapatan Diterima di Muka - BLU	K	Nrc

- I. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM, dokumen sumber yang digunakan antara lain DIPA, Revisi DIPA, SSBP, SPP, SPM, dan SP2D atau dokumen yang dipersamakan.
2. Dokumen sumber pendapatan dari pelayanan BLU – DIPA PNBPN, dokumen sumber yang digunakan antara lain kuitansi, faktur, surat perjanjian, bukti penerimaan pendapatan atau yang dipersamakan.
3. Dokumen sumber pendapatan dari pelayanan BLU – dari entitas pemerintah pusat, dokumen sumber yang digunakan antara lain kuitansi, faktur, surat perjanjian bukti penerimaan pendapatan atau yang dipersamakan.
4. Dokumen sumber pendapatan hibah dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat), dokumen sumber yang digunakan antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, bukti penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
5. Dokumen sumber pendapatan non operasional yang disetor ke kas negara, dokumen sumber yang digunakan antara lain Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau yang dipersamakan.
6. Buku pembantu dan *summary* pendapatan secara kas diterima atau dikeluarkan kembali.
7. Buku pembantu dan *summary* pendapatan secara akrual non kas.
8. Memo penyesuaian.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU

A. Definisi dan Jenis Beban BLU

Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu, terdapat beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyeteroran BLU atas pendapatan PNBPN ke Kas Negara.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel, dan perolehan dan/atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP.

3. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU.

4. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan beban sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam rangka pelayanan BLU dan/atau pemanfaatan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLU, dan perolehan dan/atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka

memelihara kondisi aset BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP.

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP.

7. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan.

8. Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi

Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

B. Pengakuan Beban BLU

Secara umum Beban BLU diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA Rupiah Murni diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBP

diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan/atau pembayaran beban BLU secara transaksional.

3. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaan tetapi kerugian persediaan rusak atau usang dalam beban non-operasional.
4. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen serah terima atau yang dipersamakan.
5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodik semesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur.
6. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset.

C. Pengukuran Beban BLU

Pengukuran beban BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA rupiah murni diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan DIPA PNBPN diukur sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional beban BLU.
3. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan.

4. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.
5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan beban BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi beban transaksional yang meliputi kebijakan internal BLU antara lain:

1. Dokumen sumber transaksional beban BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register beban yang unik (tidak termasuk beban-beban yang bersifat periodik seperti beban penyusutan/amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, hanya untuk transaksional beban yang mengakibatkan pengeluaran kas BLU).
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksional beban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas pengeluaran/pengembalian dan pengakuan beban secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan beban non kas.
5. Penggunaan buku pembantu beban BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) beban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun beban BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Proses Pencatatan (*on-treasury*) Beban BLU secara Periodik melalui Pengesahan

Secara periodik, BLU mengajukan pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU ke KPPN mitra kerja atas transaksional yang telah dilakukan oleh BLU yang pembebanannya untuk DIPA PNBPN. Belanja BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya adalah belanja yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU meliputi pengeluaran dan/atau

pengembalian belanja barang BLU dan belanja modal BLU. Proses pengesahan belanja BLU secara periodik tersebut dilakukan sekaligus sebagai proses (mekanisme) pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban BLU yang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BLU pada tahun anggaran berjalan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*on-treasury*) beban dan/atau biaya perolehan aset BLU secara periodik bersamaan dengan pengesahan belanja dilakukan hanya untuk transaksi beban dan biaya perolehan aset secara kas yang mempengaruhi saldo Kas dan Bank BLU.
2. Nilai yang digunakan dalam proses pencatatan (*on-treasury*) atas beban dan/atau biaya BLU adalah nilai saldo masing-masing buku pembantu beban (yang secara kas telah dikeluarkan uangnya oleh BLU) per tanggal pengajuan pengesahan belanja BLU, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun yang sesuai dengan belanjanya.
3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun belanja untuk kepentingan pengesahan sebagaimana angka 2 di atas dapat dilakukan menggunakan sistem *batch* dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. Dalam hal secara transaksional terdapat penerimaan pengembalian kas atas transaksional beban BLU, pengesahan belanja BLU secara periodik diajukan secara bruto dengan memisahkan antara pengesahan belanja BLU dan pengesahan pengembalian belanja BLU tahun anggaran berjalan. Pengesahan atas pengembalian belanja BLU akan mengoreksi nilai pengakuan dan penyajian bebannya.
5. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan belanja BLU dan/atau pengembalian belanja BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
6. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan belanja BLU dan/atau pengembalian belanja BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
7. Mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Beban dan biaya perolehan aset BLU yang tidak dilakukan proses pengesahan belanja secara periodik meliputi:

1. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan adanya realisasi belanja DIPA RM; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena secara sistem akuntansi pemerintah pusat telah tervalidasi dan tercatat sebagai pengeluaran negara pada saat keluar dari rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena Penyetoran BLU ke Kas Negara merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi pendapatan PNBPN untuk keuntungan rekening kas umum negara sesuai dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan.
3. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non-kas dan bank BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena tidak berpengaruh pada saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
4. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian beban yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyesuaian piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain-lain beban deferral (ditangguhkan).

E. Penyesuaian Beban BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan
Penyesuaian beban BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian nilai beban BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan antara lain:

1. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU namun belum dilakukan pengesahan belanjanya sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

2. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidak mempengaruhi saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
3. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

F. Penyajian Beban BLU

Penyajian beban BLU di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional.
2. Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 - a. beban pegawai,
 - b. beban barang dan jasa
 - c. beban persediaan,
 - d. beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
 - e. beban pemeliharaan,
 - f. beban perjalanan dinas,
 - g. beban penyisihan piutang tidak tertagih,
 - h. beban penyusutan dan amortisasi.
3. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBPN untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi
Beban BLU

1. Akun beban detail transaksional, baik transaksi secara kas maupun transaksi secara non kas, diatur secara mandiri oleh masing-masing entitas BLU sesuai dengan karakteristik layanan industrinya.
2. Akun beban sehubungan dengan realisasi belanja alokasi DIPA RM

a. Akun Beban Pegawai

Semua akun Beban Pegawai yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit antara lain:

- 51111X Beban Gaji PNS
- 51112X Beban Tunjangan-tunjangan I PNS
- 51113X Beban Tunjangan-tunjangan II PNS
- 51115X Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS
- 51116X Beban Gaji-PNS TNI/POLRI
- 51117X Beban Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/POLRI
- 51118X Beban Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/POLRI
- 51119X Beban Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
- 51121X Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
- 51122X Beban Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
- 51123X Beban Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
- 51124X Beban Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
- 51131X Beban Gaji Pejabat Negara
- 51132X Beban Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
- 51133X Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
- 51141X Beban Gaji Dokter PTT
- 51151X Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
- 51152X Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh NonPNS
- 51211X Beban Honorarium
- 51221X Beban Lembur
- 51241X Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito
- 51311X Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
- 51312X Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
- 51313X Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
- 51316X Beban Tunjangan Hari Tua
- 51321X Beban Askes PNS/Pejabat Negara
- 51322X Beban Askes Penerima Pensiun

- 51323X Beban Askes TNI/Kemhan
- 51323X Beban Askes POLRI
- 51326X Beban Katastropik
- 51327X Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
- 51328X Beban Program Jaminan Kematian Pegawai

b. Akun Beban Barang dan Jasa antara lain:

- 521111 Beban Keperluan Perkantoran
- 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan
- 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
- 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja
- 521116 Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
- 521119 Beban Barang Operasional Lainnya
- 521211 Beban Bahan
- 521212 Beban Barang Transito
- 521213 Beban Honor Output Kegiatan
- 521214 Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis
- 521216 Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- 521217 Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
- 521218 Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN
- 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya
- 522111 Beban Langganan Listrik
- 522112 Beban Langganan Telepon
- 522113 Beban Langganan Air
- 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 522121 Beban Jasa Pos dan Giro
- 522131 Beban Jasa Konsultan
- 522141 Beban Sewa
- 522151 Beban Jasa Profesi
- 522191 Beban Jasa Lainnya

c. Akun Beban Pemeliharaan antara lain:

- 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 523112 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
- 523123 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 523132 Beban Pemeliharaan Irigasi
- 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan
- 523134 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 523135 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
- 523136 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
- 523191 Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
- 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya

d. Akun Beban Perjalanan Dinas antara lain:

- 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa
- 524112 Beban Perjalanan Dinas Tetap
- 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- 524211 Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
- 524212 Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
- 524219 Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri

e. Akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat antara lain:

- 526111 Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526112 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526115 Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526211 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

- 526212 Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
- 526311 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 3. Akun Beban sehubungan dengan perlakuan akuntansi, baik alokasi DIPA RM maupun alokasi DIPA PNBK antara lain:
 - 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
 - 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
 - 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
 - 591312 Beban Penyusutan Irigasi
 - 591313 Beban Penyusutan Jaringan
 - 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 592111 Beban Amortisasi Goodwill
 - 592112 Beban Amortisasi Hak Cipta
 - 592113 Beban Amortisasi Royalti
 - 592114 Beban Amortisasi Paten
 - 592115 Beban Amortisasi Software
 - 592116 Beban Amortisasi Lisensi
 - 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
 - 592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain
 - 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
 - 593111 Beban Persediaan konsumsi
 - 593112 Beban Persediaan amunisi
 - 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
 - 593114 Beban Persediaan suku cadang
 - 59312 Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
 - 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
 - 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
 - 593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
 - 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

- 593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 593127 Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
- 593131 Beban Persediaan bahan baku
- 593132 Beban Persediaan barang dalam proses
- 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
- 593142 Beban Persediaan barang hasil sitaan
- 593149 Beban Persediaan Lainnya
- 594211 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB
- 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
- 594311 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 594411 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
- 594911 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
- 594931 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
- 594991 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 595111 Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
- 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
- 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
- 595114 Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
- 595116 Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 595117 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
- 596111 Kerugian Pelepasan Aset
- 596121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang
- 596211 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi

4. Akun beban barang BLU untuk kebutuhan periodik pengesahan atas transaksional kas dan untuk kebutuhan periodik pelaporan keuangan atas transaksional non-kas antara lain:

- 525111 Beban Gaji dan Tunjangan
- 525112 Beban Barang
- 525113 Beban Jasa
- 525114 Beban Pemeliharaan
- 525115 Beban Perjalanan
- 525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
- 525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 596114 Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara

5. Akun beban BLU sehubungan dengan perhitungan akuntansi antara lain:

- 594611 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 594613 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
- 594614 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 594619 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 594621 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
- 594622 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
- 594623 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
- 594631 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
- 594632 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
- 594639 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

- 594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- 594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
- 594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
- 594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
- 594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
- 594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 594921 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
- 594941 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU

H. Dokumen Akuntansi yang Digunakan dalam Pencatatan Beban antara lain:

- a. SPM/SP2D, surat setoran PNBPN atau yang dipersamakan untuk beban dari alokasi APBN – DIPA RM
- b. Dokumen pengeluaran kas dan bank BLU
- c. Mutasi barang keluar dan/atau masuk
- d. Buku pembantu dan *summary* beban secara kas dikeluarkan atau diterima kembali
- e. Buku pembantu dan *summary* beban secara akrual non kas
- f. Memo penyesuaian

I. Definisi dan Jenis Belanja BLU

Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BLU mendapatkan

alokasi APBN dari DIPA Rupiah Murni (RM), pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BLU meliputi:

1. Belanja dari realisasi DIPA Rupiah Murni (RM)

Belanja dari realisasi DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D antara lain:

- a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51),
- b. Belanja Barang (kelompok akun 52, kecuali sub kelompok 525),
- c. Belanja Modal (kelompok akun 53, kecuali sub kelompok 537)

2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP

Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU secara pengeluaran kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU antara lain:

- a. Belanja Barang BLU (sub kelompok akun 525)
- b. Belanja Modal BLU (sub kelompok akun 537)

J. Pengakuan Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi DIPA RM

Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM/SP2D Belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal).

2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP

Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU. Pengesahan dilakukan secara triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan.

K. Pengukuran Belanja BLU

1. Nilai Belanja dari realisasi DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Nilai Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU.

L. Penyajian Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi DIPA RM

- a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51) disajikan pada pos Realisasi Belanja Pegawai di LRA.
- b. Belanja Barang (kelompok akun 52, selain sub kelompok akun 525) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang di LRA
- c. Belanja Modal (kelompok akun 53, selain kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Modal di LRA.

2. Belanja BLU

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (525111), dan Belanja Barang BLU (525112, 525113, 525114, 525116, 525117, 525119) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA.
- b. Belanja Modal BLU (kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Belanja Modal BLU di LRA.

M. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi alokasi APBN – DIPA RM

- a. Semua akun Belanja Pegawai yang ada dalam sub-kelompok akun 5 digit antara lain:

51111X Belanja Gaji PNS
51112X Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
51113X Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
51115X Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS
51116X Belanja Gaji-PNS TNI/POLRI
51117X Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/POLRI
51118X Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/POLRI
51119X Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
51121X Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
51122X Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
51123X Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
51124X Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
51131X Belanja Gaji Pejabat Negara
51132X Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
51133X Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
51141X Belanja Gaji Dokter PTT
51151X Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

- 51152X Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS
- 51211X Belanja Honorarium
- 51221X Belanja Lembur
- 51241X Belanja Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito
- 51311X Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
- 51312X Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
- 51313X Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
- 51316X Belanja Tunjangan Hari Tua
- 51321X Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
- 51322X Belanja Askes Penerima Pensiun
- 51323X Belanja Askes TNI/Kemhan
- 51323X Belanja Askes POLRI
- 51326X Belanja Katastropik
- 51327X Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
- 51328X Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai

b. Akun Belanja Barang dan Jasa antara lain:

- 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
- 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
- 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
- 521116 Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
- 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- 521211 Belanja Bahan
- 521212 Belanja Barang Transito
- 521213 Belanja Honor Output Kegiatan
- 521214 Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis
- 521216 Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- 521217 Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
- 521218 Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN
- 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- 522111 Belanja Langganan Listrik
- 522112 Belanja Langganan Telepon
- 522113 Belanja Langganan Air
- 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro
- 522131 Belanja Jasa Konsultan
- 522141 Belanja Sewa
- 522151 Belanja Jasa Profesi
- 522191 Belanja Jasa Lainnya

c. Akun Belanja Pemeliharaan antara lain:

- 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
- 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi
- 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan
- 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
- 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
- 523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
- 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya

d. Akun Belanja Perjalanan Dinas antara lain:

- 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- 524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap
- 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
- 524212 Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
- 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri

e. Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat antara lain:

- 526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
- 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
- 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

2. Belanja BLU atas realisasi pengesahan beban transaksional BLU dan biaya perolehan aset transaksional BLU secara periodik:

a. Akun Belanja Barang BLU antara lain:

- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan – BLU
- 525112 Belanja Barang – BLU
- 525113 Belanja Jasa – BLU
- 525114 Belanja Pemeliharaan – BLU
- 525115 Belanja Perjalanan – BLU
- 525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund – BLU
- 525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit – BLU
- 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya – BLU

b. Akun Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Barang Persediaan BLU antara lain:

- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
- 525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
- 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
- 525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU

- 525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
- 525127 Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
- 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

c. Akun Belanja Modal BLU antara lain:

- 537111 Belanja Modal Tanah - BLU
- 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
- 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
- 537115 Belanja Modal Lainnya - BLU

N. Dokumen Akuntansi yang dapat Digunakan untuk Pencatatan Belanja

1. Dokumen sumber belanja dari alokasi APBN – DIPA RM antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SPM, SP2D
2. Dokumen sumber belanja dari alokasi APBN – DIPA PNPB antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SP3B-BLU, SP2B-BLU

O. Jurnal Transaksi Beban dan Belanja BLU

1. Jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus. Dalam hal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU yang dikeluarkan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN – DIPA rupiah murni (RM) sesuai dengan SPM/SP2D Belanja:

a. Jurnal realisasi belanja DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D Belanja:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
		D/K	Lap			D/K	Lap
51xxxx	Belanja Pegawai	D	LRA LAK	51xxxx	Beban Pegawai	D	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	D	LRA LAK	52xxxx	Beban Barang (selain Belanja Barang BLU)	D	LO
52xxxx	Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU) yang menghasilkan persediaan	D	LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
53xxxx	Belanja Modal (selain Belanja Modal BLU)	D	LRA LAK	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	D	Nrc
115612	Piutang dari KPPN	K		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411 Pendapatan Alokasi APBN	K	LO, LAK

3. Jurnal pengesahan beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas pada periode pengesahan Belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

a. Realisasi pengesahan belanja barang BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan – BLU	D	LRA LAK	525111 Beban Gaji dan Tunjangan – BLU	D	LO
525112 Belanja Barang – BLU	D	LRA LAK	525112 Beban Barang – BLU	D	LO
525113 Belanja Jasa – BLU	D	LRA LAK	525113 Beban Jasa – BLU	D	LO
525114 Belanja Pemeliharaan – BLU	D	LRA LAK	525114 Beban Pemeliharaan – BLU	D	LO
525115 Belanja Perjalanan – BLU	D	LRA LAK	525115 Beban Perjalanan – BLU	D	LO
525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund – BLU	D	LRA LAK	525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund – BLU	D	LO
525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit – BLU	D	LRA LAK	525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit – BLU	D	LO
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya – BLU	D	LRA LAK	525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya – BLU	D	LO
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

b. Realisasi pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan barang persediaan sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	D	LRA LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU	D	LRA LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	D	LRA LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	D	LRA LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc

Buku Besar Kas			Buku Besar AkruaI		
D/K	Lap		D/K	Lap	
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	D LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	D LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	D LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	D LRA LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc

- c. Realisasi pengesahan belanja modal BLU sesuai dengan SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar AkruaI		
D/K	Lap		D/K	Lap	
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	D LRA, LAK	131311	Tanah Belum Diregister	D Nrc
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	D LRA, LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D Nrc
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	D LRA, LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D Nrc
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	D LRA, LAK	134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D Nrc
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	D LRA, LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D Nrc
115631	Piutang dari Kas BLU	K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc

- d. Jurnal ikutan (krolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

4. Jurnal transaksional pengembalian belanja BLU secara kas diterima oleh BLU
- Satker BLU membuat jurnal transaksional pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
 - Dalam hal transaksional pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran berjalan dikembalikan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

- c. Dalam hal pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU merupakan transaksi pengeluaran BLU bagian tahun anggaran yang lalu, akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran yang lalu tersebut adalah akun penerimaan kembali belanja barang BLU tahun anggaran yang lalu (akun 424916) dan/atau akun penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu (akun 424917)
5. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas diterima oleh BLU sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:
- a. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran berjalan:
- 1) Jurnal realisasi pengesahan sesuai SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual			
115631	Piutang dari BLU	Kas		D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
52511X	Belanja BLU	Barang		K	LRA, LAK	52511X	Beban Barang BLU	K	LO
52512X	Belanja BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	Barang		K	LRA, LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc
537111	Belanja Tanah - BLU	Modal		K	LRA, LAK	131311	Tanah Belum Diregister	K	Nrc
537112	Belanja Peralatan dan Mesin - BLU	Modal		K	LRA, LAK	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	Nrc
537113	Belanja Gedung dan Bangunan - BLU	Modal		K	LRA, LAK	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	Nrc
537114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Modal		K	LRA, LAK	134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	K	Nrc
537115	Belanja Lainnya - BLU	Modal		K	LRA, LAK	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc

- 2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual			
						111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
						111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

- b. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran yang lalu sesuai SP3B/SP2B – BLU:
- 1) Jurnal realisasi sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
115631 Piutang dari Kas BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424916 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LRA, LAK	424916 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LO
424917 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LRA, LAK	424917 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LO

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

c. Jurnal koreksi atas penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

1) Koreksi kesatu:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			391116 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	D	LPE
			131111 Tanah	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111 Jalan dan jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi		
			134113 Jaringan		
			135121 Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			135111 Aset Tetap Renovasi	K	Nrc
			136111 Konstruksi dalam Pengerjaan	K	Nrc
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc
			162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	K	Nrc

2) Koreksi kedua:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			424917 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	D	LO
			391116 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	K	LPE

6. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN – DIPA RM

a. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN – DIPA RM tahun anggaran berjalan:

1) Jurnal realisasi sesuai dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
115612			313111		
Piutang dari KPPN	D		Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
51XXXX			51XXXX		
Belanja Pegawai	K		Beban Pegawai	K	LO
52XXXX			52XXXX		
Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU)	K		Beban Barang (selain Belanja Barang BLU)	K	LO
52XXXX			117911		
Belanja Barang (selain Belanja Barang BLU) yang menghasilkan persediaan	K	LRA, LAK	Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc
53XXXX			13XXXX		
Belanja Modal (selain Belanja Modal BLU)	K		Aset Tetap Belum Diregister	K	Nrc

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			424411		
			Pendapatan Alokasi APBN	D	LO, LAK
			313111		
			Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN – DIPA RM tahun anggaran yang lalu:

1) Jurnal realisasi sesuai dengan surat setoran bukan pajak atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219711			313121		
Utang Kepada KUN	D		Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423951			423951		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LRA, LAK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LO
423952			423952		
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LRA, LAK	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LO
423953			423953		
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K		Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	K	LO

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			596114		
			Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	D	LO, LAK
			313121		
			Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban dan biaya perolehan aset BLU yang belum atau tidak dilakukan pengesahan Belanjanya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban dan biaya perolehan aset BLU yang belum atau tidak dilakukan pengesahan Belanjanya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban barang dan jasa BLU yang belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			52511X	Beban Barang - BLU	D LO LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban barang BLU yang menghasilkan barang persediaan dan belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc

c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk biaya perolehan aset BLU yang belum disahkan pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			131311	Tanah Belum Diregister	D Nrc LAK
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D Nrc LAK
			133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D Nrc LAK
			134211	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D Nrc LAK
			166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	D Nrc LAK
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K Nrc

8. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban dan biaya perolehan aset BLU secara akrual non kas:

1) Beban barang secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			52511X	Beban Barang - BLU	D LO
			117911	Persediaan yang Belum Diregister	D Nrc
			212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K Nrc

2) Biaya perolehan aset BLU secara akrual non kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			131311 Tanah Belum Diregister	D	Nrc
			132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
			133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
			134211 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

b. Jurnal penyesuaian untuk beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi:

1) Jurnal penyesuaian untuk beban pemakaian persediaan BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			593111 Beban Persediaan Konsumsi	D	LO
			117111 Barang Konsumsi	K	Nrc
			593112 Beban Persediaan amunisi	D	LO
			117112 Amunisi	K	Nrc
			593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	D	LO
			117113 Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			593114 Beban Persediaan suku cadang	D	LO
			117114 Suku Cadang	K	Nrc
			593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	D	LO
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593127 Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	LO
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	LO
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	K	Nrc
			593131 Beban Persediaan bahan baku	D	LO
			117131 Bahan Baku	K	Nrc
			593132 Beban Persediaan barang dalam proses	D	LO
			117132 Barang dalam Proses	K	Nrc
			593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	D	LO
			117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	K	Nrc
			593142 Beban Persediaan barang hasil sitaan	D	LO
			117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan	K	Nrc
			593149 Beban Persediaan Lainnya	D	LO
			117199 Persediaan Lainnya	K	Nrc

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Beban penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594611 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	D	LO
			116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	K	Nrc
			594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	LO
			116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	K	Nrc
			594613 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi	D	LO
			116613 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi	K	Nrc
			594614 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	D	LO
			116614 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	K	Nrc
			594619 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	D	LO
			116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594621 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	D	LO
			116621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	K	Nrc
			594622 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	D	LO
			116622 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	K	Nrc
			594623 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	D	LO
			116629 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	K	Nrc
			594631 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	LO
			116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	K	Nrc
			594632 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	LO
			116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	K	Nrc
			594639 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	LO
			116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	K	Nrc
			594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	K	Nrc
			594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	D	LO
			116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	K	Nrc
			594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	D	LO
			116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	K	Nrc
			594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	D	LO
			116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	K	Nrc
			594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	D	LO
			116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	K	Nrc
			594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	D	LO
			116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	K	Nrc
			594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	D	LO
			116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU	D	LO
			116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU	K	Nrc
			594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	K	Nrc
			594811 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan	D	LO
			123111 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan	K	Nrc
			594812 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	D	LO
			123112 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	K	Nrc
			594813 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	D	LO
			123113 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	K	Nrc
			594921 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	D	LO
			156211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	K	Nrc
			594941 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	D	LO
			156411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	K	Nrc

- 3) Jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan dan amortisasi dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	LO
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	LO
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	LO
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	K	Nrc
			591312 Beban Penyusutan Irigasi	D	LO
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			591313 Beban Penyusutan Jaringan	D	LO
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	D	LO
			137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			592111 Beban Amortisasi Goodwill	D	LO
			169411 Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	K	Nrc
			592112 Beban Amortisasi Hak Cipta	D	LO
			169412 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU	K	Nrc
			592113 Beban Amortisasi Royalti	D	LO
			169413 Akumulasi Amortisasi Royalti BLU	K	Nrc
			592114 Beban Amortisasi Paten	D	LO
			169414 Akumulasi Amortisasi Paten BLU	K	Nrc
			592115 Beban Amortisasi Software	D	LO
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			592116 Beban Amortisasi Lisensi	D	LO
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	LO
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	K	Nrc
			592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain	D	LO
			169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	K	Nrc
			592222 Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	LO
			169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

- 4) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban penyesuaian karena adanya koreksi terhadap reklasifikasi aset intrakomptabel menjadi aset ekstrakomptabel:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			595111 Beban Aset Ekstrakomptabel Tanah	D	LO
			131111 Tanah	K	Nrc
			595112 Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	D	LO
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	D	LO
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			595114 Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LO
			134111 Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi	K	Nrc
			134113 Jaringan	K	Nrc
			595115 Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	D	LO
			135121 Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			595116 Beban Aset Ekstrakomptabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	LO
			136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			595117 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	D	LO
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc
			162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	K	Nrc

5) Jurnal penyesuaian untuk beban penyesuaian karena adanya kerugian pelepasan aset, persediaan rusak atau usang, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU

i. Jurnal penyesuaian untuk kerugian pelepasan aset BLU dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

ii. Jurnal penyesuaian untuk persediaan rusak atau usang BLU dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			596121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang	D	LO
			117111 Barang Konsumsi	K	Nrc
			117112 Amunisi	K	Nrc
			117113 Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			117114 Suku Cadang	K	Nrc
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			117128	K	Nrc
			Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		
			117129	K	Nrc
			Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses		
			117131	K	Nrc
			117132	K	Nrc
			117141	K	Nrc
			Bahan Baku Barang dalam Proses Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		
			117191	K	Nrc
			Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga		
			117192	K	Nrc
			Persediaan Barang Hasil Sitaan		
			117199	K	Nrc
			Persediaan Lainnya		

- iii. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk kerugian selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			596211	D	LO
			Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		
			111826	K	Nrc
			111911	K	Nrc
			111912	K	Nrc
			111913	K	Nrc
			111914	K	Nrc
			111921	K	Nrc
			111929	K	Nrc
			113311	K	Nrc
			1157XX	K	Nrc
			1213XX	K	Nrc
			1222XX	K	Nrc
			221121	K	Nrc
			221929	K	Nrc
			Dana Bergulir Investasi Permanen BLU Utang Perbankan Jangka Panjang BLU Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU		

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU

A. Definisi dan Jenis Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Kas dan setara kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU. Kas dan setara kas yang dikelola BLU meliputi:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Merupakan akun untuk mencatat transaksional penerimaan pendapatan BLU, transaksional pengeluaran belanja BLU, transaksional pelunasan piutang atas pengakuan pendapatan BLU, transaksional penyelesaian utang atas pengakuan beban BLU dan transaksional saldo kas tunai/bank BLU yang belum disahkan. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas dan Bank BLU pada saat proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara basis kas pada periode pengesahan dengan menggunakan SP3B/SP2B BLU TAYL oleh KPPN mitra kerja.

2. Kas dan Bank BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN mitra kerja BLU selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum.

3. Setara Kas BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo instrumen investasi dalam rangka pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan oleh KPPN mitra kerja BLU.

4. Kas Lainnya di BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang tunai dan/atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang berasal dari transaksi dana kas BLU yang bukan milik BLU yang dapat berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, bunga jasa giro yang belum disetor ke rekening kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni dan/atau DIPA PNBPN.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja berdasarkan DIPA rupiah murni.

B. Pengakuan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada saat transaksional yang berhubungan dengan penerimaan kas atas pendapatan BLU tahun anggaran berjalan, pengeluaran belanja BLU tahun anggaran berjalan, pelunasan secara kas piutang atas pengakuan pendapatan BLU, dan penyelesaian secara kas utang atas pengakuan beban BLU.

2. Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLU sebagai dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.

3. Setara Kas BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLU diakui pada saat pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

4. Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya BLU diakui pada saat kas secara transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor

dari transaksi BLU diterima/diserahkan kepada yang berhak oleh BLU atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat penerimaan uang persediaan dan/atau pertanggungjawaban atau penyetoran pengembalian uang persediaan ke rekening kas negara sesuai dengan masing-masing SP2D-UP/TUP, SP2D-GU/GUP, dan SSBP.

C. Pengukuran Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

a. Transaksi untuk menambah nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional pendapatan layanan BLU, transaksional pelunasan piutang BLU, dan/atau transaksional penerimaan hibah BLU bentuk kas.

b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional pengeluaran belanja dan biaya BLU dan/atau transaksional pelunasan kewajiban BLU.

2. Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai berdasarkan SP3B/SP2B-BLU yang mencatat pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja BLU secara periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU.

3. Setara Kas BLU

Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen kepemilikan atau yang dipersamakan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

4. Kas Lainnya BLU

a. Transaksi untuk menambah nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga

yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.

- b. Transaksional untuk mengurangi nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional penyerahan kas kepada pihak yang berhak sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni.
5. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- a. Transaksi untuk menambah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan berdasarkan dokumen SPM/SP2D – UP/TUP.
 - b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/atau penyetoran pengembalian uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan ke rekening kas negara berdasarkan masing-masing dokumen SPM/SP2D – GU/GUP, dan SSBP

D. Pengesahan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU secara Periodik

Secara periodik, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLU sehubungan dengan pengesahan periodik transaksi pendapatan BLU dan belanja BLU. Pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas transaksional pendapatan BLU dan belanja BLU, serta pembelian/penjualan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU yang dilakukan pengesahan adalah ringkasan transaksi sehubungan dengan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan yang berasal dari ringkasan transaksional pendapatan layanan BLU, penerimaan hibah bentuk kas, belanja BLU, pelunasan piutang pendapatan BLU secara kas diterima oleh BLU. Sedangkan Kas dan Bank

BLU merupakan hasil reklasifikasi hasil pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU.

Dalam hal terdapat setoran atas surplus dana operasional BLU ke rekening kas negara, dana yang disetor ke rekening kas negara tidak dilakukan proses pengesahan kas melalui SP3B/SP2B – BLU. Berdasarkan dokumen setoran kas atau yang dipersamakan, Satker BLU mencatat pengurangan Kas dan Bank BLU di Neraca dan LAK serta mempengaruhi penurunan Sisa Anggaran Lebih (SAL) – BLU dan Ekuitas BLU.

Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU yang tidak dilakukan pengesahan adalah:

1. Setara Kas BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan setara kas sehubungan dengan pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan karena mengurangi atau menambah saldo Kas dan Bank BLU yang telah dilakukan pengesahan.
2. Kas Lainnya di BLU; hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas Lainnya di BLU karena dana yang diterima atau saldonya merupakan bukan milik dan bukan hak BLU yang menambah ekuitas bersih BLU.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas di Bendahara Pengeluaran karena telah tervalidasi dan tercatat oleh KPPN mitra kerja selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum dan tidak dalam rangka menambah ekuitas bersih BLU.

E. Penyesuaian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Transaksi penyesuaian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan yaitu:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Kas dan Bank BLU Belum Disahkan sehubungan dengan BLU belum atau tidak melakukan pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU secara transaksional diterima/dikeluarkan kas sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.
2. Setara Kas BLU; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

3. Kas Lainnya di BLU; atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU.

F. Penyajian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Penyajian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU sebagai berikut:

1. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum.
2. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga.
3. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

G. Perlakuan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU yang Menggunakan Mata Uang Asing

Dalam hal BLU mempunyai rekening bank BLU khusus menampung kas beserta transaksinya dalam bentuk mata uang asing, perlakuan transaksi dalam mata uang asing sebagai berikut:

1. Pendapatan BLU transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari pendapatan diterima. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing pendapatan dalam mata uang asing yang diterima tersebut dilakukan pengesahan pendapatan BLU periodik ke KPPN.
2. Belanja BLU transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari belanja yang dibayarkan. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing belanja dalam mata uang asing yang dibayarkan tersebut dilakukan pengesahan belanja BLU periodik ke KPPN.
3. Dalam hal dilakukan konversi dengan menukarkan sebagian jumlah mata uang asing di rekening bank BLU khusus mata uang asing ke Rupiah, kurs yang digunakan transaksi konversi adalah kurs transaksi pada tanggal transaksi konversi. Jumlah nilai hasil konversi ke Rupiah tersebut tidak dilakukan pengesahan periodik ke KPPN, namun yang

dilakukan pengesahan adalah hasil identifikasi konversi terhadap pendapatan dan/atau belanja selisih kurs terealisasi.

4. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penjabaran ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal hasil penjabaran ke Rupiah tersebut terdapat pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi, dilakukan pengesahan ke KPPN untuk mencatat penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU.
5. BLU menyusun buku pembantu transaksi mata uang asing yang mengidentifikasi tanggal dan nilai transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran kas beserta kurs transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan untuk kebutuhan penjabaran, konversi, dan perhitungan selisih kurs terealisasi maupun belum terealisasi.
6. Dalam hal penjabaran mata uang asing ke Rupiah terhadap rekening bank yang berhubungan dengan transaksi selain Kas pada BLU, tidak dilakukan pengesahan secara periodik dengan KPPN. Hal ini termasuk pengakuan pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasinya.

H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU antara lain:

1. Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
2. Akun Kas dan Bank BLU:
111911 Kas dan Bank BLU
111912 Dana yang akan dijaminkan – BLU
111913 Dana yang akan dipadankan – BLU
3. Akun Setara Kas BLU:
111921 Surat Berharga – BLU
111929 Setara Kas Lainnya – BLU
4. Akun Kas Lainnya di BLU:
111826 Kas Lainnya di BLU
5. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran:
111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

I. Jurnal Transaksi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

1. Jurnal transaksi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan Bank BLU pada saat pengesahan

a. Pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan Bank BLU atas Pendapatan BLU dan Belanja BLU yang melibatkan kas berdasarkan SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas				D/K	LK	Buku Besar Akruai				D/K	LK
111914	(219721:	Utang	D	NRC	111914	Kas dan Bank BLU	D	NRC			
	kepada Kas BLU)					Belum Disahkan					
424XXX	Pendapatan		K	LRA	424XXX	Pendapatan BLU	K	LO			
	BLU										
111911	Kas dan Bank BLU		D	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	D	NRC			
111914	Kas dan Bank		K	NRC	111914	Kas dan Bank	K	NRC			
	BLU Belum					BLU Belum					
	Disahkan					Disahkan					
525XXX	Belanja BLU		D	LRA	525XXX	Beban BLU	D	LO			
111914	(115631:		K	NRC	111914	Kas dan Bank	K	NRC			
	Piutang dari Kas					BLU Belum					
	BLU)					Disahkan					
111914	Kas dan Bank BLU		D	NRC	111914	Kas dan Bank BLU	D	NRC			
	Belum Disahkan					Belum Disahkan					
111911	Kas dan Bank		K	NRC	111911	Kas dan Bank	K	NRC			
	BLU					BLU					

b. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas Pendapatan BLU dan Belanja BLU yang melibatkan kas secara transaksional kas belum disahkan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas				D/K	LK	Buku Besar Akruai				D/K	LK
					111914	Kas dan Bank BLU	D	NRC			
						Belum Disahkan					
					424XXX	Pendapatan BLU	K	LO			
					525XXX	Beban BLU	D	LO			
					111914	Kas dan Bank	K	NRC			
						BLU Belum					
						Disahkan					
					117XXX	Persediaan	D	NRC			
					111914	Kas dan Bank	K	NRC			
						BLU Belum					
						Disahkan					
					1XXXXX	Aset Tetap/Aset	D	NRC			
						Tetap Lainnya/Aset					
						Tak Berwujud					
					111914	Kas dan Bank	K	NRC			
						BLU Belum					
						Disahkan					

c. Jurnal pengesahan atas transaksi pendapatan dan belanja BLU yang melibatkan kas dan kas BLU yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu (TAYL) berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B - BLU TAYL pada tahun anggaran berikutnya:

i. Jurnal untuk mencatat nilai positif akhir tahun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU pada awal tahun anggaran berikutnya bersamaan dengan penyesuaian

nilai Kas dan Bank BLU yang dilakukan KPPN mitra kerja, melalui SP3B/SP2B – BLU TAYL:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111911 Kas dan Bank BLU	D	NRC
			111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	K	NRC

Catatan: tidak ada jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan dan belanja BLU tahun anggaran yang lalu yang melibatkan kas yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu di LRA dan LO pada tahun pengesahan kas dan bank BLU tahun berjalan atau tahun berikutnya.

- ii. Jurnal untuk mencatat nilai negatif akhir tahun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLU pada awal tahun anggaran berikutnya bersamaan dengan jurnal penyesuaian nilai Kas dan Bank BLU yang dilakukan KPPN mitra kerja, melalui SP3B/SP2B – BLU TAYL:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	D	NRC
			111911 Kas dan Bank BLU	K	NRC

Catatan: tidak ada jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan dan belanja BLU tahun anggaran yang lalu yang melibatkan kas yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu di LRA dan LO pada tahun pengesahan kas dan bank BLU tahun berjalan atau tahun berikutnya.

2. Jurnal reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111921 Surat Berharga BLU	-	D NRC
			111929 Setara Kas Lainnya BLU	-	D NRC
			111911 Kas dan Bank BLU	K	NRC

3. Jurnal transaksi atas penyetoran surplus dana operasional BLU ke rekening kas negara berdasarkan dan melalui dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Kas			D/K	LK	Buku Besar Akruaal			D/K	LK
391141	Setoran Surplus BLU	D	LPSAL LAK	391141	Setoran Surplus BLU	D	LAK LPE		
219721	Utang kepada BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	NRC		

Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akruaal			D/K	Lap
				111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc, LAK		
				111911	Kas dan Bank BLU	K	Nrc, LAK		

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas Lainnya di BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas			D/K	LK	Buku Besar Akruaal			D/K	LK
				111826	Kas Lainnya di BLU	D	NRC		
				212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	NRC		
				212122	Utang Usaha	K	NRC		
				212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya				
				212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya				
				212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	K	NRC		
				219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	K	NRC		

5. Jurnal pembentukan Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen SPM/SP2D - UP/TUP:

Buku Besar Kas			D/K	LK	Buku Besar Akruaal			D/K	LK
				111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	D	NRC		
				111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	D	NRC		
				219511	Uang Muka dari KPPN	K	NRC		

6. Jurnal pengesahan sesuai SP3B/SP2B BLU untuk penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU atas pengakuan pendapatan dan/atau belanja selisih kurs terealisasi sehubungan dengan konversi mata uang asing ke Rupiah

- a. Pendapatan selisih kurs terealisasi BLU:

Buku Besar Kas			D/K	LK	Buku Besar Akruaal			D/K	LK
219721	Utang kepada BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	LAK NRC		
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	K	LPSAL LAK	424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	K	LRA LO		

Jurnal korolari (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111911 Kas dan Bank BLU	D	NRC
			111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	K	NRC

b. Belanja selisih kurs terealisasi BLU:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
525113 Belanja Jasa	D	LPSAL LAK	525113 Beban Jasa	D	LRA LO
219721 Utang kepada BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	LAK NRC

Jurnal korolari (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	D	NRC
			111911 Kas dan Bank BLU	K	NRC

7. Jurnal pengesahan sesuai SP3B/SP2B BLU untuk penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU atas pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sehubungan dengan penjabaran mata uang asing ke Rupiah pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

a. (1) Pendapatan selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
219721 Utang kepada BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	LAK NRC
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPSAL LAK	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPE

(2) Jurnal korolari (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrual	D/K	LK
			111911 Kas dan Bank BLU	D	LAK NRC
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	LPE

Catatan: dalam hal pada periode pelaporan semesteran telah dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi, pada periode pelaporan tahunan dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi hanya sebesar selisih atau perbedaan nilai selisih penjabaran periode semesteran dan tahunannya saja.

(3) Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LO yang

mengoreksi ekuitas di LPE pada akhir tahun di periode pelaporan keuangan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrua	D/K	LK
			311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPE
			491112 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	K	LO

Catatan: Pada periode pelaporan keuangan semesteran tidak dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat dan menyajikan pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LO.

b. (1) Beban selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrua	D/K	LK
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPSAL LAK	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	D	LPE
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	LAK NRC

(2) Jurnal korolari (ikutan) kas dan bank BLU:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrua	D/K	LK
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	LAK NRC
			111911 Kas dan Bank BLU	K	LPE

Catatan: dalam hal pada periode pelaporan semesteran telah dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi, pada periode pelaporan tahunan dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi hanya sebesar selisih atau perbedaan nilai selisih penjabaran periode semesteran dan tahunannya saja.

(3) Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengakuan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO yang mengoreksi ekuitas di LPE pada akhir tahun di periode pelaporan keuangan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	LK	Buku Besar Akrua	D/K	LK
			596212 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	D	LAK NRC
			311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	K	LPE

Catatan: Pada periode pelaporan keuangan semesteran tidak dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat dan menyajikan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO.

8. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas dan Setara Kas BLU sehubungan dengan keuntungan atau kerugian selisih kurs belum terealisasi

a. Keuntungan selisih kurs belum terealisasi – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111826 Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU	D	Nrc
			111913 Dana yang akan dipadankan - BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
			111921 Surat Berharga - BLU	D	Nrc
			111929 Setara kas Lainnya - BLU	D	Nrc
			113311 Deposito - BLU	D	Nrc
			491112 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	K	LO

b. Kerugian selisih kurs belum terealisasi – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			596212 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	D	LO
			111826 Kas Lainnya di BLU	K	Nrc
			111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU	K	Nrc
			111913 Dana yang akan dipadankan - BLU	K	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc
			111921 Surat Berharga - BLU	K	Nrc
			111929 Setara kas Lainnya - BLU	K	Nrc
			113311 Deposito - BLU	K	Nrc

- J. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:
1. Bukti penerimaan dan pengeluaran transaksional kas dari pelayanan BLU atau yang dipersamakan.
 2. Dokumen pengesahan periodik penerimaan dan pengeluaran kas dari pelayanan BLU berupa SP3B-BLU/SP2B-BLU atau yang dipersamakan.
 3. Bukti penerimaan dan pengeluaran transaksional kas atas dana pihak ketiga dan penyesuaiannya pada periode pelaporan atau yang dipersamakan.
 4. Buku Pembantu atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).
 5. Dokumen Reklasifikasi setara kas – deposito atau yang dipersamakan (jika diperlukan).
 6. Dokumen kegiatan rekonsiliasi kas atau yang dipersamakan.
 7. Dokumen pengelolaan uang persediaan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran antara lain SPP/SPM/SP2D – UP/TUP, SPP/SPM/SP2D – GUP, Surat Setoran Bukan Pajak pengembalian uang persediaan atau dokumen yang dipersamakan.

8. Buku pembantu dan *summary* penerimaan dan pengeluaran kas transaksional.
9. Buku pembantu dan *summary* penerimaan dan pengeluaran kas atas dana pihak ketiga.
10. Memo Penyesuaian.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU

A. Definisi dan Jenis Persediaan BLU

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dikelola BLU berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentukannya dapat berupa:

1. Barang Persediaan Operasional

merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional BLU, seperti alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dan lain-lain barang perlengkapanyang cepat habis.

2. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan

merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan seperti suku cadang, oli mesin, bahan bakar, dan lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.

3. Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan BLU kepada masyarakat.

4. Barang Persediaan untuk Proses Produksi

merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk proses produksi berupa bahan baku dan/atau berupa barang dalam proses produksi dalam rangka menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional BLU.

B. Pengakuan Persediaan BLU

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/atau barang persediaan diterima dan/atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

C. Pengukuran Persediaan BLU

Persediaan diukur sebesar:

1. Nilai perolehan dari pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, dan dikurangi adanya potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa.
2. Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan yang diproduksi secara sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, dan lain-lain yang sah.
4. Nilai perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi harga pembelian dan biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

D. Penyesuaian Persediaan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Namun demikian, pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dilakukan atas barang persediaan yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

E. Penyajian Persediaan BLU

Persediaan BLU disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar. Nilai persediaan BLU yang disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap digunakan dan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan dapat dilampiri daftar persediaan barang rusak atau usang.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Persediaan BLU

1. Akun transaksional pencatatan Persediaan BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.

2. Segmen akun untuk penyajian di Neraca antara lain:

- 117111 Barang Konsumsi
- 117112 Amunisi
- 117113 Bahan untuk Pemeliharaan
- 117114 Suku Cadang
- 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges
- 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
- 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
- 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
- 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
- 117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses
- 117131 Bahan Baku
- 117132 Barang dalam Proses
- 117199 Persediaan Lainnya
- 117911 Persediaan yang Belum Diregister

3. Segmen Akun untuk Penyajian di LRA antara lain:

- 52512 Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU
- 525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi – BLU
- 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan – BLU
- 525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges – BLU
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU

525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi –
BLU

525127 Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses
Produksi – BLU

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU

4. Segmen Akun untuk Penyajian di LO antara lain:

593111 Beban Persediaan Konsumsi

593112 Beban Persediaan Amunisi

593113 Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

593114 Beban Persediaan Suku Cadang

593121 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan
kepada Masyarakat

593123 Beban Persediaan

593124 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada Masyarakat

593125 Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan
kepada Masyarakat

593126 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

593127 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada
Masyarakat

593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat

593131 Beban Persediaan Bahan Baku

593132 Beban Persediaan Barang dalam Proses

593149 Beban Persediaan Lainnya

596121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang

G. Jurnal Transaksi Persediaan BLU

1. Jurnal transaksional biaya perolehan persediaan BLU secara kas
dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional biaya perolehan persediaan
BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan
pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus. Dalam hal transaksional
biaya perolehan persediaan BLU yang dikeluarkan secara kas tunai,
akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka

pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN – DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang menghasilkan barang persediaan:
 - a. Jurnal realisasi belanja alokasi DIPA rupiah murni berdasarkan dan melalui SPM/SP2D:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
521811	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521812	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521813	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521821	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521822	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521831	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
521832	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
523112	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
523123	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
523134	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
523135	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
523136	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
5261XX	D	LRA, LAK	117911	D	Nrc
115612	K		313111	K	LPE

- b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			313111	D	LPE
			424411	K	LO, LAK

- c. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan persediaan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			117111	D	Nrc
			117112	D	Nrc
			117113	D	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			117114 Suku Cadang	D	Nrc
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	Nrc
			117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	D	Nrc
			117131 Bahan Baku	D	Nrc
			117132 Barang dalam Proses	D	Nrc
			117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	D	Nrc
			117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	D	Nrc
			117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan	D	Nrc
			117199 Persediaan Lainnya	D	Nrc
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

3. Jurnal pengesahan biaya perolehan persediaan BLU secara kas pada periode pengesahan Belanja Barang BLU sesuai dengan SP3B/SP2B - BLU:

a. Realisasi pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan barang persediaan berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrua			D/K	Lap
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc		
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc		
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	D	LRA, LAK	117911	Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc		
115631	Piutang dari Kas BLU	K		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc		

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrua			D/K	Lap
				111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc		
				111911	Kas dan Bank - BLU	K	Nrc		

c. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan persediaan:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrua			D/K	Lap
				117111	Barang Konsumsi	D	Nrc		
				117112	Amunisi	D	Nrc		
				117113	Bahan untuk Operasional	D	Nrc		
				117114	Suku Cadang	D	Nrc		
				117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc		
				117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc		
				117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	Nrc		
				117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	D	Nrc		
				117131	Bahan Baku	D	Nrc		
				117132	Barang dalam Proses	D	Nrc		
				117199	Persediaan Lainnya	D	Nrc		
				117911	Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc		

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan barang persediaan BLU yang melibatkan kas yang belum atau tidak dilakukan pengesahan Belanjanya pada periode pelaporan berjalan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

Catatan: telah dilakukan proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi.

5. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan barang persediaan BLU secara akrual non kas dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pembelian secara non tunai menggunakan alokasi Dana DIPA-RM dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

1) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk transaksional perolehan persediaan dengan pembelian secara kredit (berhutang) DIPA-RM:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

2) Jurnal yang terbentuk hasil pendefinitifan persediaan yang dilakukan melalui proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			117111 Barang Konsumsi	D	Nrc
			117112 Amunisi	D	Nrc
			117113 Bahan untuk Pemeliharaan	D	Nrc
			117114 Suku Cadang	D	Nrc
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	Nrc
			117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	D	Nrc
			117131 Bahan Baku	D	Nrc
			117132 Barang dalam Proses	D	Nrc
			117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	D	Nrc
			117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	D	Nrc
			117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan	D	Nrc
			117199 Persediaan Lainnya	D	Nrc
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

- 3) Jurnal realisasi belanja pelunasan pembelian persediaan non tunai (berhutang) DIPA-RM tahun berikutnya berdasarkan dan melalui SPM/SP2D (tahun berikutnya):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
5261XX Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
115612 Piutang dari KPPN	K		313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

4) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411 Pendapatan Alokasi APBN	K	LO, LAK

5) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk mengeliminasi belanja yang masih harus dibayar dan persediaan yang belum diregister:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	D	Nrc
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pembelian secara non tunai (berhutang) menggunakan alokasi Dana DIPA PNBPNBP dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

1) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk transaksional perolehan persediaan dengan pembelian secara kredit (berhutang) DIPA-PNBPNBP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

2) Jurnal yang terbentuk hasil pendefinitifan persediaan yang dilakukan melalui proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan secara aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			117111 Barang Konsumsi	D	Nrc
			117112 Amunisi	D	Nrc
			117113 Bahan untuk Pemeliharaan	D	Nrc
			117114 Suku Cadang	D	Nrc
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	D	Nrc
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	D	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	Nrc
			117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	D	Nrc
			117131 Bahan Baku	D	Nrc
			117132 Barang dalam Proses	D	Nrc
			117199 Persediaan Lainnya	D	Nrc
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

- 3) Jurnal realisasi belanja pelunasan pembelian persediaan non tunai (berhutang) DIPA-PNBP tahun berikutnya berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B BLU (tahun berikutnya):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525127 Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	D	LRA, LAK	117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

- 4) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

- 5) Jurnal melalui Memo Penyesuaian untuk mengeliminasi Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan persediaan BLU yang belum diregister:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	D	Nrc
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	K	Nrc

6. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian (atau otomatisasi secara aplikasi) sehubungan dengan hasil perhitungan akuntansi dan perhitungan fisik atas beban pemakaian persediaan BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			593111 Beban Persediaan Konsumsi	D	LO
			117111 Konsumsi	K	Nrc
			593112 Beban Persediaan Amunisi	D	LO
			117112 Amunisi	K	Nrc
			593113 Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	D	LO
			117113 Bahan untuk Pemeliharaan	K	Nrc
			593114 Beban Persediaan Suku Cadang	D	LO
			117114 Suku Cadang	K	Nrc
			593121 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	D	LO
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat		
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			593127 Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	K	Nrc
			593131 Beban Persediaan Bahan Baku	D	LO
			117131 Bahan Baku	K	Nrc
			593132 Beban Persediaan Barang dalam Proses	D	LO
			117132 Barang dalam Proses	K	Nrc
			593149 Beban Persediaan Lainnya	D	LO
			117199 Persediaan Lainnya	K	Nrc

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian (atau otomatisasi secara aplikasi) sehubungan dengan hasil perhitungan akuntansi dan perhitungan fisik atas persediaan rusak atau usang BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			596121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang	D	LO
			117111 Barang Konsumsi	K	Nrc
			117112 Amunisi	K	Nrc
			117113 Bahan Pemeliharaan	K	Nrc
			117114 Suku Cadang	K	Nrc
			117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	K	Nrc
			117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	Nrc
			117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	K	Nrc
			117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	K	Nrc
			117131 Bahan Baku	K	Nrc
			117132 Barang dalam Proses	K	Nrc
			117199 Persediaan Lainnya	K	Nrc

H. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber penerimaan dan perolehan persediaan, baik BLU maupun DIPA RM.
2. Dokumen sumber pengeluaran dan penghapusan persediaan, baik BLU maupun DIPA RM.
3. SP3B/SP2B – BLU untuk perolehan persediaan BLU.
4. SPM/SP2D Belanja Barang yang menghasilkan barang persediaan.
5. Buku pembantu dan summary persediaan transaksional.
6. Dokumen hasil perhitungan fisik.
7. Memo penyesuaian.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU

A. Definisi dan Jenis Piutang BLU

Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu:

1. Hak tagih atas layanan BLU

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLU, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLU yang belum dilunasi.

2. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLU dengan pihak lain mitra kerja BLU berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan.

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Piutang BLU dapat berupa:

1. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan operasional BLU dengan memperhatikan masing-masing bisnis karakteristik utama BLU antara lain:

- a. Piutang BLU Pelayanan Kesehatan,
- b. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan,

- c. Piutang BLU Penyedia Jasa Konstruksi,
- d. Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi,
- e. Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya,
- f. Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita,
- g. Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu,
- h. Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya,
- i. Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir,
- j. Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya, atau
- k. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional.

2. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan non-operasional BLU dapat berupa:

- a. Piutang Sewa Tanah – BLU,
- b. Piutang Sewa Gedung – BLU,
- c. Piutang Sewa Ruangan – BLU,
- d. Piutang Sewa Peralatan dan Mesin – BLU,
- e. Piutang Sewa Lainnya – BLU,
- f. Piutang dari Penjualan Aset Tetap – BLU,
- g. Piutang dari Penjualan Aset Lainnya – BLU, dan/atau
- h. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional.

3. Belanja Dibayar di Muka

Merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

4. Uang Muka Belanja

Merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum

selesai proses pertanggungjawaban pekerjaan barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang muka belanja misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual BLU meskipun belum ada penagihan karena belum jatuh tempo. Transaksi pendapatan yang masih harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan.

6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan.

8. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai BLU yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

9. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

a. Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung

dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

B. Pengakuan Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

C. Pengukuran Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BLU diukur sebesar nilai tagihan layanan BLU yang belum dilunasi oleh pengguna layanan BLU berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Belanja dibayar di muka, uang mukan belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan

perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.
6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diukur sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan piutang BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi piutang transaksional yang meliputi kebijakan internal BLU antara lain:

- a. Dokumen sumber transaksional pengakuan piutang BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.
- b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan piutang BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar.
- c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan dan penghapusan piutang.
- d. Penggunaan buku pembantu piutang BLU, termasuk menyediakan informasi umur dan kualitas ketertagihan piutang, dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih atas kualitas masing-masing piutang.
- e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) masing-masing jenis piutang BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun piutang BLU sesuai kodifikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Piutang BLU

1. Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Dalam rangka penyajian saldo piutang pada periode pelaporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan dengan menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLU hal-hal perlu dipertimbangkan antara lain:

- a. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur setiap semester dan tahunan.
 - b. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih besar dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - c. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih kecil dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - d. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian, diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - e. Jenis piutang berupa Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tidak dilakukan penyajian penyisihan piutang tidak tertagihnya.
2. Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang
- a. Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan reklasifikasi bagian lancar piutang untuk Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan memperhatikan bahwa Bagian Lancar TPA, TP/TGR merupakan nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan

setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

- b. Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang secara akrual mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak BLU.

E. Penyajian Piutang BLU

1. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.
2. Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya
3. Piutang BLU yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antara lain:
 - a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
 - b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU
 - c. Belanja Dibayar di Muka – BLU
 - d. Uang Muka Belanja – BLU
 - e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – BLU
 - f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BLU (untuk masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima)
4. Piutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:
 - a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – BLU
 - b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU
 - c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BLU (untuk masing-masing piutang TPA, TP/TGR)

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Piutang BLU

1. Akun transaksional pencatatan piutang BLU; akun detail internal BLU yang dikelola sesuai kebutuhan bisnis BLU dengan tetap mengacu pada 6 digit akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan mengenai kodefikasi segmen akun pada BAS.
2. Akun piutang BLU:
 - a. Akun Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima – BLU antara lain:

- 114411 Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid) BLU
- 114421 Uang Muka Belanja Barang (prepayment) BLU
- 114431 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BLU

b. Akun reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan TP/TGR antara lain:

- 115321 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
- 115431 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU

c. Akun Piutang BLU dari Pendapatan Layanan Utama BLU antara lain:

- 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 115713 Piutang BLU Penunjang Konstruksi
- 115714 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 115721 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
- 115722 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
- 115729 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
- 115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
- 115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
- 115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
- 115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

d. Akun Piutang BLU dari Pendapatan selain Layanan Utama BLU antara lain:

- 115811 Piutang Sewa Tanah - BLU
- 115812 Piutang Sewa Gedung - BLU
- 115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU
- 115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
- 115819 Piutang Sewa Lainnya - BLU
- 115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
- 115829 Piutang dari Penjualan Aset lainnya - BLU
- 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional

e. Akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLU antara lain:

- 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan

- 116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 116613 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
- 116614 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 116621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
- 116622 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
- 116629 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
- 116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
- 116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
- 116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
- 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- 116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
- 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
- 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
- 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
- 116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 11673 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

116731 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

116732 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

f. Akun Tagihan Penjualan Angsuran dan TP/TGR – BLU (Bagian Jangka Panjang) antara lain:

151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – BLU

152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU

g. Akun Penyisihan Piutang TPA dan TP/TGR Tidak Tertagih (Bagian Jangka Panjang) antara lain:

156211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU

156411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

G. Jurnal Transaksi Piutang BLU

1. Jurnal transaksional pencatatan piutang BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional pencatatan piutang BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.

2. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan piutang layanan utama BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	D	Nrc
			424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	K	LO
			115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	Nrc
			424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	K	LO
			115713 Piutang BLU Penunjang Konstruksi	D	Nrc
			424113 Pendapatan Jasa	K	LO
			115714 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	D	Nrc
			424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	D	Nrc
			424114 Pendapatan Jasa Pencetakan	K	LO
			424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	K	LO
			424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	K	LO
			424118 Pendapatan Penyediaan Barang	K	LO
			424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	K	LO
			115721 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	D	Nrc
			424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	K	LO
			115722 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	D	Nrc
			424122 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	K	LO
			424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	K	LO
			115729 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	D	Nrc
			424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	K	LO
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc
			424131 Pendapatan Program Dana Penjaminan	K	LO
			424132 Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LO
			424133 Pendapatan Program Modal Ventura	K	LO
			424136 Pendapatan Investasi	K	LO
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc
			424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LO
			424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LO
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc
			424137 Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	K	LO
			424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
			424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	D	Nrc
			424141 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	K	LO
			115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	D	Nrc
			424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu K/L	K	LO
			424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Pemerintah Pusat di luar K/L yang membawahi BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

- Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan piutang atas pendapatan yang bukan layanan utama BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			115811 Piutang Sewa Tanah -BLU	D	Nrc
			424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	K	LO
			115812 Piutang Sewa Gedung - BLU	D	Nrc
			424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	K	LO
			115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU	D	Nrc
			424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	K	LO
			115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	D	Nrc
			424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	K	LO
			115815 Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU	D	Nrc
			424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115819 Piutang Sewa Lainnya - BLU	D	Nrc
			424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	K	LO
			115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU	D	Nrc
			424931 Pendapatan BLU Lainnya dari Tanah BLU	K	LO
			424932 Pendapatan BLU Lainnya dari Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
			424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
			424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
			115821 Piutang dari Penjualan Aset Lainnya - BLU	D	Nrc
			424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO
			115831 Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU	D	Nrc
			424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU	K	LO
			424935 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
			424936 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
			424937 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	K	LO
			115839 Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU	D	Nrc
			424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Pemindahtanganan BMN Lainnya BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima – BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja Dibayar di Muka:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			114411 Belanja Barang Dibayar di Muka (prepaid) BLU	D	Nrc
			525111 Beban Gaji dan Tunjangan	K	LO
			525112 Beban Barang	K	LO
			525113 Beban Jasa	K	LO
			525114 Beban Pemeliharaan	K	LO
			525115 Beban Perjalanan	K	LO
			525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	K	LO
			525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
			525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	K	LO

b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Uang Muka Belanja:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			114421 Uang Muka Belanja Barang (prepayment) BLU	D	Nrc
			525111 Beban Gaji dan Tunjangan	K	LO
			525112 Beban Barang	K	LO
			525113 Beban Jasa	K	LO
			525114 Beban Pemeliharaan	K	LO
			525115 Beban Perjalanan	K	LO
			525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	K	LO
			525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
			525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	K	LO

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			114431 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BLU	D	Nrc
			424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
			424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya	K	LO
			424913 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	K	LO
			424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

5. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU

- a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang Tagihan Penjualan Angsuran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum	D	Nrc
			424931 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LO
			424932 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
			424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
			424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
			424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	D	Nrc
			423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	K	LO
			423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun yang terjadi secara transaksional pada saat ada pelunasan masing-masing piutang.

- c. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			115321 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU	D	Nrc
			151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

- d. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			115431 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU	D	Nrc
			152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	K	LO

Catatan: Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

6. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih secara periodik dalam rangka penyusunan laporan keuangan

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang layanan utama BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594611 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	D	LO
			116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	K	Nrc
			594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	D	LO
			116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	K	Nrc
			594613 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi	D	LO
			116613 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi	K	Nrc
			594614 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	D	LO
			116614 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	K	Nrc
			594619 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	D	LO
			116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	K	Nrc
			594621 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	D	LO
			116621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akual	D/K	Lap
			594622 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	D	LO
			116622 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	K	Nrc
			594623 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	D	LO
			116629 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	K	Nrc
			594631 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	LO
			116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	K	Nrc
			594632 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	LO
			116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	K	Nrc
			594639 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	LO
			116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	K	Nrc
			594651 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	D	LO
			116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	K	Nrc
			594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang dari pendapatan yang bukan layanan utama BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	D	LO
			116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	K	Nrc
			594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	D	LO
			116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	K	Nrc
			594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	D	LO
			116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	K	Nrc
			594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	D	LO
			116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	K	Nrc
			594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU	D	LO
			116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU	K	Nrc
			594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	D	LO
			116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU	K	Nrc
			594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU	D	LO
			116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjumlahan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang penjualan angsuran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594921 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	D	LO
			156211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjumlahan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang TP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594941 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	D	LO
			156411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjumlahan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- e. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594321 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	D	LO
			116731 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan bagian lancar TP/TGR:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			594421 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	D	LO
			116732 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- H. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:
1. Dokumen sumber piutang transaksional dari kegiatan operasional BLU Satker BLU mengembangkan sistem akuntansi piutang secara mandiri sesuai dengan kebutuhan tata kelola masing-masing karakteristik bisnis BLU, termasuk dokumen sumber yang digunakan dan dijadikan dalam pengakuan piutang, baik piutang dari pendapatan layanan utama BLU maupun piutang dari pendapatan lain bukan layanan utama BLU.
 2. Buku Pembantu Piutang.
 3. Buku Pembantu Pendapatan Non-Kas.
 4. Memo penyesuaian.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD BLU

A. Aset Tetap BLU

1. Definisi dan Jenis Aset Tetap BLU

Aset Tetap Badan Layanan Umum (BLU) adalah aset berwujud yang dimiliki BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional BLU. Aset tetap BLU secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

2. Pengakuan Aset Tetap BLU

Aset Tetap BLU diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Pengukuran Aset Tetap BLU

Pengukuran Aset Tetap BLU memperhatikan transaksi perolehannya sebagai berikut:

- a. Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBP).

- b. Transfer masuk, diperoleh dari entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah pusat. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya transfer.
- c. Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.
- d. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-aset tetap menjadi Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:
 - 1) Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan periodenya.
- e. Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik BLU dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- f. Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap BLU yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, pengeluaran tersebut ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal, pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakui dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau beban pemeliharaan.

- h. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4. Penghapusan Aset Tetap BLU

Secara umum, penghapusan Aset Tetap BLU dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

a. Penghentian Penggunaan

- 1) Pada kondisi tertentu, suatu Aset Tetap BLU dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu Aset Tetap BLU tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tetap BLU tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- 2) Aset Tetap BLU yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Suatu Aset Tetap BLU dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 4) Aset Tetap BLU yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pelepasan Aset Tetap BLU

Pelepasan Aset Tetap BLU lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap BLU dilepaskan karena dipindahtangankan,

maka Aset Tetap BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap BLU harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BLU dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk Aset Tetap BLU dengan cara:

1) Dijual

- i. Aset yang dijual dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- ii. BLU harus mengidentifikasi dengan tepat Aset Tetap yang dijual (Aset Tetap biasa atau Aset Tetap BLU).
- iii. Identifikasi tersebut sangat penting karena terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.
- iv. Pendapatan dari penjualan Aset Tetap biasa merupakan PNBPN (423xxx) yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak perlu disahkan.
- v. Pendapatan dari penjualan Aset Tetap BLU merupakan pendapatan BLU (424xxx) yang dapat dikelola langsung dan harus dilakukan proses pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU di KPPN.

2) Dipertukarkan

Aset Tetap BLU yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

3) Dihilahkan

Aset Tetap BLU yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

c. Aset Tetap Hilang

- 1) Aset Tetap BLU hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Terhadap Aset Tetap BLU yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui

apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

- 3) Aset Tetap BLU hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat Aset Tetap BLU dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLU hilang menjadi aset lainnya.
- 4) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

d. Reklasifikasi Keluar

Aset Tetap BLU dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

5. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU

Koreksi nilai aset tetap BLU antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);
- b. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU karena adanya pengembalian belanja modal;
- c. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK; dan
- d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah/kurang nilai Aset Tetap BLU dilakukan tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap BLU saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan (retrospektif).

6. Penyusutan Aset Tetap BLU secara Periodik

- a. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap BLU disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

- b. Metode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan demikian, beban penyusutan diperoleh dengan membagi nilai perolehan aset tetap dengan periode masa manfaatnya.
- c. Penyusutan Aset Tetap BLU dilakukan secara periodik (semesteran), dengan mengakui adanya Beban Penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya sepanjang masa penggunaannya

7. Penyajian Aset Tetap BLU

Penyajian Aset Tetap BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Tanah BLU

- 1) Tanah BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
- 2) Mutasi Tanah BLU pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan;
- 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah;
 - ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.

b. Peralatan dan Mesin BLU

- 1) Peralatan dan Mesin BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU.
- 2) Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin;
 - ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Peralatan dan Mesin;
 - iii. Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada),

masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c. Gedung dan Bangunan BLU

- 1) Gedung dan Bangunan BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU.
- 2) Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan;
 - ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan Bangunan;
 - iii. Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - iv. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

- 1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU.
- 2) Beban Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;

- iii. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Aset Tetap Lainnya BLU
- 1) Aset Tetap Lainnya BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 - 2) Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;
 - ii. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
 - iii. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - iv. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan BLU
- 1) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) BLU disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;

- 2) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
 - i. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - iv. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - v. Jumlah Retensi.

B. Aset Tak Berwujud BLU

1. Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud BLU

Aset Tak Berwujud (ATB) BLU adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud BLU secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:

- i. *Software* Komputer
- ii. Lisensi dan *Franchise*;
- iii. Hak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
- iv. Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
- v. ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
- vi. Royalti;
- vii. Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
- viii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

2. Pengakuan Aset Tak Berwujud BLU

Untuk dapat diakui sebagai ATB, BLU harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuan ATB. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

3. Pengukuran Aset Tak Berwujud BLU

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut:

a. ATB yang diperoleh secara eksternal melalui:

- 1) Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset Tak Berwujud BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBPN)
- 2) Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- 3) Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.
- 4) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-ATB menjadi ATB. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. ATB yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debit dan ATB yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
 - ii. Akumulasi amortisasi ATB terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi amortisasi atas ATB yang masuk (bertambah) sebesar tarif amortisasi periode bersangkutan.
- 5) Donasi/Hibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset yang ditetapkan oleh pimpinan/kuasa pengguna anggaran BLU.

b. ATB yang diperoleh dari pengembangan internal diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

4. Penghapusan ATB BLU

Penghapusan ATB BLU dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

a. Penghentian Penggunaan

- 1) Pada kondisi tertentu, suatu ATB BLU dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu ATB BLU tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB BLU tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- 2) ATB BLU yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Suatu ATB BLU dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila ATB secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 4) ATB BLU yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pelepasan ATB

Pelepasan ATB BLU lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu ATB BLU dilepaskan karena dipindahtangankan, maka ATB BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan ATB BLU harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BLU dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk ATB BLU dengan cara:

- 1) Dijual
 - i. BLU harus mengidentifikasi dengan tepat ATB yang dijual (ATB biasa atau ATB BLU).
 - ii. Identifikasi tersebut sangat penting karena terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.
 - iii. Pendapatan dari penjualan ATB biasa merupakan PNPB (kelompok akun 423xxx) yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak perlu disahkan.

iv. Pendapatan dari penjualan ATB BLU merupakan pendapatan BLU (kelompok akun 424xxx) yang dapat dikelola langsung dan harus dilalukan proses pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU di KPPN.

2) Dipertukarkan

Aset Tetap BLU yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

3) D hibahkan

Aset Tetap BLU yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

c. ATB Hilang

1) ATB BLU hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Terhadap ATB BLU yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

3) ATB BLU hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat ATB BLU dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLU hilang menjadi aset lainnya.

4) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

d. Reklasifikasi Keluar

ATB BLU dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari ATB menjadi Non-ATB BLU. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

5. Koreksi Nilai ATB BLU

Koreksi nilai ATB BLU antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai ATB BLU sebagai akibat dari hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);
- b. Koreksi Nilai ATB BLU karena adanya pengembalian belanja modal;
- c. Koreksi Nilai ATB BLU sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK; dan
- d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah/kurang nilai ATB BLU dilakukan tidak hanya terhadap nilai ATB BLU saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi amortisasi (retrospektif).

6. Amortisasi ATB BLU secara Periodik

- a. ATB BLU dilakukan amortisasi secara periodik.
- b. Metode amortisasi garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban amortisasi tiap periode. Dengan demikian, beban amortisasi diperoleh dengan membagi nilai perolehan ATB BLU dengan periode masa manfaatnya.
- c. Beban Amortisasi BLU dilakukan secara periodik (semesteran), dengan mengakui adanya Beban Amortisasi dan diakumulasikan amortisasinya sepanjang masa penggunaannya

7. Penyajian ATB BLU

Penyajian ATB BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud BLU disajikan pada Neraca dalam kelompok Aset Lainnya dikurangi kontra akun berupa akumulasi amortisasi BLU;
- b. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Penyusutan/Amortisasi.

C. Perlakuan Pengesahan Aset Tetap BLU dan Aset Tak Berwujud BLU

Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada BLU melalui pembelian dapat dilakukan, baik dengan menggunakan alokasi dana DIPA rupiah murni (RM) maupun DIPA PNPB. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh BLU:

1. Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dengan menggunakan alokasi dana DIPA RM dilakukan dengan menggunakan akun Belanja Modal (kelompok akun 53xxxx, kecuali kelompok akun 537xxx). Atas belanja ini, BLU tidak perlu melakukan pengesahan ke KPPN karena belanja ini sudah tervalidasi (*on-treasury*) oleh KPPN pada saat realisasi belanja (terbitnya SPM/SP2D).
 2. Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dengan menggunakan alokasi dana DIPA PNBP dilakukan dengan menggunakan akun Belanja Modal BLU (kelompok akun 537xxx). Atas belanja ini, BLU harus melakukan pengesahan belanja BLU ke KPPN mitra kerja secara periodik (triwulanan).
 3. Secara periodik, BLU melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri antara realisasi Belanja Modal (kelompok akun 53xxxx) dengan mutasi aset tetap/ATB untuk memastikan setiap realisasi Belanja Modal tersebut dapat ditelusuri fisik barang atau *output*-nya.
 4. Dalam hal terdapat kesalahan penggunaan akun belanja, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat realisasi Belanja Modal yang menghasilkan BMN yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dan/atau ATB, BLU harus melakukan koreksi/penyesuaian dengan mengakui adanya Beban Aset Ekstrakomptabel.
 - b. Apabila terdapat perolehan BMN yang memenuhi kriteria Aset Tetap dan/atau ATB namun diperoleh melalui selain belanja modal, BLU harus mengakui dan mencatat Aset Tetap dan/atau ATB tersebut dan menyajikannya dalam Neraca.
- D. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Aset Tetap BLU dan Aset Tak Berwujud BLU antara lain:
1. Segmen Akun Aset Tetap BLU dan ATB BLU yang Digunakan untuk Penyajian di Neraca antara lain:
 - 131111 Tanah
 - 131211 Tanah Belum Diregister
 - 132111 Peralatan dan Mesin
 - 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
 - 133111 Gedung dan Bangunan
 - 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
 - 134111 Jalan dan Jembatan

- 134112 Irigasi
 - 134113 Jaringan
 - 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister
 - 134212 Irigasi Belum Diregister
 - 134213 Jaringan Belum Diregister
 - 135111 Aset Tetap Renovasi
 - 135121 Aset Tetap Lainnya
 - 136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister (Aset Tetap Lainnya)
 - 162111 Goodwill
 - 162121 Hak Cipta
 - 162131 Royalti
 - 162141 Paten
 - 162151 Software
 - 162161 Lisensi
 - 162171 Hasil Kajian/Penelitian
 - 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya
 - 162311 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
 - 166111 Aset Lain-lain
 - 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
 - 166113 Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
 - 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister
2. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi ATB untuk Penyajian di Neraca antara lain:
- 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 - 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
 - 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
 - 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi
 - 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan
 - 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
 - 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
 - 169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
- 169313 Akumulasi Amortisasi Royalti
- 169314 Akumulasi Amortisasi Paten
- 169315 Akumulasi Amortisasi Software
- 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi
- 169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
- 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

3. Segmen Akun yang Digunakan dalam Belanja Perolehan Aset Tetap dan ATB dari sumber dana DIPA Rupiah Murni sesuai SPM/SP2D, dengan kelompok akun antara lain:

- 5311xx Belanja Modal Tanah
- 5321xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 5331xx Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 5341xx Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5361xx Belanja Modal Lainnya

4. Segmen Akun yang Digunakan dalam pengesahan Belanja Perolehan Aset Tetap dan ATB dari sumber dana DIPA PNBPN sesuai SP3B/SP2B – BLU antara lain:

- 537111 Belanja Modal Tanah - BLU
- 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
- 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
- 537115 Belanja Modal Lainnya - BLU

5. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pelepasan, Penjualan, Penghapusan Aset Tetap dan ATB dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni sesuai dengan dokumen setoran ke kas negara atau yang dipersamakan antara lain:

- 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
- 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
- 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan

6. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pelepasan, Penjualan, Penghapusan Aset Tetap dan ATB dari Sumber Dana DIPA PNBPN sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU antara lain:

- 424931 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
 - 424932 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
 - 424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
 - 424934 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
 - 424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
 - 424941 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
 - 424942 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
 - 424943 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
 - 424944 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
 - 424945 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
 - 424949 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
7. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pengakuan Beban dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi untuk Aset Tetap dan ATB antara lain:
- 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
 - 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
 - 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
 - 591312 Beban Penyusutan Irigasi
 - 591313 Beban Penyusutan Jaringan
 - 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 592111 Beban Amortisasi Goodwill
 - 592112 Beban Amortisasi Hak Cipta
 - 592113 Beban Amortisasi Royalti
 - 592114 Beban Amortisasi Paten
 - 592115 Beban Amortisasi Software
 - 592116 Beban Amortisasi Lisensi
 - 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
 - 592118 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
 - 592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain

592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

8. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pengakuan Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset Tetap dan ATB antara lain:

491411 Pendapatan Pelepasan Aset

596111 Kerugian Pelepasan Aset

9. Segmen Akun yang Digunakan dalam Rangka Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan ATB antara lain:

391114 Revaluasi Aset Tetap

391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

391119 Koreksi Lainnya

391114 Revaluasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

E. Jurnal Transaksi Aset Tetap BLU dan Aset Tak Berwujud BLU

1. Jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BLU secara kas dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional biaya perolehan Aset Tetap dan ATB BLU yang dikeluarkan secara kas dan bank BLU dari pendapatan BLU, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN – DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Modal – Rupiah Murni

a. Jurnal realisasi Belanja Modal DIPA Rupiah Murni berdasarkan dan melalui SPM/SP2D:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Aktual	D/K	Lap
5311XX Belanja Modal Tanah	D	LRA, LAK	131211 Tanah Belum Diregister	D	Nrc
5321XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D	LRA, LAK	132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
5331XX Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D	LRA, LAK	133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
53411X Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LRA, LAK	134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
53412X Belanja Modal Irigasi	D	LRA, LAK	134212 Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
53413X Belanja Modal Jaringan	K	LRA, LAK	134213 Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
5361 Belanja Modal Lainnya	D	LRA, LAK	166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115612 Piutang dari KPPN	K		313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	D	LPE
			424411 Pendapatan Alokasi APBN	K	LO, LAK

c. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan Aset Tetap dan ATB:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			131211 Tanah Belum Diregister	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	K	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134212 Irigasi Belum Diregister	K	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			134213 Jaringan Belum Diregister	K	Nrc
			135111 Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc
			162111 Goodwill	D	Nrc
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			162131 Royalti	D	Nrc
			162141 Paten	D	Nrc
			162151 Software	D	Nrc
			162161 Lisensi	D	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	D	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc

3. Jurnal transaksi realisasi pengesahan belanja dari alokasi DIPA PNBPN sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU Belanja Modal

a. Jurnal realisasi pengesahan Belanja Modal DIPA PNBPN berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
537111 Belanja Modal Tanah - BLU	D	LRA, LAK	131211 Tanah Belum Diregister	D	Nrc
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	D	LRA, LAK	132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	D	LRA, LAK	133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	D	LRA, LAK	134211 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
537115 Belanja Modal Lainnya - BLU	D	LRA, LAK	16641 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

c. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan Aset Tetap dan ATB:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			131211 Tanah Belum Diregister	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	K	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134212 Irigasi Belum Diregister	K	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			134213 Jaringan Belum Diregister	K	Nrc
			135111 Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	K	Nrc
			162111 Goodwill	D	Nrc
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			162131 Royalti	D	Nrc
			162141 Paten	D	Nrc
			162151 Software	D	Nrc
			162161 Lisensi	D	Nrc
			162171 Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc

4. Jurnal transfer masuk Aset Tetap dan ATB BLU melalui otomatisasi perekaman dan pelaporan barang milik negara secara aplikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			135111 Aset Tetap Renovasi	D	Nrc
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	Nrc
			162111 Goodwill	D	Nrc
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			162131 Royalti	D	Nrc
			162141 Paten	D	Nrc
			162151 Software	D	Nrc
			162161 Lisensi	D	Nrc
			162171 Hasil Kajian/Penelitian	D	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			313221 Transfer Masuk	K	LPE

5. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan Aset Tetap dan ATB BLU dari Hibah Bentuk Barang:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			13411X Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			162151 Software	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			162131 Royalti	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			162141 Paten	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO
			42424X Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa (Bab 3. G.7. atau Bab 12. G.2.)	K	LO

6. Jurnal perolehan dari pertukaran Aset Tetap

a. Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni

- 1) Apabila pertukaran Aset Tetap melibatkan kas yang diterima. Jurnal setoran ke kas negara atau yang dipersamakan sebagai berikut:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
219711 Utang Kepada KUN	D		313121 Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LRA, LAK	423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	K	LO
423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	K	LRA, LAK	423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	K	LO
423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	K	LRA, LAK	423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	K	LO

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			596311 Penyetoran PNEBP oleh BLU ke Kas Negara	D	LO, LAK
			313121 Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

3) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	NRC
			132111 Peralatan dan Mesin	D	NRC
			133111 Gedung dan Bangunan	D	NRC
			134111 Jalan dan Jembatan	D	NRC
			134112 Irigasi	D	NRC
			134113 Jaringan	D	NRC
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	NRC
			491411 Pendapatan Pelepasan Aset	K	LO

4) Jurnal untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang diterima dari pertukaran atas perhitungan akumulasi penyusutan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

b. Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNEBP

1) Apabila pertukaran BMN melibatkan kas yang diterima BLU. Jurnal pengesahan untuk mencatat uang kas yang diterima melalui dan sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D		111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
424941 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU	K	LRA, LAK	424941 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU	K	LO
424942 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU	K	LRA, LAK	424942 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU	K	LO

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU	K	LRA, LAK	424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU	K	LO		
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	K	LRA, LAK	424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	K	LO		
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO		
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU	K	LO		

2) Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
				111911	Kas dan Bank - BLU	D	Nrc		
				111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc		

3) Jurnal untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
				131111	Tanah	D	NRC		
				132111	Peralatan dan Mesin	D	NRC		
				133111	Gedung dan Bangunan	D	NRC		
				134111	Jalan dan Jembatan	D	NRC		
				134112	Irigasi	D	NRC		
				134113	Jaringan	D	NRC		
				135121	Aset Tetap Lainnya	D	NRC		
				491411	Pendapatan Pelepasan Aset	K	LO		

4) Jurnal untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang diterima dari pertukaran atas perhitungan akumulasi penyusutannya:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
				391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE		
				137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc		
				137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc		
				137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc		
				137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc		
				137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc		
				137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc		

7. Penghapusan Aset Tetap dan ATB BLU

a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap-BLU

1) Jurnal pertama untuk nilai aset tetap yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	Nrc
			131111 Tanah	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi		
			134113 Jaringan		
			135121 Aset Tetap Lainnya	K	Nrc

- 2) Jurnal kedua untuk nilai akumulasi aset tetap yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
			169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc

- b. Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud-BLU:

- 1) Jurnal pertama untuk nilai ATB yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			166213 Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	D	Nrc
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- 2) Jurnal kedua untuk nilai akumulasi ATB yang direklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	K	Nrc

c. Penjualan Aset Tetap/ATB

- 1) Jurnal pendapatan dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap		
219711	Utang Kepada KUN	D	-	313121	Diterima dari Entitas Lain	D	-
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	K	LRA, LAK	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	K	LO
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LRA, LAK	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	K	LO

- 2) Jurnal ikutan (korolari) dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap	
			596311	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	D	LO, LAK
			313121	Diterima dari Entitas Lain	K	LPE

- 3) Jurnal pengesahan pendapatan BLU dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA PNBP melalui SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap		
219721	Utang Kepada kas BLU	D	-	111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LRA, LAK	424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU	K	LO
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LRA, LAK	424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	K	LO
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LRA, LAK	424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	K	LO
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	K	LO
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LRA, LAK	424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	K	LO

- 4) Jurnal ikutan (korolari) dari penjualan Aset Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA PNBP:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap	
			111911	Kas dan Bank - BLU	D	
			111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc

5) Jurnal penghapusan Aset Tetap/ATB dan akumulasi penyusutan/amortisasinya atas transaksi penjualan Aset Tetap/ATB

i. Jurnal pertama untuk nilai aset tetap:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			131111 Tanah	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi	K	Nrc
			134113 Jaringan	K	Nrc
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

ii. Jurnal kedua untuk nilai akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	K	LO

8. Pertukaran/Hibah Keluar Aset Tetap/ATB

a. Jurnal pertama untuk nilai aset tetap/ATB atas pertukaran/hibah keluar:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			131111 Tanah	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi	K	Nrc
			134113 Jaringan	K	Nrc
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- b. Jurnal kedua untuk nilai akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB atas pertukaran/hibah keluar:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	K	LO

9. Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan ATB

- a. Jurnal Penyesuaian Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB karena adanya inventarisasi dan penilaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			162111 Goodwill	D	Nrc
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			162131 Royalti	D	Nrc
			162141 Paten	D	Nrc
			162151 Software	D	Nrc
			162161 Lisensi	D	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	D	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			391114 Revaluasi Aset Tetap dan ATB	K	LPE

- b. Jurnal penyesuaian ikutan Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB karena adanya inventarisasi dan penilaian terhadap akumulasi penyusutannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			391114 Revaluasi Aset Tetap dan ATB	D	LPE
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- c. Dalam hal koreksi kurang karena adanya inventarisasi dan penilaian, jurnal yang digunakan dengan diperlakukan secara terbalik sebagaimana jurnal koreksi tambah karena adanya inventarisasi dan penilaian
- d. Jurnal Penyesuaian Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB BLU karena adanya koreksi aset non revaluasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	K	LPE
			162111 Goodwill	D	Nrc
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			162131 Royalti	D	Nrc
			162141 Paten	D	Nrc
			162151 Software	D	Nrc
			162161 Lisensi	D	Nrc
			162171 Hasil Kajian/ Penelitian	D	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	K	LPE

- e. Jurnal Penyesuaian ikutan Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan ATB BLU karena adanya koreksi aset non revaluasi terhadap akumulasi/amortisasi penyusutannya:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	D	LPE
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	D	LPE
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- f. Dalam hal koreksi kurang karena adanya koreksi aset non revaluasi, jurnal yang digunakan dengan diperlakukan secara terbalik sebagaimana jurnal koreksi tambah karena adanya koreksi aset non revaluasi.

10. Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi ATB

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	LO
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	LO
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	LO
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			591312 Beban Penyusutan Irigasi	D	LO
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	K	Nrc

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			591313 Beban Penyusutan Jaringan	D	LO
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	K	Nrc
			591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	D	LO
			137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	K	Nrc
			592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain	D	LO
			169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	K	Nrc
			592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	D	LO
			169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc
			592111 Beban Amortisasi Goodwill	D	LO
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	K	Nrc
			592112 Beban Amortisasi Hak Cipta	D	LO
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	K	Nrc
			592113 Beban Amortisasi Royalti	D	LO
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	K	Nrc
			592114 Beban Amortisasi Paten	D	LO
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	K	Nrc
			592115 Beban Amortisasi Software	D	LO
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	K	Nrc
			592116 Beban Amortisasi Lisensi	D	LO
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	K	Nrc
			592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	LO
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- F. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:
1. Dokumen sumber Perolehan Aset Tetap BLU dan Aset Lainnya BLU, antara lain kuitansi, faktur, BAST, SPM, SP2D, SP3B/SP2B-BLU, surat perjanjian, SK Penghentian Penggunaan BMN.
 2. Dokumen sumber Penghapusan Aset Tetap BLU dan Aset Lainnya BLU, antara lain SK Penghapusan, BAST, surat perjanjian.
 3. Buku pembantu dan *summary* Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Aset Tak Berwujud transaksional.
 4. Memo penyesuaian.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU

A. Definisi Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi jangka pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil.

Investasi Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut:

1. investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau dapat segera dicairkan/dikonversi ke dalam bentuk uang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
2. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
3. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

B. Pengakuan Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek.

C. Pengukuran Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen investasi itu sendiri dan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, investasi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU tidak melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja. Hal ini karena dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka pendek berasal dari Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi dari Kas dan

Bank BLU yang sudah disahkan, dan Dana Kelolaan BLU yang berasal dari penerbitan SPM/SP2D;

2. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU; dan/atau dari akun selain Kas dan Bank BLU (111911) misalnya Dana Kelolaan BLU atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
3. Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode semesteran dan tahunan terhadap nilai Kas dan Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan analisis yang dapat disebabkan karena adanya:
 - a. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga dan akun Setara Kas BLU atas investasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BLU dan akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. Nilai tambah atas pencatatan Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.
4. BLU membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU untuk mencatat transaksional perolehan dan pelepasan investasi BLU.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Pendek BLU

1. Hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek BLU berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.
2. Dalam hal deposito ditarik sebelum jatuh tempo dan BLU harus menanggung biaya yang terkait (penalti, denda, dsb.), maka biaya tersebut akan diakui sebagai belanja/beban yang akan disahkan ke KPPN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian deposito misalnya biaya tersebut akan diperhitungkan secara neto atau dikurangkan dari hasil investasi yang diterima pada saat penarikan deposito.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU

Atas transaksi pelepasan (divestasi) Investasi BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelepasan (divestasi) investasi BLU terjadi pada saat investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh tempo dan/atau BLU melepas investasi tersebut sebelum masa jatuh tempo;
2. Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU dan tidak dilakukan proses pengesahan pendapatan ke KPPN;
3. Terhadap divestasi atas investasi BLU, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU menjadi akun Kas dan Bank BLU (111911), Dana Kelolaan BLU atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya, sesuai dengan sumber dana awal perolehan investasi jangka pendek.

F. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLU

Penyajian Investasi BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
2. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

G. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Investasi Jangka Pendek BLU

1. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLU antara lain:

113311 Deposito – BLU

113319 Investasi Lainnya – BLU

2. Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari investasi jangka pendek BLU antara lain:

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya

424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi – BLU

424919 Pendapatan Lain-lain BLU

H. Jurnal Transaksi Investasi Jangka Pendek BLU

1. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan Investasi Jangka Pendek BLU:

a. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			113311 Deposito – BLU	D	Nrc
			113319 Investasi Lainnya – BLU	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank BLU	K	Nrc

b. Reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			113311 Deposito – BLU	D	Nrc
			113319 Investasi Lainnya – BLU	D	Nrc
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	K	Nrc

c. Reklasifikasi dari Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			113311 Deposito – BLU	D	Nrc
			113319 Investasi Lainnya – BLU	D	Nrc
			166213 Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	K	Nrc

2. Jurnal pengesahan penerimaan hasil Investasi Jangka Pendek BLU berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang kepada Kas BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA, LAK	424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LRA, LAK	424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LO
424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi – BLU	K	LRA, LAK	424914 Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi – BLU	K	LO
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LRA, LAK	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

3. Jurnal korolari (ikutan) Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B – BLU pengesahan penerimaan hasil Investasi Jangka Pendek BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

4. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU:

a. Reklasifikasi untuk kembali ke Kas dan Bank BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			113311 Deposito - BLU	K	Nrc
			113319 Investasi Lainnya - BLU		Nrc

b. Reklasifikasi untuk kembali ke Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc
			113311 Deposito - BLU	K	Nrc
			113319 Investasi Lainnya - BLU		Nrc

c. Reklasifikasi untuk kembali ke Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			166213 Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	D	Nrc
			113311 Deposito - BLU	K	Nrc
			113319 Investasi Lainnya - BLU		Nrc

- I. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:
1. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU.
 2. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
 3. SP3B/SP2B-BLU atas pengesahan pendapatan dan biaya terkait investasi.
 4. BLU membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU.
 5. Memo penyesuaian.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU

A. Definisi dan Jenis Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.

Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLU adalah berasal dari pencatatan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan dan merupakan dana yang membentuk surplus operasional BLU.

Investasi Jangka Panjang BLU terdiri dari:

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen jangka panjang BLU diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BLU dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang BLU

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

- a. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.

b. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas transaksi perolehan investasi jangka panjang BLU secara kas yang berasal dari Kas dan Bank BLU (telah disahkan), BLU melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang BLU di Laporan Realisasi Anggaran, dan penambahan saldo nilai investasi jangka panjang BLU serta pengurangan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.
2. BLU membuat buku pembantu dan *summary* untuk masing-masing Investasi Jangka Panjang BLU untuk mencatat transaksional mutasi perolehan dan pelepasan investasi BLU, dan/atau kualitas investasi non-permanen yang dapat direalisasikan dalam hal investasi non permanen bentuk tagihan.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Panjang BLU

Hasil yang diperoleh dari investasi jangka panjang BLU berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU

Dalam hal terjadi transaksi pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU, perlakuan pencatatan transaksinya sebagai berikut:

1. Kas yang diterima oleh BLU dari pelepasan investasi BLU dilakukan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang BLU di Laporan Realisasi Anggaran, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang BLU serta penambahan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.

2. Kas yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU.

F. Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU

Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
2. Pengeluaran Kas dan Bank BLU dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam pengeluaran pembiayaan BLU di LRA.
3. Penerimaan Kas dan Bank BLU dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang BLU disajikan dalam penerimaan pembiayaan BLU di LRA.
4. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya;

G. Penugasan Pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara pada BLU

Dalam hal BLU mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara (BUN) yang dananya berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang Bagian Anggaran BUN, diperlakukan sebagai berikut:

1. Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi, misalnya penyaluran kegiatan dana bergulir dan/atau pembelian obligasi, tidak dilakukan pengesahan, baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.
2. Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
3. Dalam hal BLU melakukan pengeluaran kas dari sumber dana Bagian Anggaran BUN (Dana Kelolaan BLU) untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN, tidak

dilakukan pengesahan, baik belanja BLU maupun pengeluaran pembiayaan BLU.

4. Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU tersebut diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.
5. Pengembalian Dana Bergulir dari masyarakat atau divestasi atas perolehan obligasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya menjadi Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

Dalam hal BLU mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Negara (BUN) berupa Barang Milik Negara (BMN), diperlakukan sebagai berikut:

1. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN tidak dilakukan pengajuan pengesahan oleh BLU, baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.
2. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai penambahan ekuitas BLU di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

H. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Investasi Jangka Panjang BLU

1. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang nonpermanen BLU antara lain:

121311 Program Kemitraan (PK)

121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga

121331 Dana Bergulir Lainnya

121411 Investasi dalam Obligasi

121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen

121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen

121614 Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen

121615 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen

121619 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen

121621 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen

121622 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen

121629 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen

121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen

121632 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen

121639 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen

165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

2. Akun yang digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:

122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen

122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen

122213 Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen

122214 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen

122219 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen

122221 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen

122222 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen

122223 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen

122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen

122232 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen

122239 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen

122911 Investasi dalam Obligasi - Permanen

122912 Investasi pada Otorita

122919 Investasi Lain-lain

3. Akun yang digunakan untuk penyisihan investasi nonpermanen BLU dalam bentuk tagihan dalam rangka penyajian nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan antara lain:

123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih

123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih

123311 Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih

- 123311 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
- 123311 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
- 123321 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
- 123322 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
- 123329 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
- 123331 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
- 123332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih
- 123339 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
4. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan penerimaan pembiayaan atas pelepasan/divestasi investasi jangka panjang nonpermanen BLU antara lain:
- 711711 Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
- 711719 Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
- 711721 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan
- 711722 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan
- 711723 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi
- 711724 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 711729 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 711731 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita
- 711732 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu

- 711739 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen
BLU Pengelola Kawasan Lainnya
- 711741 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen
BLU Pengelola Dana Investasi
- 711742 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen
BLU Pengelola Dana Bergulir
- 711749 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen
BLU Pengelola Dana Lainnya

5. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan penerimaan pembiayaan atas pelepasan/divestasi investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:

- 711751 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pelayanan Kesehatan
- 711752 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pelayanan Pendidikan
- 711753 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Penunjang Konstruksi
- 711754 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 711759 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 711761 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Kawasan Otorita
- 711762 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
- 711769 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Kawasan Lainnya
- 711771 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Dana Investasi
- 711772 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Dana Bergulir
- 711779 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU
Pengelola Dana Lainnya

6. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan pengeluaran pembiayaan atas perolehan investasi jangka panjang nonpermanen BLU antara lain:

- 721611 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
- 721619 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
- 721711 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
- 721712 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
- 721713 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
- 721714 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen
- 721719 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
- 721721 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Otorita - Non Permanen
- 721722 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
- 721729 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Lainnya - Non Permanen
- 7. Akun yang digunakan untuk realisasi pengesahan pengeluaran pembiayaan atas perolehan investasi jangka panjang permanen BLU antara lain:
 - 721731 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
 - 721732 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
 - 721739 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
 - 721741 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
 - 721742 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
 - 721743 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen

- 721744 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
- 721749 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
- 721751 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Otorita - Permanen
- 721752 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
- 721759 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Lainnya - Permanen
- 721761 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
- 721762 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
- 721769 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen

8. Akun yang digunakan untuk mencatat beban atas penyisihan investasi jangka panjang nonpermanen BLU bentuk tagihan antara lain:

594822 Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

I. Jurnal Transaksi Investasi BLU

1. Jurnal pengesahan pengurangan Kas dan Bank BLU dalam rangka perolehan Investasi Jangka Panjang BLU melalui SP3B/SP2B-BLU:

a. Jurnal realisasi pengesahan pembiayaan DIPA PNPB dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B - BLU:

	Buku Besar Kas	D/K	Lap		Buku Besar Akrual	D/K	Lap
721711	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen	D	LRA, LAK	121611	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen	D	Nrc
721712	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen	D	LRA, LAK	121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen	D	Nrc
721713	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen	D	LRA, LAK	121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen	D	Nrc
721714	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen	D	LRA, LAK	121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen	D	Nrc

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
	D/K	Lap		D/K	Lap
721719	D	LRA, LAK	121619	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen			Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen		
721721	D	LRA, LAK	121621	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Otorita - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen		
721722	D	LRA, LAK	121622	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen		
721729	D	LRA, LAK	121629	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Lainnya - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen		
721731	D	LRA, LAK	121631	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen		
721732	D	LRA, LAK	121632	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen		
721739	D	LRA, LAK	121639	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen			Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen		
721741	D	LRA, LAK	122211	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen			Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen		
721742	D	LRA, LAK	122212	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen			Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen		
721743	D	LRA, LAK	122213	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen			Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen		
721744	D	LRA, LAK	122214	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen			Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen		
721749	D	LRA, LAK	122219	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Barang dan Jasa Lainnya - Permanen			Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen		
721751	D	LRA, LAK	122221	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Otorita - Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen		
721752	D	LRA, LAK	122222	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen		
721759	D	LRA, LAK	122223	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelolaan Kawasan Lainnya - Permanen			Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen		
721761	D	LRA, LAK	122231	D	Nrc
Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen			Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen		

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			
721762	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen	D	LRA, LAK		122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen	D	Nrc	
721769	Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen	D	LRA, LAK		122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen	D	Nrc	
115631	Piutang dari Kas BLU	K			111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc	

- b. Jurnal ikutan (korolari) pengesahan Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			
					111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc	
					111911	Kas dan Bank BLU	K	Nrc	

- c. Dalam hal perolehan investasi jangka panjang secara kas dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) BLU, jurnal transaksi SP3B/SP2B – BLU terhadap pengesahan penggunaan dana SAL pada BLU sebagai penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut (dilakukan secara bersamaan dengan pengesahan pengeluaran pembiayaan untuk investasi jangka panjang):

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			
311314	Penggunaan SAL BLU	D	LP SAL						
711791	Penerimaan Pembiayaan Lainnya - Penggunaan Dana SAL BLU	K	LRA, LAK						

2. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B – BLU:

- a. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B – BLU khusus BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			
219721	Utang kepada Kas BLU	D			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc	
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	K	LRA, LAK		424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	K	LO	
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LRA, LAK		424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	K	LO	
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	K	LRA, LAK		424133	Pendapatan Program Modal Ventura	K	LO	
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LRA, LAK		424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	K	LO	

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
	D/K	Lap			D/K	Lap	
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LRA, LAK	424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	K	LO
424136	Pendapatan Investasi	K	LRA, LAK	424136	Pendapatan Investasi	K	LO
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	K	LRA, LAK	424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	K	LO
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LRA, LAK	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	K	LRA, LAK	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	K	LO

b. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B – BLU selain BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
	D/K	Lap			D/K	Lap	
219721	Utang kepada Kas BLU	D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA, LAK	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LRA, LAK	424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Pengelolaannya	K	LO
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LRA, LAK	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

c. Jurnal Korolari Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B – BLU pengesahan penerimaan hasil investasi BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D/K	Lap		D/K	Lap	
			111911		Kas dan Bank BLU
			111914		Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan beban dan penyisihan atas Investasi Non Permanen BLU bentuk tagihan diragukan tertagih berdasarkan kualitas tagihan pada saat penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D/K	Lap		D/K	Lap	
			594822		Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
			123311		Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
			123311		Investasi Non Permanen BLU

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih		
			123311 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih		
			123311 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih		
			123311 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih		
			123321 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih		
			123322 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih		
			123329 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih		
			123331 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih		
			123332 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
			123339 Investasi Non Permanen BLU	K	Nrc
			Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih		

4. Jurnal pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi):

a. Jurnal pengesahan penambahan Kas dan Bank BLU dalam rangka pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi) melalui SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
219721 Utang kepada Kas BLU	D		111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
711721 Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan	K	LRA, LAK	121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen	K	Nrc

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar Akruaal		D/K	Lap
711722	Pelayanan Kesehatan Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan	K	LRA, LAK	121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen	K	Nrc
711723	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi	K	LRA, LAK	121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen	K	Nrc
711724	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	K	LRA, LAK	121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen	K	Nrc
711729	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	K	LRA, LAK	121619	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen	K	Nrc
711731	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita	K	LRA, LAK	121621	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen	K	Nrc
711732	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	K	LRA, LAK	121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen	K	Nrc
711739	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya	K	LRA, LAK	121629	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen	K	Nrc
711741	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi	K	LRA, LAK	121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	K	Nrc
711742	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir	K	LRA, LAK	121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen	K	Nrc
711749	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya	K	LRA, LAK	121639	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen	K	Nrc
711751	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pelayanan Kesehatan	K	LRA, LAK	122211	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen	K	Nrc
711752	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pelayanan Pendidikan	K	LRA, LAK	122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen	K	Nrc

Buku Besar Kas		D/K	Lap	Buku Besar AkruaI		D/K	Lap
711753	Pelayanan Pendidikan Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Penunjang Konstruksi	K	LRA, LAK	122213	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen	K	Nrc
711754	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	K	LRA, LAK	122214	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen	K	Nrc
711759	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	K	LRA, LAK	122219	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen	K	Nrc
711761	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita	K	LRA, LAK	122221	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen	K	Nrc
711762	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	K	LRA, LAK	122222	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen	K	Nrc
711769	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya	K	LRA, LAK	122223	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen	K	Nrc
711771	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Dana Investasi	K	LRA, LAK	122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	K	Nrc
711772	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir	K	LRA, LAK	122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen	K	Nrc
711779	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Investasi Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya	K	LRA, LAK	122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen	K	Nrc

- b. Jurnal Korolari (ikutan) Kas dan Bank BLU atas SP3B/SP2B – BLU pengesahan pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi) melalui SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	Nrc

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk investasi non permanen BLU bentuk tagihan diragukan tertagih atas divestasi investasi nonpermanen BLU bentuk tagihan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123311 Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123311 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123311 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123321 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123322 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123329 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123331 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D	Nrc
			123339 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih	D	Nrc
			594822 Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	K	LO

5. Jurnal penyesuaian untuk transaksi penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU dalam bentuk uang:

- a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan diterimanya kas oleh BLU dari Satker Bagian Anggaran BUN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc, LAK
			221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	K	Nrc

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan investasi BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc LAK
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc LAK
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc LAK
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc LAK
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc LAK
			121311 Program Kemitraan (PK)	D	Nrc, LAK
			121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	D	Nrc, LAK
			121331 Dana Bergulir Lainnya	D	Nrc, LAK
			121411 Investasi dalam Obligasi	D	Nrc, LAK
			121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D	Nrc, LAK
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	K	Nrc, LAK

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengembalian kas dari masyarakat atau divestasi dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc, LAK
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	K	Nrc, LAK
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	K	Nrc, LAK
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	K	Nrc, LAK
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	K	Nrc, LAK
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	K	Nrc, LAK
			121311 Program Kemitraan (PK)	K	Nrc, LAK
			121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	K	Nrc, LAK
			121331 Dana Bergulir Lainnya	K	Nrc, LAK
			121411 Investasi dalam Obligasi	K	Nrc, LAK
			121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	K	Nrc, LAK

6. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan diterimanya Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc
			121311 Program Kemitraan (PK)	D	Nrc
			121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	D	Nrc
			121331 Dana Bergulir Lainnya	D	Nrc
			121411 Investasi dalam Obligasi	D	Nrc
			121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D	Nrc
			313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	K	LPE

J. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU.
2. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
3. SP3B/SP2B-BLU atas pengesahan pendapatan dan biaya terkait investasi.
4. BLU membuat buku pembantu dan *summary* Investasi BLU.
5. Memo penyesuaian.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU

A. Definisi dan Jenis Aset Lainnya BLU

Aset Lainnya BLU dalam bab ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan perolehan Aset Lainnya BLU berupa kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, Aset Lain-lain BLU, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.

Aset Lainnya BLU adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset Lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiri dari 1) Aset kemitraan dengan pihak ketiga; 2) dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan; dan 3) Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Tak Berwujud dikelompokkan sebagai Aset Lainnya, namun pembahasannya diuraikan dalam Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan BLU atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan dalam rangka optimalisasi pendapatan BLU dari pemanfaatan properti BLU dalam kerangka kegiatan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dapat diwujudkan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Sewa Guna Usaha.

2. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

3. Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan, dan sampai dengan

periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

B. Pengakuan Aset Lainnya BLU

1. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU.

2. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

3. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

C. Pengukuran Aset Lainnya BLU

1. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat awal perolehan

diukur sebesar nilai wajar sesuai dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2. Pengukuran Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

3. Pengukuran Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLU dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

D. Perlakuan Aset Lainnya BLU setelah Tanggal Perolehan

1. Perlakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU setelah Tanggal Perolehan

Perlakuan aset berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU setelah tanggal awal perolehan sebagai berikut:

- a. Penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi terhadap aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU setelah tanggal awal perolehan menambah nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- b. Dana yang digunakan dalam rangka kapitalisasi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU yang berasal dari Dana Kelolaan BLU tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN karena telah dilakukan pencatatan realisasinya di KPPN oleh satker Bagian Anggaran BUN.
- c. Nilai awal perolehan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU berdasarkan nilai wajar dan penambahan nilai kapitalisasinya dilakukan pencatatan atas proses akumulasi dan beban penyusutan secara periodik semesteran dan tahunan, dikecualikan tanah dan BMN yang karakteristiknya tidak disusutkan atau diamortisasi.
- d. Pendapatan secara kas/tunai yang diterima BLU dari bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLU dilakukan proses

pengesahan pendapatan BLU ke KPPN yang diakui sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU. Dalam hal pengakuan akrual pendapatan bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLU, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU di LO, dan tidak dilakukan pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

2. Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah Tanggal Perolehan
Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah perolehan awal sebagai berikut:
 - a. Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo kas dana kelolaan BLU.
 - b. Dalam hal terdapat transaksi perguliran dana dan/atau kegiatan investasi sesuai dengan pelaksanaan tujuan dan fungsi pembentukan BLU, dilakukan mutasi kurang saldo dengan mereklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan menjadi Investasi Jangka Panjang. Selanjutnya dalam hal Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan dilakukan penilaian kualitas tagihan untuk menyajikan penyisihan dan beban penyisihan tagihan yang diragukan tidak tertagih sesuai dengan ketentuan.
 - c. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
 - d. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan/pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.
3. Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya setelah Tanggal Perolehan

Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya setelah perolehan awal sebagai berikut:

- a. Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.
- b. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
- c. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan/pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

E. Penyajian Aset Lainnya BLU

1. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Dalam hal aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa gedung dan bangunan serta BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi, penyajian nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disertai penyajian akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam rangka menyajikan nilai buku aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Sementara itu, penerimaan secara kas atas bagi hasil/kerjasama yang telah disahkan disajikan sebagai PNBK Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU.

2. Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan BLU. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal

hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

3. Penyajian Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Aset Lain-lain BLU. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

1. Akun yang digunakan untuk pengakuan aset antara lain:

115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi

115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen

122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi – Permanen

161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

166213 Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

2. Akun yang digunakan untuk penyisihan piutang dan investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan antara lain:

116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi

116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU

3. Akun yang digunakan untuk akumulasi penyusutan aset lainnya antara lain:
 - 169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
 - 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
 4. Akun yang digunakan untuk mencatat perubahan ekuitas antara lain:
 - 391116 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
 5. Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari transaksi aset lainnya antara lain:
 - 424311 Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan
 - 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
 - 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
 - 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
 - 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya
 - 424919 Pendapatan Lain-lain BLU
 6. Akun yang digunakan untuk mencatat beban dari transaksi aset lainnya antara lain:
 - 592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 592221 Beban Penyusutan Aset Lain-lain
 - 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
 - 594631 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
 - 594632 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
 - 594639 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
 - 594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- G. Jurnal Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan, dan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya
1. Jurnal Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- a. Perolehan Awal Kemitraan Pihak Ketiga BLU dari BMN yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan/BLU:

Jurnal untuk mencatat perolehan awal dengan mereklasifikasi dari BMN BLU yang dihentikan penggunaannya menjadi aset kemitraan BLU, mengeliminasi akumulasi penyusutan aset tetap BLU yang tidak digunakan, dan mengakui nilai wajar aset kerjasama sesuai perjanjian.

- 1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Tanah yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan/BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			161111* Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D	Nrc
			166112* Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc
			161111** Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D	Nrc
			391116** Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	K	LPE

Catatan:

* Reklasifikasi aset sesuai dengan nilai buku

** Mencatat selisih nilai buku lebih besar dari perjanjian kerja sama

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Aset Tetap dengan karakteristik disusutkan/diamortisasi yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan/BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			161111* Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D	Nrc
			166112* Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	Nrc
			169122* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	Nrc
			161111* Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	K	Nrc
			161111** Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BLU	D	Nrc
			391116** Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	K	LPE

Catatan:

* Reklasifikasi aset sesuai dengan nilai buku

** Mencatat selisih nilai buku lebih besar dari perjanjian kerja sama

b. Transaksi Setelah Perolehan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- 1) Jurnal Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga atas BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi (dapat dilakukan secara otomatis aplikasi atau secara manual):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	K	LO
			169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	K	Nrc

- 2) Jurnal pengembangan berupa pengeluaran kapitalisasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggunakan Dana Kelolaan BLU, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BLU	D	Nrc
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	K	Nrc

- 3) Jurnal pendapatan secara kas atas bagi hasil kerjasama Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dilakukan dengan pengesahan melalui SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D		111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424311 Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan	K	LRA, LAK	424311 Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan	K	LO
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	K	LRA, LAK	424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	K	LO
424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	K	LRA, LAK	424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	K	LO

- 4) Jurnal Korolari:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	LO

2. Jurnal Transaksi Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan:

- a. Jurnal perolehan atau diterimanya Dana Kelolaan BLU dari BA BUN, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar AkruaI	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	D	Nrc
			221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	K	Nrc

- b. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan perguliran dan/atau kegiatan investasi yang menjadi penugasan utama pembentukan BLU, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc LAK
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc LAK
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc LAK
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc LAK
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc LAK
			121311 Program Kemitraan (PK)	D	Nrc LAK
			121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	D	Nrc LAK
			121331 Dana Bergulir Lainnya	D	Nrc LAK
			121411 Investasi dalam Obligasi	D	Nrc LAK
			121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D	Nrc LAK
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	K	Nrc LAK

- c. Jurnal transaksi mutasi tambah karena adanya pelunasan cicilan pokok piutang perguliran dana yang menjadi penugasan utama pembentukan BLU, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	D	Nrc LAK
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc LAK
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc LAK
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc LAK
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc LAK
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc LAK
			115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	D	Nrc LAK
			115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	D	Nrc LAK
			115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	D	Nrc LAK
			121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	D	Nrc LAK
			122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen	D	Nrc LAK

- d. Jurnal pengembalian sebagian atau seluruhnya Dana Kelolaan BLU kepada BA BUN dilakukan melalui Memo Penyesuaian berdasarkan setoran penerimaan pembiayaan Satker BA BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	D	Nrc
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	K	Nrc

- e. Jurnal transaksi penerimaan secara kas berupa Pendapatan Bunga/Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan telah disahkan melalui SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D		111914 Kas dan Bank - BLU yang Belum Disahkan	D	Nrc
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA LAK	424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LRA LAK	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

- f. Jurnal Korolari:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	LO

- g. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Bunga/Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan secara akrual baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo, dan tidak disahkan ke KPPN karena tidak ada aliran kas:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	D	Nrc
			424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
			424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

- h. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	D	LO
			116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	K	Nrc

i. Jurnal transaksi pemanfaatan kas jangka pendek atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan:

1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk reklasifikasi:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			113311 Deposito - BLU	D	Nrc
			113319 Investasi Lainnya - BLU	D	Nrc
			165111 Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	K	Nrc

2) Pendapatan secara kas diterima dari bunga/bagi hasil pemanfaatan kas jangka pendek dan dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D		111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LRA LAK	424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	K	LO
424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LRA LAK	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO

3) Jurnal Korolari:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc

3. Jurnal Transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya - BLU:

a. Jurnal perolehan atau diterimanya atau pembentukan Dana yang Dibatasi Penggunaannya BLU dengan sumber dari Kas dan Bank - BLU yang telah disahkan, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

b. Pendapatan bunga berupa kas yang diterima atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya BLU yang disimpan di Lembaga Keuangan (Bank), dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B - BLU:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			D/K	Lap
219721	Utang Kepada kas BLU	D			111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc	
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya	K	LRA, LAK		424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya	K	LO	
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LRA, LAK		424919	Pendapatan Lain-lain BLU	K	LO	

Jurnal korolari:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			D/K	Lap
					111911	Kas dan Bank BLU	D	Nrc	
					111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc	

- c. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan sumber dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar AkruaI			D/K	Lap
					111911	Kas dan Bank BLU	D	Nrc	
					166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	K	Nrc	

H. Dokumen Akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Aset Kemitraan Pihak Ketiga, antara lain Surat Perjanjian Kerjasama, dokumen manajerial terkait BMN yang dikerjasamakan.
2. Dana Kelolaan BLU, antara lain bukti transfer/tanda terima dana kelolaan dari BUN ke BLU atau dari pihak ketiga berupa *trust fund* ke BLU, bukti transfer/tanda kirim penyaluran dana kelolaan dari BLU kepada pihak ketiga penerima dana bergulir, atau bukti investasi yang dilakukan BLU atas dana kelolaan yang diinvestasikan. Tanda terima atas pendapatan bunga/bagi hasil dana bergulir, atau tanda terima hasil (*return*) dana kelolaan yang diinvestasikan.
3. Aset yang Dibatasi Penggunaannya, antara lain surat keputusan pembentukan aset yang dibatasi penggunaannya.
4. SP3B/SP2B – BLU.
5. Memo penyesuaian.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU

A. Definisi dan Jenis Hibah BLU

Kebijakan akuntansi hibah BLU ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan pendapatan BLU berupa hibah BLU dalam bentuk uang dan barang, serta transaksi BLU sehubungan dengan pemberian hibah BLU bentuk barang sebagai salah satu bentuk transaksi pemindahtanganan BMN.

Hibah adalah:

1. transaksi penerimaan BLU dalam bentuk uang/barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk menyerahkan prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus; atau
2. transaksi pengeluaran BLU dalam bentuk barang kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk memperoleh penggantian atau menerima prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Jenis-jenis transaksi Hibah BLU yaitu:

1. Pendapatan Hibah BLU, terdiri dari:
 - a. Pendapatan hibah dalam bentuk uang merupakan pendapatan hibah BLU berbentuk uang yang berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa merupakan pendapatan hibah BLU dalam bentuk barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan.
2. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang merupakan transaksi pemindahtanganan BMN berupa persediaan, aset tetap, aset tetap lainnya, dan/atau aset tak berwujud yang diserahkan kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan

negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

B. Pengakuan Hibah BLU

1. Pengakuan pendapatan hibah BLU
 - a. Pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang diakui sesuai berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

C. Pengukuran Hibah BLU

1. Pengukuran Pendapatan Hibah BLU dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah BLU bentuk uang diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen pengesahan pendapatan hibah sebagaimana tertera dalam SP3B/SP2B-BLU.
 - b. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang diukur sebesar nilai pengeluaran hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan. Administrasi tata cara pemberian hibah barang BLU dilakukan dengan mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan/pengeluaran hibah BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan/pengeluaran hibah transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

1. Dokumen sumber transaksional hibah BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan hibah BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam

ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

3. Jurnal khusus transaksional atas pendapatan/pengeluaran hibah BLU.
4. Penggunaan buku pembantu pendapatan/pengeluaran hibah BLU dapat digunakan, terutama apabila transaksi pendapatan/pengeluaran hibah relatif sering terjadi dan/atau memiliki nilai yang material.
5. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan/pengeluaran hibah BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan/pengeluaran hibah BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan Hibah BLU Bentuk Uang

1. BLU melakukan pengesahan atas pendapatan hibah bentuk uang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nilai pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) sebesar nilai uang yang diterima oleh BLU.
 - b. dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan hibah BLU bentuk uang, pengesahan pendapatan hibah BLU juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan hibah BLU.
 - c. dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan hibah BLU maupun pengembalian pendapatan hibah BLU bentuk uang secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
 - d. mekanisme pengajuan SP3B/SP2B – BLU pendapatan hibah BLU bentuk uang mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.
2. Pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B/SP2B – BLU karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU melakukan pencatatan pengakuan jurnal penyesuaian pendapatan hibah, BMN dan/atau beban jasa yang diterima.
3. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang tidak dilakukan pengesahan belanja melalui pengesahan SP3B/SP2B – BLU. BLU melakukan

pencatatan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

E. Penyajian Pendapatan BLU

Penyajian pendapatan/pengeluaran hibah BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Nilai pendapatan hibah bentuk uang yang telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU.
2. Nilai Pendapatan hibah bentuk barang/jasa sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
 - a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU, dan apabila bentuk hibahnya berupa jasa, menyajikan juga beban jasa dalam pos Beban Operasional.
 - b. di Neraca sebagai Persediaan dan/atau Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya/ATB untuk menyajikan masing-masing persediaan dan/atau BMN yang diperoleh dari hibah BLU.
3. Nilai pengeluaran hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan, disajikan di Neraca dalam bentuk pengurangan nilai BMN-nya dan di LO sebagai Kerugian Pelepasan Aset BLU pada pos Beban Non Operasional.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Hibah BLU

1. Akun untuk pendapatan hibah BLU bentuk uang antara lain:
 - 42421 Pendapatan Hibah Terikat – Uang
 - 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan – Uang
 - 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha – Uang
 - 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda – Uang
 - 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan – Uang
 - 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha – Uang

- 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara – Uang
 - 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya – Uang
 - 42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Uang
 - 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan – Uang
 - 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda – Uang
 - 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan – Uang
 - 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 - 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara – Uang
 - 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya – Uang
2. Akun untuk Pendapatan hibah bentuk barang/jasa antara lain:
- 42423 Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
 - 424231 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
 - 424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
 - 424233 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
 - 424234 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
 - 424235 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
 - 424236 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
 - 424239 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Barang / Jasa
 - 42424 Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa
 - 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
 - 424242 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
 - 424243 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
 - 424244 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
 - 424245 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa

424246 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang /
Jasa

424249 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa

3. Pengeluaran hibah bentuk barang antara lain:

596111 Kerugian Pelepasan Aset

G. Jurnal Transaksi Pendapatan BLU

1. Jurnal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang secara kas diterima oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang yang diterima secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal periodik pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang sesuai dengan SP3B/SP2B – BLU:

a. Jurnal pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk uang yang disahkan berdasarkan dan sesuai SP3B/SP2B – BLU:

Buku Besar Kas				D/K	Lap	Buku Besar Akrual				D/K	Lap
219721	Utang kepada Kas BLU			D		111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan			D	Nrc
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang			K	LRA, LAK	424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang			K	LO
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang			K	LRA, LAK	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang			K	LO
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang			K	LRA, LAK	424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang			K	LO
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang			K	LRA, LAK	424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang			K	LO
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang			K	LRA, LAK	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang			K	LO
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang			K	LRA, LAK	424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang			K	LO
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang			K	LRA, LAK	424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang			K	LO

Buku Besar Kas			D/K	Lap	Buku Besar Akrual			D/K	Lap
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	K	LRA, LAK	424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	K	LO		
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	K	LRA, LAK	424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	K	LO		
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	K	LRA, LAK	424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	K	LO		
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang	K	LRA, LAK	424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang	K	LO		
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	K	LRA, LAK	424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	K	LO		
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang	K	LRA, LAK	424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang	K	LO		
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya - Uang	K	LRA, LAK	424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya - Uang	K	LO		

b. Jurnal ikutan (korolari):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank BLU	D	NRC, LAK
			111914 Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	K	LO, LAK

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk transaksional/periodik pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			131111 Tanah	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			132111 Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			133111 Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			42423X Pendaptan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			134111 Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			134112 Irigasi	D	Nrc
			134113 Jaringan	D	Nrc
			42423X Pendaptan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			135121 Aset Tetap Lainnya	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			162151 Software	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			162121 Hak Cipta	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			162131 Royalti	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			162141 Paten	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			42423X Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa (Daftar Akun sebagaimana G.2 di atas)	K	LO

4. Jurnal pemindahtanganan BMN sesuai dengan berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan:
- a. Jurnal pertama (dari perekaman dan pelaporan secara otomatis dari aplikasi):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	D	LO
			131111 Tanah	K	Nrc
			132111 Peralatan dan Mesin	K	Nrc
			133111 Gedung dan Bangunan	K	Nrc
			134111 Jalan dan Jembatan	K	Nrc
			134112 Irigasi	K	Nrc
			134113 Jaringan	K	Nrc
			162111 Goodwill	K	Nrc
			162121 Hak Cipta	K	Nrc
			162131 Royalti	K	Nrc
			162141 Paten	K	Nrc
			162151 Software	K	Nrc
			162161 Lisensi	K	Nrc
			162171 Hasil Kajian/Penelitian	K	Nrc
			162191 Aset Tak Berwujud Lainnya	K	Nrc

- b. Jurnal kedua (dari perekaman dan pelaporan secara otomatis dari aplikasi):

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akruai	D/K	Lap
			137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	D	Nrc
			137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	D	Nrc
			137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	D	Nrc
			137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi	D	Nrc
			137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan	D	Nrc
			169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	D	Nrc
			169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	D	Nrc
			169313 Akumulasi Amortisasi Royalti	D	Nrc
			169314 Akumulasi Amortisasi Paten	D	Nrc
			169315 Akumulasi Amortisasi Software	D	Nrc
			169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi	D	Nrc
			169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	D	Nrc
			596111 Kerugian Pelepasan Aset	K	LO

H. Dokumen Akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Dokumen sumber pendapatan hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, SP3B/SP2B-BLU, bukti penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
2. Dokumen sumber pengeluaran hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, bukti pengeluaran hibah atau yang dipersamakan.
3. Memo penyesuaian.

BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU

A. Definisi dan Jenis Kewajiban BLU

Kewajiban BLU merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Kewajiban BLU antara lain dapat berupa:

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU adalah pinjaman jangka pendek BLU (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/atau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Utang kepada Pihak Ketiga BLU adalah utang BLU yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana DIPA PNBPN, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLU. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLU, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/atau belanja modal yang bersumber dari alokasi DIPA Rupiah Murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka BLU adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening BLU, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya BLU adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU adalah pinjaman jangka panjang BLU (jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian, dan/atau dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi atau penugasan BUN kepada BLU.

B. Pengakuan Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Pihak Ketiga BLU

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau
- b. diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

C. Pengukuran Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BLU sesuai dokumen perjanjian pembiayaan yang disepakati dan/atau sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Utang Pihak Ketiga BLU diukur sebesar:

- a. nilai tagihan yang belum dibayarkan BLU kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau
- b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA-RM, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU, dan/atau sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BLU kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BLU berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diukur sebesar pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, dan/atau penerimaan dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian atas nilai saldo utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai dengan umur utang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan kewajiban BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi utang transaksional yang meliputi kebijakan internal antara lain:

- a. Penggunaan dokumen sumber transaksional utang sesuai dengan jenis utang dan karakteristik bisnis BLU dalam melakukan perikatan utang.
- b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan kewajiban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.

- c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan, penyelesaian dan penghapusan kewajiban.
- d. Penggunaan buku pembantu utang BLU.
- e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) kewajiban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun kewajiban BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Nilai Kewajiban BLU secara Periodik

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai utang BLU dilakukan penyesuaian untuk menentukan:

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLU, utang pihak ketiga BLU, utang pajak bendahara pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/atau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.
2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh di muka oleh BLU dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BLU mengidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

E. Penyajian Kewajiban BLU

Penyajian Kewajiban BLU di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban BLU yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
 - a. Utang Usaha
 - b. Utang Pihak Ketiga
 - c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
 - d. Belanja yang Masih Harus Dibayar
 - e. Pendapatan Diterima di Muka
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban BLU yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka Panjang BLU (221121 – Utang

Perbankan Jangka Panjang BLU, 221929 – Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU), dan 221511 – Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN.

F. Segmen Akun yang Digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Transaksi Kewajiban BLU

a. Akun untuk pengakuan kewajiban BLU dan penghapusan kewajiban BLU antara lain:

212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

212119 Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar

212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU

212122 Utang Usaha BLU

212193 Dana Pihak Ketiga BLU

219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka

219212 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka

219214 Pendapatan Diterima di Muka BLU

219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU

221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU

221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

b. Akun untuk pengesahan pembiayaan utang jangka panjang BLU antara lain:

711711 Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU

711719 Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU

721611 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU

721619 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU

G. Jurnal Transaksi Kewajiban BLU

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian berupa penerimaan kas untuk utang usaha BLU dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

- 1) Jurnal penyesuaian pengakuan Utang Usaha BLU atas Transaksi Penerimaan Pinjaman Uang Jangka Pendek, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111826 Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			111912 Dana yang akan dijaminkan - BLU	D	Nrc
			111913 Dana yang akan dipadankan - BLU	D	Nrc
			212122 Utang Usaha	K	Nrc

- 2) Jurnal penyesuaian pengakuan Utang Usaha BLU atas Reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman Uang Jangka Panjang dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D	Nrc
			221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	Nrc
			212122 Utang Usaha	K	Nrc

Catatan: pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk utang kepada Pihak Ketiga BLU dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

- 1) Jurnal transaksional dan/atau periodik pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Utang secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBPN, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			525111 Beban Gaji dan Tunjangan	D	LO
			525112 Beban Barang	D	LO
			525113 Beban Jasa	D	LO
			525114 Beban Pemeliharaan	D	LO
			525115 Beban Perjalanan	D	LO
			525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	D	LO
			525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	D	LO
			525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	D	LO
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			131211 Tanah Belum Diregister	D	Nrc
			132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
			133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
			134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
			134212 Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
			134213 Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

Catatan: Pada saat penyelesaian/pelunasan Utang Pihak Ketiga BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBPN dan telah dilakukan pengesahan SP3B/SP2B-BLU, dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik/koreksi pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas perolehan Barang/Jasa secara Non Tunai alokasi dana DIPA PNBPN.

- 2) Jurnal transaksional dan/atau periodik pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas diterimanya Dana Titipan Pihak Ketiga, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			111826 Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			212193 Dana Pihak Ketiga BLU	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyetoran/penyerahan/penyelesaian Dana Pihak Ketiga BLU.

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			111826 Kas Lainnya di BLU	D	Nrc
			219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran yang terutang ke Kas Negara.

- d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja yang Masih Harus Dibayar atas beban alokasi dana DIPA rupiah murni dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

- 1) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			51111x Beban Gaji PNS	D	LO
			51112x Beban Tunjangan-tunjangan I PNS	D	LO
			51113x Beban Tunjangan-tunjangan II PNS	D	LO
			51114x Beban Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/ Staff di Luar Negeri	D	LO
			51115x Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS	D	LO
			51131x Beban Gaji Pejabat Negara	D	LO
			51132x Beban Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara	D	LO
			51133x Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara	D	LO
			51141x Beban Gaji Dokter PTT	D	LO
			51151x Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	D	LO
			511519 Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	D	LO
			51152x Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS	D	LO
			51211x Beban Honorarium	D	LO
			51221x Beban Lembur	D	LO
			51241x Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	D	LO
			51321x Beban Askes PNS/Pejabat Negara	D	LO
			51327x Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai	D	LO
			212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Pegawai.

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			117911 Persediaan yang Belum Diregister	D	Nrc
			52111x Beban Barang Operasional	D	LO
			521211 Beban Bahan	D	LO
			521213 Beban Honor Output Kegiatan	D	LO
			521216 Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	D	LO

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			521217 Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara	D	LO
			521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	D	LO
			521711 Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	D	LO
			52211x Beban Langganan Daya dan Jasa	D	LO
			52212x Beban Jasa Pos dan Giro	D	LO
			52213x Beban Jasa Konsultan	D	LO
			52214x Beban Sewa	D	LO
			52215x Beban Jasa Profesi	D	LO
			52219x Beban Jasa Lainnya	D	LO
			52311x Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	D	LO
			52312x Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	D	LO
			52313x Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LO
			52319x Beban Pemeliharaan Lainnya	D	LO
			52411x Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	D	LO
			52421x Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	D	LO
			212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Barang.

- 3) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			131211 Tanah Belum Diregister	D	Nrc
			132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	D	Nrc
			133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	D	Nrc
			134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	D	Nrc
			134212 Irigasi Belum Diregister	D	Nrc
			134213 Jaringan Belum Diregister	D	Nrc
			139111 Aset Tetap yang Belum Diregister (Aset Tetap Lainnya)	D	Nrc
			166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister	D	Nrc
			212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	K	Nrc

Catatan: Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyelesaian Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Modal

- e. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Diterima di Muka dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	D	LO
			423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	D	LO
			423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	LO
			219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka	K	Nrc
			423xxx Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D	LO
			219212 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka	K	Nrc

- f. Jurnal pengesahan pembiayaan untuk pengakuan Utang Jangka Panjang BLU berdasarkan SP3B/SP2B BLU:

- 1) Jurnal pengakuan Utang Jangka Panjang BLU sesuai dengan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU penerimaan pembiayaan BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
219721 Utang Kepada kas BLU	D		111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
711711 Penerimaan Pembiayaan Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	K	LRA, LAK	221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	K	Nrc
711719 Penerimaan Pembiayaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	K	LRA, LAK	221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	K	Nrc

- 2) Jurnal korolari (ikutan) pengakuan Utang Jangka Panjang BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU penerimaan pembiayaan BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111911 Kas dan Bank - BLU	D	Nrc
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc

- 3) Jurnal penyelesaian/pelunasan Utang Jangka Panjang BLU secara kas dengan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU pengeluaran pembiayaan BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
721611 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Perbankan Jangka Panjang-BLU	D	LRA, LAK	221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D	Nrc
721619 Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	LRA, LAK	221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	Nrc
115631 Piutang dari Kas BLU	K		111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	K	Nrc

- 4) Jurnal korolari (ikutan) penyelesaian/pelunasan Utang Jangka Panjang BLU secara kas sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU pengeluaran pembiayaan BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	D	Nrc
			111911 Kas dan Bank - BLU	K	Nrc

- 5) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk reklasifikasi bagian lancar Utang Jangka Panjang:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU	D	Nrc
			221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	D	Nrc
			212122 Utang Usaha	K	Nrc

- g. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Utang Jangka Panjang yang bersumber dari dana Bagian Anggaran BUN sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN dalam rangka investasi BUN atau penugasan BUN ke BLU:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrual	D/K	Lap
			165111 Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	D	Nrc, LAK
			221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	K	Nrc, LAK

- h. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk transaksi pengurangan nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN atas penyeteran dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan ke

rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dalam rangka divestasi BUN atau berakhirnya penugasan BUN kepada BLU dengan menggunakan Satker BA BUN:

Buku Besar Kas	D/K	Lap	Buku Besar Akrua	D/K	Lap
			221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	D	Nrc, LAK
			165111 Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	K	Nrc, LAK

H. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:

1. Resume tagihan atau dokumen yang dipersamakan yang telah divalidasi dan diverifikasi dan/atau belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan.
2. Buku pembantu dan *summary* utang BLU transaksional.
3. Buku pembantu dan *summary* utang (DIPA RM) transaksional.
4. Memo penyesuaian.

BAB XIV

KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. Penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Karakteristik BLU sebagai Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan selaku pelaksana anggaran belanja dalam kerangka APBN yang menyelenggarakan akuntansi, memberikan implikasi bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan BLU dikonsolidasikan (digabungkan) ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya.

Penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi yaitu dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLU berupa LRA-BLU, Neraca-BLU, LO-BLU, dan LPE-BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan LAK-BLU dan LPSAL-BLU tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam kegiatan penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat eliminasi terhadap akun-akun transaksi BLU antara lain:

1. Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO (akun 424411)

Transaksi Pendapatan dari Alokasi APBN merupakan akun ikutan (korolari) atas transaksi realisasi belanja BLU yang dananya bersumber dari DIPA rupiah murni.

2. Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO (akun 596311)

Transaksi Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara merupakan akun ikutan atas penyetoran PNBP lainnya (sumber dana rupiah murni) ke kas Negara.

3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (akun 424421)

Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dalam satu kementerian Negara/lembaga, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian negara/lembaga dieliminasi dan tidak digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian kementerian Negara/lembaga karena transaksi yang digabungkan adalah transaksi atas realisasi belanja berdasarkan SPM/SP2D pada satuan kerja entitas pemerintah pusat.

4. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (akun 424422)

Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dengan melibatkan entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahi BLU, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga tidak dieliminasi dan tetap disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian kementerian negara/lembaga. Eliminasi transaksi dimaksud akan dilakukan oleh entitas laporan keuangan pemerintah pusat.

5. Penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih sehubungan dengan pengakuan piutang BLU atas pendapatan yang bersumber dari entitas pemerintah pusat (akun 116641 dan akun 594651) dieliminasi dan tidak digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian kementerian negara/lembaga. Di sisi lain, belanja yang masih harus dibayar yang diakui dan dicatat oleh satuan kerja entitas pemerintah pusat juga tidak dilakukan penggabungan dalam laporan keuangan konsolidasian kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, BLU dapat menyediakan jurnal dan laporan hasil eliminasi, serta komponen laporan keuangan yang dibutuhkan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Akun-akun yang Digunakan dalam Eliminasi Laporan Keuangan Konsolidasian

Akun-akun yang digunakan dalam eliminasi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga antara lain:

115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

313111 Ditagihkan ke Entitas Lain

313121 Diterima dari Entitas Lain

424411 Pendapatan Alokasi APBN

42442 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari entitas Pemerintah Pusat

424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu kementerian negara/lembaga

424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari entitas Pemerintah Pusat di luar kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU

594651 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

596311 Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara

C. Jurnal Eliminasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahi BLU, dilakukan eliminasi akun-akun yang dicatat dengan melibatkan jurnal untuk buku besar akrual sebagai berikut:

1. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas Pendapatan Alokasi APBN yang timbul karena BLU melakukan realisasi belanja dengan menggunakan alokasi DIPA RM:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
424411	Pendapatan Alokasi APBN	D	LO
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	K	LPE

2. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara yang timbul karena BLU menerima pendapatan (DIPA Rupiah Murni) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
313121	Diterima dari Entitas Lain	D	LPE
596311	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	K	LO

3. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan layanan dari belanja entitas pemerintah pusat dalam satu Kementerian Negara/Lembaga yang telah disahkan berdasarkan SP3B/SP2B – BLU:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	D	LO
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	K	LO
525112	Beban Barang	K	LO
525113	Beban Jasa	K	LO
525114	Beban Pemeliharaan	K	LO
525115	Beban Perjalanan	K	LO
525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	K	LO
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	K	LO
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	K	LO
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	K	LO
593132	Beban Persediaan Barang dalam Proses	K	LO
593149	Beban Persediaan Lainnya	K	LO

4. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan layanan dari belanja entitas pemerintah pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU yang telah disahkan berdasarkan SP3B/SP2B – BLU:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang Membawahi BLU	D	LO
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	K	LO
525112	Beban Barang	K	LO
525113	Beban Jasa	K	LO
525114	Beban Pemeliharaan	K	LO
525115	Beban Perjalanan	K	LO
525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund	K	LO
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	K	LO
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	K	LO
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	K	LO
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	K	LO
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	K	LO

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
593132	Beban Persediaan Barang dalam Proses	K	LO
593149	Beban Persediaan Lainnya	K	LO

5. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual pengakuan piutang atas tagihan pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat

a. Jurnal eliminasi pokok piutang BLU:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	D	LO
115741	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	K	Nrc

b. Jurnal eliminasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih:

Akun	Uraian Akun	D/K	Lap
116641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	D	Nrc
594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	K	LO

D. Kertas Kerja Konsolidasi

BLU dapat menyusun kertas kerja eliminasi dan laporan keuangan konsolidasian untuk disampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya. Kertas Kerja Konsolidasi disusun untuk mengkonsolidasikan LRA-BLU, LO-BLU, LPE-BLU, dan Neraca-BLU pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan LPSAL-BLU dan LAK-BLU tidak dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh pos pada LRA BLU dikonsolidasikan pada LRA tingkat K/L tanpa eliminasi.

1. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI					
a. Penerimaan Perpajakan (Khusus BA.015)	XX	-			XX
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	XX	YY ^{a)}			XXYY ^{b)}
Pendapatan Sumber Daya Alam		-			
Pendapatan PNPB Lainnya		YY			
Pendapatan Badan Layanan Umum:					
Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	YY			
Pendapatan Hibah terikat - uang	-	YY			
Pendapatan Hibah tidak terikat - uang	-	YY			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	YY			
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu K/L	-	YY			
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar K/L yang membawahi BLU	-	YY			
Pendapatan BLU Lainnya	-	YY			
2. HIBAH	-	-			-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	XX	YY			XXYY ^{c)}
Belanja Barang	XX	YY ^{d)}			XXYY ^{e)}
Belanja Barang		YY			
Belanja Jasa		YY			
Belanja Pemeliharaan		YY			
Belanja Perjalanan Dinas		YY			
Belanja Badan Layanan Umum					
Belanja Barang BLU:					
Belanja Gaji dan Tunjangan	-	YY			
Belanja Barang	-	YY			
Belanja Jasa	-	YY			
Belanja Pemeliharaan	-	YY			
Belanja Perjalanan	-	YY			
Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	-	YY			
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	-	YY			
Belanja Ketersediaan Layanan BLU		YY			
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	YY			
Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU		YY			
Jumlah Belanja Barang	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Belanja Modal	XX	YY ^{f)}			XXYY ^{g)}
Belanja Modal Tanah		YY			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		YY			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		YY			
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		YY			
Belanja Modal Lainnya		YY			
Belanja Modal Badan Layanan Umum					
Belanja Modal Tanah – BLU	-	YY			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU	-	YY			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	-	YY			
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan – BLU	-	YY			
Belanja Modal Lainnya – BLU	-	YYR			

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
Jumlah Belanja Modal	XXXX	YYYY			XXXXXXXX
JUMLAH BELANJA (B)	XXXXXXXX	YYYYYYYY			XXXXXXXX
SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)		YY			YY
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	-				
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	YY			YY
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)	-	YY			YY
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	YY			YY
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)	-	YY			YY
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)	-	YY			YY
SILPA/(SIKPA) (E=C+D)	-	YY			YY

Keterangan:

- a) Seluruh pendapatan Badan Layanan Umum, baik pendapatan PNBP Rupiah Murni (423xxx) maupun pendapatan operasional jasa layanan BLU (424xxx), merupakan Pendapatan PNBP;
- b) Pos Pendapatan PNBP merupakan pos yang digunakan untuk menampung penggabungan seluruh pendapatan PNBP, baik yang berasal dari satker non-BLU (423xxx) maupun dari satker BLU (423xxx dan 424xxx);
- c) Pos Belanja Pegawai merupakan pos yang digunakan untuk menampung penggabungan seluruh belanja pegawai (51xxxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA Rupiah Murni, baik dari satker non-BLU maupun satker BLU;
- d) Seluruh belanja barang Badan Layanan Umum, baik belanja barang alokasi DIPA Rupiah Murni (52xxxx selain 525xxx) maupun belanja barang alokasi DIPA PNBP (525xxx), akan dikonsolidasikan ke dalam Belanja Barang;
- e) Pos Belanja Barang merupakan pos yang digunakan untuk menampung:
 - i. seluruh belanja barang (521xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA Rupiah Murni, baik dari satker non-BLU maupun satker BLU; dan
 - ii. seluruh belanja Barang BLU yang bersumber dari alokasi dana DIPA PNBP (525xxx) satker BLU
- f) Seluruh belanja modal Badan Layanan Umum, baik belanja modal alokasi DIPA Rupiah Murni (53xxxx selain 537xxx) maupun belanja modal alokasi DIPA PNBP (537xxx), akan dikonsolidasikan ke dalam Belanja Modal;
- g) Pos Belanja Modal merupakan pos yang digunakan untuk menampung:
 - i. seluruh belanja modal (53xxx kecuali 537xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA Rupiah Murni, baik dari satker non-BLU maupun satker BLU; dan
 - ii. belanja modal BLU (537xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA PNBP satker BLU.

2. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Laporan Operasional (LO)

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Perpajakan (Khusus BA. 015)	XX	-			XX
Jumlah Pendapatan Perpajakan	XX	-			XX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	XX	-			XX
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XX	YY			XXYY ^{e)}
Pendapatan dari Alokasi APBN	-	YY	YY ^{a)}		-
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	-	YY			-
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	YY	YY ^{b)}		-
Pendapatan Hibah BLU	-	YY			-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	YY			-
Pendapatan BLU Lainnya	-	YY			-
Jumlah Pendapatan (A)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
BEBAN					
Beban Pegawai	XX	YY			XXYY ^{d)}
Beban Persediaan	XX	YY			XXYY ^{e)}
Beban Barang dan Jasa	XX	YY			XXYY ^{f)}
Beban Pemeliharaan	XX	YY			XXYY ^{g)}
Beban Perjalanan Dinas	XX	YY			XXYY ^{h)}
Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	XX	YY			XXYY ⁱ⁾
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XX	YY			XXYY ^{j)}
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	XX	YY			XXYY ^{k)}
Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	-	YY		YY ^{l)}	-
Jumlah Beban (B)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XX	YY			XXYY
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar	XX	YY			XXYY
Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Penyelesaian Utang jk Panjang	XX	YY			XXYY
Beban Penyelesaian Utang jk Panjang	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX	YY			XXYY
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya					
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	XX	YY			XXYY
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Pendapatan Luar Biasa	XX	YY			XXYY
Beban Luar Biasa	XX	YY			XXYY
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY

Keterangan:

- a) Eliminasi atas transaksi pendapatan dari alokasi APBN yang timbul dari realisasi belanja alokasi DIPA rupiah murni;
- b) Eliminasi atas transaksi pendapatan-beban antar-entitas pemerintah pusat;
- c) Pos Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LKKL merupakan pos untuk menampung:
 - i. Pos PNBP Lainnya (423xxx), baik dari LO satker non-BLU maupun dari LO satker BLU; dan
 - ii. *Mapping* dari pos Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Hibah BLU, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya dari LO satker BLU.
- d) Pos Beban Pegawai digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban pegawai dari alokasi dana DIPA Rupiah Murni (51xxxx) dan dari alokasi dana DIPA PNBP (525111);
- e) Pos Beban Persediaan digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena adanya penggunaan/pemakaian persediaan (kecuali persediaan berupa BMN yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat);
- f) Pos Beban Barang dan Jasa digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban barang dan jasa (kecuali barang persediaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan pegawai BLU yang bersumber dari alokasi DIPA PNBP);
- g) Pos Beban Pemeliharaan digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban pemeliharaan, baik dari alokasi dana Rupiah Murni (523xxx) maupun dari alokasi dana PNBP (525xxx);
- h) Pos Beban Perjalanan Dinas digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban perjalanan dinas, baik dari alokasi dana Rupiah Murni (524xxx) maupun dari alokasi dana PNBP (525xxx);

- i) Pos Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena adanya penggunaan/pemakaian persediaan berupa BMN yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat;
- j) Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu;
- k) Pos Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan;
- l) Jurnal eliminasi transaksi penyetoran pendapatan (423xxx) oleh BLU ke rekening Kas Negara.

3. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Laporan Perubahan Ekuitas

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
(A) Ekuitas Awal	XX	YY			XXYY
(B) Surplus / (Defisit) - LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/kesalahan Mendasar	XX	YY			XXYY
(C) Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	XX	YY			XXYY
Penyesuaian Nilai Aset	XX	YY			XXYY
Koreksi Nilai Persediaan	XX	YY			XXYY
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XX	YY			XXYY
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-Lain	XX	YY			XXYY
(D) Transaksi Antar Entitas	XX	YY	YY ^{a)}	YY ^{b)}	XXYY
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	XX	YY			XXYY
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	XX	YY			XXYY

Keterangan:

- a) Eliminasi atas akun Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara. Eliminasi ini akan mengurangi ekuitas (dilakukan dengan mendebet akun Transaksi Antar Entitas);
- b) Eliminasi atas akun Pendapatan Alokasi APBN atas realisasi belanja alokasi DIPA rupiah murni. Eliminasi ini akan menambah ekuitas (dilakukan dengan mengkredit akun Transaksi Antar Entitas).

4. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Neraca

Keterangan	LK seluruh satker non-BLU	LK satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	XX	YY			XXYY
Kas pada BLU	-	YY			YY
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XX	-			XX
Kas Lainnya di BLU	-	YY			YY
Investasi Jangka Pendek-BLU	-	YY			YY
Piutang Bukan Pajak	XX	-			XX
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	YY		Y a)	Y
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	YY			YY
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)	(YY)	Y b)		XXY
Belanja Dibayar Di Muka	XX	YY			XXYY
Uang Muka Belanja	XX	YY			XXYY
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	XX	YY			XXYY
Persediaan	XX	-			XX
Jumlah Aset Lancar (A)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Investasi Jangka Panjang					
Pinjaman Jangka Panjang	-	YY			YY
Investasi Non Permanen Lainnya	-	YY			YY
Investasi dalam Penyertaan saham	-	YY			YY
Investasi Permanen Lainnya	-	YY			YY
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	-	YYYY			YYYY
Aset Tetap					
Tanah	XX	YY			XXYY
Peralatan dan Mesin	XX	YY			XXYY
Gedung dan Bangunan	XX	YY			XXYY
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XX	YY			XXYY
Aset tetap Lainnya	XX	YY			XXYY
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XX	YY			XXYY
Akumulasi Penyusutan	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	XXXX	YYYY			YYYY
Piutang Jangka Panjang					
Tagihan Penjualan Angsuran	XX	YY			XXYY
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XX	YY			XXYY
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Aset Lainnya					
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XX	YY			XXYY
Dana Kelolaan	-	YY			YY
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	-	YY			YY
Aset Tak Berwujud	XX	YY			XXYY
Aset Lain-Lain	XX	YY			XXYY
Akumulasi Amortisasi	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Aset Lainnya (E)	XXXX	YYYY			XXYY
JUMLAH ASET (A s.d. E)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	YY			XXYY
Pendapatan Diterima Dimuka	XX	YY			XXYY
Utang Pihak Ketiga	-	YY			YY
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XX	YY			XXYY
Utang Jangka Pendek Lainnya	XX	YY			XXYY
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Kewajiban Jangka Panjang					
Utang Jangka Panjang	-	YY			YY
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	YY			YY
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	YY			YY
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	-	YY			YY
JUMLAH KEWAJIBAN (H=F+G)	-	YYYY			YYYY
EKUITAS					
Ekuitas (H)	XX	YY			XXYY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (F s.d. H)	XX	YY			XXYY

Keterangan:

- a) Eliminasi atas akun Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat. Pada saat yang sama, atas transaksi ini entitas lain akan mencatatnya sebagai utang. Transaksi ini bersifat resiprokal sehingga kedua akun, baik piutang maupun utang yang timbul dari transaksi antarentitas dalam satu Kementerian Negara/Lembaga harus dieliminasi;
- b) Eliminasi atas bagian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat sebagai jurnal ikutan dari poin a);

E. Ilustrasi Format Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	
a. Penerimaan Perpajakan (Khusus BA.015)	XX
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	XX
2. HIBAH	XX
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A)	XXXX
B. BELANJA	
Belanja Pegawai	XX
Belanja Barang	XX
Belanja Modal	XX
JUMLAH BELANJA (B)	XXXX
SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	XX
C. PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)	XX
Pengeluaran Pembiayaan	
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	XX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)	XX
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)	XX
SILPA/(SIKPA) (E=C+D)	XX

2. Ilustrasi Laporan Operasional Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Perpajakan (Khusus BA. 015)	XX
Jumlah Pendapatan Perpajakan	XX

Keterangan	LKKL Konsolidasian
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	XX
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XX
Jumlah Pendapatan (A)	XXXX
BEBAN	
Beban Pegawai	XX
Beban Persediaan	XX
Beban Barang dan Jasa	XX
Beban Pemeliharaan	XX
Beban Perjalanan Dinas	XX
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	XX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XX
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	XX
Jumlah Beban (B)	XXXX
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	XXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XX
Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar	XX
Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Penyelesaian Utang jk Panjang	XX
Beban Penyelesaian Utang jk Panjang	XX
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	XX
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	XXXX
Pendapatan Luar Biasa	XX
Beban Luar Biasa	XX
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	XXXX

3. Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
(A) Ekuitas Awal	XX
(B) Surplus / (Defisit) - LO	XX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	
(C) Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	XX
Penyesuaian Nilai Tetap	XX
Koreksi Nilai Persediaan	XX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XX
Lain-Lain	XX
(D) Transaksi Antar Entitas	XX
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	XX
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	XX

4. Ilustrasi Neraca Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
ASET	
Aset Lancar	
Kas di Bendahara Pengeluaran	XX
Kas pada BLU	XX
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XX

Keterangan	LKKL Konsolidasian
Kas Lainnya di BLU	XX
Investasi Jangka Pendek-BLU	XX
Piutang Bukan Pajak	XX
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	XX
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	XX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	XX
Belanja Dibayar Di Muka	XX
Uang Muka Belanja	XX
Pendapatan yang masih Harus Diterima	XX
Persediaan	XX
Jumlah Aset Lancar (A)	XXXX
Investasi Jangka Panjang	
Pinjaman Jangka Panjang	XX
Investasi Non Permanen Lainnya	XX
Investasi dalam Penyertaan saham	XX
Investasi Permanen Lainnya	XX
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	XXXX
Aset Tetap	
Tanah	XX
Peralatan dan Mesin	XX
Gedung dan Bangunan	XX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XX
Aset tetap Lainnya	XX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XX
Akumulasi Penyusutan	(XX)
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	XXXX
Piutang Jangka Panjang	
Tagihan Penjualan Angsuran	XX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	XXXX
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XX
Dana Kelolaan	XX
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	XX
Aset Tak Berwujud	XX
Aset Lain-Lain	XX
Akumulasi Amortisasi	(XX)
Jumlah Aset Lainnya (E)	XX
JUMLAH ASET (A s.d. E)	XXXX
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX
Pendapatan Diterima Dimuka	XX
Utang Pihak Ketiga	XX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	XXXX
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang	XX
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	XX
JUMLAH KEWAJIBAN (H=F+G)	XXXX
EKUITAS	
Ekuitas (H)	XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (F s.d. H)	XXXX

- F. Dokumen akuntansi yang dapat digunakan untuk pencatatan antara lain:
Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan proses eliminasi adalah kertas kerja konsolidasi dan Memo penyesuaian.

BAB XV

ILUSTRASI TRANSAKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU

A. Ilustrasi 1: Data dan Informasi Awal

1. Satuan kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) mempunyai Neraca awal dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disampaikan dan disajikan dalam rangka konsolidasian Neraca Kementerian Negara/Lembaga yang membawahnya masing-masing sebagai berikut:

a. Neraca awal

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	250	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	100	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(10)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	1.985	
Investasi Jangka Panjang		
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	-	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	800	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.840	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	-
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	500	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	6.325	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	225	-
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.100	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	6.325	-

b. LPE awal

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	-			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:				
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	-			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	-			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.100			

2. Berdasarkan analisis perbandingan penyajian Neraca BLU terdapat pos Neraca berdasarkan penyajian SAK, yang menurut SAP dapat disajikan dalam pos Neraca, yaitu Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp200 dan penyisihan piutang tidak tertagih piutang dari kegiatan operasional BLU sebesar Rp20, serta dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan yang bersumber dari dana Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp750 dari total dana sebesar Rp1.200 yang diterima. Dengan demikian dilakukan penyesuaian Neraca awal dan LPE awal pada tanggal 2 Januari 20X1 melalui memo penyesuaian, dan penyajian Neraca awal dan LPE awal setelah penyesuaian sebagai berikut:

a. Jurnal penyesuaian sesuai memo penyesuaian:

Buku Besar Kas	D	K	Buku Besar Akrua	D	K
			1157XX Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	200	
			391119 Koreksi Lainnya		200
			391119 Koreksi Lainnya	20	
			1165XX Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU		20
			165111 Dana Kelolaan BLU	750	
			221511 Utang Jangka Panjang kepada BUN		750
			121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	450	
			221511 Utang Jangka Panjang kepada BUN		450

b. Neraca awal dan LPE awal setelah penyesuaian:

1) Neraca awal setelah penyesuaian

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	250	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	*1
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	*2
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.165	
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	450	*3
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	450	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	800	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.840	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	750	*4
Aset Lain-Lain	500	*6
Jumlah Aset Lainnya (E)	1.250	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	7.705	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.200	*5
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	1.200	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	1.425	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.280	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	7.705	-

Keterangan:

*1. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai Piutang dari kegiatan operasional BLU Rp200 (Rp100+Rp200=Rp300).

- *2. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang kegiatan operasional BLU (Rp20) (Rp10+Rp20=Rp30).
- *3. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai Investasi Non Permanen Lainnya Rp450.
- *4. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai Dana Kelolaan Rp750.
- *5. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai Utang Jangka Panjang Lainnya Rp1.200.
- *6. Aset Lain-Lain Rp500 merupakan saldo awal dari hasil reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.

2) LPE awal setelah penyesuaian

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	-			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	180			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.280			

*1

Keterangan:

*1. Penambahan pencatatan saldo awal atas nilai ekuitas yang dipengaruhi pengakuan pencatatan tambahan piutang dari kegiatan operasional BLU dan penyisihannya Rp200-Rp20=Rp180.

B. Ilustrasi 2: Transaksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Pada triwulan pertama tahun 20X1 Satker BLU memperoleh pendapatan jasa layanan umum BLU secara kas sebesar Rp130, dan pada periode yang sama melakukan pembayaran tagihan secara sebesar Rp120 untuk:

1. Pembayaran gaji sebesar Rp70;
2. Pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10;

3. Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp20;
4. Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp20.

Pada tanggal 25 Maret 20X1 pendapatan dan belanja BLU tersebut dilakukan pengesahan. Berdasarkan pengesahan pendapatan dan belanja BLU tersebut dapat dicatat perjurnalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
219721	Utang kepada Kas BLU	130	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	130
4241XX	Pendapatan Jasa Layanan Umum	130	424XXX	Pendapatan Jasa Layanan Umum	130
			111911	Kas dan Bank - BLU	130
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	130

2. Jurnal pengesahan belanja BLU sesuai SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - BLU	70	525111	Beban Gaji dan Tunjangan - BLU	70
525114	Belanja Pemeliharaan - BLU	10	525114	Beban Pemeliharaan - BLU	10
525115	Belanja Perjalanan - BLU	20	525115	Beban Perjalanan - BLU	20
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	20	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	20
115631	Piutang dari Kas BLU	120	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	120
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	120
			111911	Kas dan Bank - BLU	120

3. Jurnal ikutan (korolari) pendefinitifan:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
			132111	Peralatan dan Mesin	20
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	20

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	130	(1.870)	6,50	

*1

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	-	(2.000)	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	100	(1.200)	7,69	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	100	(1.200)	7,69	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	*2
Belanja Jasa	300	-	(300)	0,00	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	*3
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	*4
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	*5
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	120	(3.680)	3,16	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		10			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)					
Pengeluaran Pembiayaan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)					
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA / (SIKPA) (E = C + D)		10			

Keterangan:

- *1. Penambahan pendapatan BLU yang telah disahkan Rp130.
- *2. Penambahan belanja gaji BLU yang telah disahkan Rp70.
- *3. Penambahan belanja pemeliharaan BLU yang telah disahkan Rp10
- *4. Penambahan belanja perjalanan BLU yang telah disahkan Rp20.
- *5. Penambahan belanja modal peralatan dan mesin BLU yang telah disahkan Rp20.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL		
Sub Total (A)	1.750	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	10	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)		
Pendapatan alokasi APBN	-	
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	-	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E =B+C+D)	10	
Sub Total (F=A+E)	1.760	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.760	

Keterangan:

- *1. SAL BLU Awal Rp1.750 berasal dari:

- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp250.
 - b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
 - c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.
- *2. SiLPA Rp10 berasal dari penyajian di LRA.
- *3. SAL BLU Akhir Rp1.760 terdiri dari:
- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp260.
 - b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
 - c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	260	*1
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.175	
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	450	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	450	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	820	*2
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.860	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	

URAIAN	20X1	20X0
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	750	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	1.250	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	7.735	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.200	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	1.200	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	1.425	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.310	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	7.735	-

Keterangan:

- *1. Awal Rp250 + Pendapatan Rp130 – Belanja Rp120 = Rp260.
- *2. Awal Rp800 + Pembelian Rp20.

7. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	*1
Jumlah Pendapatan (A)	130	-
BEBAN		
Beban Pegawai	70	*2
Beban Pemeliharaan	10	*3
Beban Perjalanan Dinas	20	*4
Jumlah Beban (B)	100	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	30	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar		
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	30	-
POS LUAR BIASA		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	30	-

Keterangan:

- *1. Pengakuan pendapatan BLU Rp130.
- *2. Pengakuan beban gaji BLU yang telah disahkan Rp70.
- *3. Pengakuan beban pemeliharaan BLU yang telah disahkan Rp10.
- *4. Pengakuan beban perjalanan BLU yang telah disahkan Rp20.

8. Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas (LAK) atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	*1
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	130	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	70	*2
Pembayaran Pemeliharaan	10	*3
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	*4
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	100	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	30	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	*5
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	20	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(20)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	-	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	10	
Penyesuaian atas Selisih Kurs		
Koreksi Saldo Kas		
Saldo Awal Kas	2.625	*6
Saldo Akhir Kas	2.635	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	260	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	750	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

Keterangan:

- *1. Kas masuk dari pendapatan BLU yang telah disahkan Rp130.
- *2. Kas keluar dari belanja gaji BLU yang telah disahkan Rp70.
- *3. Kas keluar dari belanja pemeliharaan BLU yang telah disahkan Rp10.
- *4. Kas keluar dari belanja perjalanan BLU yang telah disahkan Rp20.

- *5. Kas keluar dari belanja modal peralatan dan mesin BLU yang telah disahkan Rp20.
- *6. Saldo Awal Kas Rp2.625 berasal dari:
 - a. Saldo awal Kas pada BLU sebesar Rp250.
 - b. Saldo awal Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp125.
 - c. Saldo awal Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp1.000.
 - d. Saldo awal Dana Kelolaan BLU sebesar Rp750.
 - e. Saldo awal Kas yang Dibatasi Penggunaanya Rp500.

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	30			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas	210			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.310			

Keterangan: Surplus Rp30 berasal dari penyajian di LO.

C. Ilustrasi 3: Transaksi Hibah BLU

Pada 1 Maret 20X1 Satker BLU menerima hibah sesuai berita acara serah terima hibah dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berupa:

1. uang sebesar Rp375; dan
2. 1 (satu) unit komputer senilai Rp60.

Terhadap 1 (satu) unit komputer, Satker BLU telah melakukan penatausahaan BMN dan pencatatan aset tetap ke dalam Neraca, sedangkan pada 25 Maret 20X1 dilakukan pengesahan pendapatan hibah BLU sebesar Rp375 dan pengeluaran belanja jasa yang dibiayai dari hibah BLU sebesar Rp200. Berdasarkan pencatatan hibah 1 (satu) unit komputer dan pengesahan pendapatan hibah BLU serta belanja jasa yang dibiayai

hibah tersebut dapat dicatat perjournalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal transaksional dan/atau periodik pengakuan barang dari hibah dan pendapatan hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah:

- a. Jurnal transaksional dari perekaman aplikasi Aset Tetap sehubungan dengan diterimanya barang dari hibah sesuai berita acara serah terima hibah berupa barang:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	K		D	K	
			132111	Peralatan dan Mesin	60
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	60

- b. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk transaksional dan/atau periodik pengakuan pendapatan hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	K		D	K	
			132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	60
			424232	Pendapatan Hibah BLU Barang/Jasa	60

2. Jurnal pengesahan pendapatan hibah BLU sesuai SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	K		D	K	
219721	Utang kepada Kas BLU	375	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	375
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	375	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	375
			111911	Kas dan Bank - BLU	375
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	375

3. Jurnal pengesahan belanja jasa yang dibiayai dari hibah BLU sesuai SP3B/SP2B BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	K		D	K	
525113	Belanja Jasa	200	525113	Beban Jasa	200
115631	Piutang dari Kas BLU	200	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	200
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	200
			111911	Kas dan Bank - BLU	200

4. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	505	(1.495)	25,25	*1
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	-	(2.000)	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	*2
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	320	(3.480)	8,42	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		185			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		-			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		-			
Pengeluaran Pembiayaan		-			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		-			
Pembiayaan Neto (D = D I - D II)		-			
SILPA/ (SIKPA) (E = C + D)		185			

Keterangan:

- *1. Penambahan pendapatan hibah BLU yang telah disahkan Rp375.
- *2. Penambahan belanja jasa BLU yang telah disahkan Rp200.

5. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL		
Sub Total (A)	1.750	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	185	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)		
Pendapatan alokasi APBN	-	
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	-	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E = B+C+D)	185	
Sub Total (F=A+E)	1.935	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.935	

Keterangan:

- *1. SilPA Rp185 berasal dari penyajian di LRA.
- *2. SAL BLU Akhir Rp1.935 terdiri dari:

- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp435.
 - b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
 - c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0**

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	435	*1
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.350	
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	450	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	450	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	*2
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.920	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	750	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	1.250	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	7.970	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-

URAIAN	20X1	20X0
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.200	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	1.200	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	1.425	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.545	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	7.970	-

Keterangan:

*1. Awal Rp260 + Hibah uang masuk Rp375 – Belanja Rp200 = Rp435.

*2. Awal Rp820 + Hibah barang Rp60 = Rp880.

7. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	-
Pendapatan Hibah BLU	435	- *1
Jumlah Pendapatan (A)	565	-
BEBAN		
Beban Pegawai	70	-
Beban Barang dan Jasa	200	- *2
Beban Pemeliharaan	10	-
Beban Perjalanan Dinas	20	-
Jumlah Beban (B)	300	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	265	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	265	-
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	-	-
Beban Luar Biasa	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	265	-

Keterangan:

1. Hibah kas Rp375 + Hibah barang Rp60 = Rp435.

2. Belanja yang dibiayai dari hibah yang telah disahkan Rp200.

8. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	*1
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	505	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	70	
Pembayaran Jasa	200	*2
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	300	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	20	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(20)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	-	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	185	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	2.810	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	435	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	750	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

Keterangan:

- *1. Kas masuk dari pendapatan hibah kas BLU yang telah disahkan Rp375.
- *2. Kas keluar dari belanja jasa BLU yang telah disahkan Rp200.

9. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, belanja jasa yang dibiayai dari hibah, dan hibah BLU bentuk barang sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	265			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas	445			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.545			

Keterangan: Surplus Rp265 berasal dari penyajian di LO.

D. Ilustrasi 4: Transaksi Belanja Alokasi Dana DIPA Rupiah Murni

Pada 4 Juli 20X1 Satker BLU mengajukan tagihan beban pegawai untuk alokasi dana DIPA rupiah murni sebesar Rp900 dan telah diterbitkan SPM/SP2D Belanja Pegawai. Berdasarkan SPM/SP2D Belanja Pegawai tersebut dapat dicatat perjurnalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi belanja pegawai sesuai dengan SPM/SP2D belanja pegawai:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
511111	Belanja Pegawai	900	511111	Belanja Pegawai	900
115612	Piutang dari KPPN	900	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900
			313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900
			424411	Pendapatan Alokasi APBN	900

2. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	505	(1.495)	25,25	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	900	(1.100)	45,00	*1
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	1.220	(2.580)	32,11	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		(715)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		-			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		-			
Pengeluaran Pembiayaan		-			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		-			
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA / (SIKPA) (E = C + D)		(715)			

Keterangan:

- *1. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900.
3. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL		
Sub Total (A)	1.750	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	(715)	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)	900	
Pendapatan alokasi APBN	900	*1
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	-	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E =B+C+D)	185	
Sub Total (F=A+E)	1.935	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.935	*2

Keterangan:

- *1. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900.
- *2. SAL BLU Akhir Rp1.935 terdiri dari:

- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp435.
 - b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
 - c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.
4. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	435	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.350	
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	450	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	450	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.920	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	750	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	1.250	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	7.970	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.200	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	1.200	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	1.425	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.545	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	7.970	-

Keterangan: Tidak ada penyajian atas realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 di Neraca.

5. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Alokasi APBN	900	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	
Pendapatan Hibah BLU	435	
Jumlah Pendapatan (A)	1.465	-
BEBAN		
Beban Pegawai	970	
Beban Barang dan Jasa	200	
Beban Pemeliharaan	10	
Beban Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Beban (B)	1.200	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	265	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	0
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	265	
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	-	0
Beban Luar Biasa	-	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	265	-

Keterangan:

- *1. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 diakui sebagai pendapatan BLU.
- *2. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 diakui sebagai beban pegawai.
6. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD	900	
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	1.405	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	970	
Pembayaran Jasa	200	
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	1.200	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	20	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(20)	

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	-	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	185	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	2.810	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	435	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	750	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

Keterangan:

- *1. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 diakui sebagai arus masuk pendapatan BLU.
 - *2. Realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 diakui sebagai arus keluar beban pegawai.
7. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi belanja pegawai alokasi DIPA rupiah murni sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	265			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	445			
(F) Ekuitas Akhir (A+ E)	6.545			

Keterangan: Tidak ada penyajian atas realisasi belanja pegawai sesuai SPM/SP2D Rp900 di LPE.

E. Ilustrasi 5: Transaksi Perolehan Kas dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Bagian Anggaran BUN

Pada 30 Juli 20X1 Satker BLU menerima tambahan kas pada tahun berjalan 20X1 dari Satker Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka penugasan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU yaitu sebesar Rp1.560. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan penugasan kegiatan dimaksud oleh BLU dalam bentuk investasi non permanen dengan menggunakan sumber dana Satker BA BUN tersebut sebesar Rp600. Terhadap kas dari Satker BA BUN tersebut dapat dicatat perjournalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk transaksional/periodik pengakuan penerimaan kas di rekening bank BLU dari Satker BA BUN:

Buku Besar Kas		D	K	Buku Besar AkruaI		D	K
				165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	1.560	
				221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN		1.560

2. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk transaksional/periodik pengakuan pengeluaran kas di rekening bank BLU dalam rangka investasi non permanen yang dilaksanakan oleh BLU yang dananya bersumber dari Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan:

Buku Besar Kas		D	K	Buku Besar AkruaI		D	K
				121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	600	
				165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan		600

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	505	(1.495)	25,25	

Uraian	TA20X1				TA20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	900	(1.100)	45,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	1.220	(2.580)	32,11	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		(715)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		-			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		-			
Pengeluaran Pembiayaan		-			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		-			
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA / (SIKPA) (E = C + D)		(715)			

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN.

4. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL		
Sub Total (A)	1.750	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	(715)	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)	900	
Pendapatan alokasi APBN	900	
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	-	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E)	185	
Sub Total (F=A+E)	1.935	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.935	

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	435	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.350	-
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	1.050	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	1.050	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.920	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	-
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	1.710	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	2.210	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	9.530	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	2.760	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	2.760	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	2.985	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.545	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	9.530	-

Keterangan:

- *1. Awal Rp1.200 + Penambahan dana Rp1.560.
 *2. Awal Rp750 + Penambahan dana Rp1.560 – Penyaluran Rp600.
 *3. Awal Rp450 + Penyaluran Rp600.

6. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Alokasi APBN	900	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	
Pendapatan Hibah BLU	435	
Jumlah Pendapatan (A)	1.465	-
BEBAN		
Beban Pegawai	970	
Beban Barang dan Jasa	200	
Beban Pemeliharaan	10	
Beban Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Beban (B)	1.200	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	265	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	265	
POS LUAR BIASA		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	265	-

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN.

7. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD	900	
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	1.405	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	970	
Pembayaran Jasa	200	
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	1.200	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	600	*2
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	620	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(620)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	1.560	*1
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	1.560	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	1.560	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	1.145	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	3.770	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	435	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	1.710	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

Keterangan:

*1. Arus kas masuk penambahan dana Rp1.560.

*2. Arus kas keluar penyaluran dana Rp600.

8. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	265			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	445			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.545			

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan BA BUN.

F. Ilustrasi 6: Transaksi Pengesahan Penggunaan Dana SAL BLU untuk Pembiayaan BLU bentuk Investasi Jangka Panjang

Pada 1 Agustus 20X1 Satker BLU diminta untuk melakukan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan dana SAL BLU berupa kas dan bank BLU yang telah disahkan guna memperkuat pendanaan sehubungan penugasan investasi non permanen, yaitu sebesar Rp100,-.

Pada tanggal 25 September 20X1 pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan dana SAL BLU tersebut dilakukan pengesahan dan sekaligus pengesahan penerimaan pembiayaan untuk membiayai investasi non permanen. Berdasarkan pengesahan penggunaan dana SAL BLU tersebut dapat dicatat perjurnalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengesahan pengeluaran pembiayaan BLU sesuai SP3B/SP2B BLU penggunaan dana SAL BLU:

Buku Besar Kas	D	K	Buku Besar Akrua	D	K
721739 Pengeluaran Pembiayaan Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen	100		121639 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen	100	
115631 Piutang dari Kas BLU		100	111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan		100
			111914 Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	100	
			111911 Kas dan Bank BLU		100

2. Jurnal pengesahan penerimaan pembiayaan BLU sesuai SP3B/SP2B BLU penggunaan dana SAL BLU:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
	D	K		D	K
311314	Penggunaan SAL BLU	100			
711791	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	100		
	Dana SAL BLU				

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	505	(1.495)	25,25	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	900	(1.100)	45,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	1.220	(2.580)	32,11	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		(715)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		100			*1
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		100			
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		100			*2
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		100			
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA/ (SIKPA) (E = C + D)		(715)			

Keterangan:

- *1. Penerimaan pembiayaan dari Penggunaan SAL BLU Rp100.
*2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi jangka panjang Rp100.

4. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL	(100)	
Sub Total (A)	1.650	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	(715)	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)	900	
Pendapatan alokasi APBN	900	
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	-	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E =B+C+D)	185	
Sub Total (F=A+E)	1.835	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.835	-

Keterangan:

*1. Penggunaan SAL untuk investasi jangka panjang Rp100.

*2. SAL BLU Akhir Rp1.835 terdiri dari:

- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp335.
- b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
- c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	335	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.250	
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	1.150	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	1.150	-

URAIAN	20X1	20X0
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.920	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	-
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	1.710	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	2.210	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	9.530	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	2.760	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	2.760	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	2.985	-
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.545	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	9.530	-

Keterangan:

- *1. Awal Rp435 – Penggunaan kas untuk investasi jangka panjang Rp100.
 - *2. Awal Rp1.050 + Penambahan investasi jangka panjang dari kas dan bank BLU Rp100.
6. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Alokasi APBN	900	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	
Pendapatan Hibah BLU	435	
Jumlah Pendapatan (A)	1.465	-
BEBAN		
Beban Pegawai	970	
Beban Barang dan Jasa	200	
Beban Pemeliharaan	10	
Beban Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Beban (B)	1.200	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	265	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	265	-
POS LUAR BIASA		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	265	-

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penggunaan SAL atau kas dan bank BLU untuk investasi jangka panjang di LO

7. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD	900	
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	1.405	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	970	
Pembayaran Jasa	200	
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	1.200	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen	100	
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	600	
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	720	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(720)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	1.560	
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	1.560	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	1.560	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	1.045	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	3.670	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	335	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	1.710	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

*1

Keterangan:

*1. Arus kas keluar dari kas dan bank BLU untuk membiayai investasi jangka panjang.

8. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi pengesahan penggunaan dana SAL BLU sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	265			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	-			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	445			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.545			

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi penggunaan SAL atau kas dan bank BLU untuk investasi jangka panjang di LPE.

G. Ilustrasi 7: Transaksi Penyetoran ke Kas Negara

Pada bulan September 20X1 terdapat penyetoran ke kas negara yang terdiri dari transaksi:

1. Penyetoran secara kas sebagai PNBPN umum ke kas negara sesuai dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan berupa pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni sebesar Rp50.
2. Penyetoran secara kas sesuai Keputusan Menteri Keuangan dan dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan atas surplus BLU dari kas dan bank BLU ke kas negara sebesar Rp150.

Terhadap penyetoran ke kas negara tersebut dapat dicatat per jurnalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni sesuai dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Kas			D	K	Buku Besar Akrual			D	K
219711	Utang kepada KUN		50		313121	Diterima dari Entitas Lain	50		
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun Anggaran yang Lalu			50	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun Anggaran yang Lalu			50
					596114	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	50		
					313121	Diterima dari Entitas Lain			50

2. Jurnal realisasi penyetoran secara kas atas surplus BLU dari kas dan bank BLU ke kas negara sesuai dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Kas			D	K	Buku Besar Akrual			D	K
391141	Setoran Surplus BLU		150		391141	Setoran Surplus BLU	150		
219721	Utang kepada BLU			150	111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan			150
					111914	Kas dan Bank - BLU yang belum disahkan	150		
					111911	Kas dan Bank BLU			150

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	555	(1.445)	27,75	*1
Pendapatan PNBP Lainnya		50	50		
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	555	(1.445)	27,75	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	900	(1.100)	45,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	1.220	(2.580)	32,11	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		(665)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		100			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		100			
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		100			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		100			
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA/ (SIKPA) (E = C + D)		(665)			

Keterangan:

*1. Realisasi pendapatan sesuai setoran negara Rp50 atas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni.

4. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM		
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL	(100)	
Sub Total (A)	1.650	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	(665)	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)	700	
Pendapatan alokasi APBN	900	
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(50)	*1
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	(150)	*2
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E =B+C+D)	35	
Sub Total (F=A+E)	1.685	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	-	
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.685	*3

Keterangan:

- *1. Pengurang SAL dan kas dan bank BLU atas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni Rp50.
- *2. Pengurang SAL atas pengembalian kas dan bank BLU ke kas negara Rp150.
- *3. SAL BLU Akhir Rp1.685 terdiri dari:
- Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp185.
 - Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.000.
 - Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp500.
5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	100	
Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Kas pada Badan Layanan Umum	185	
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.000	
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(30)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5)	
Persediaan	400	
Jumlah Aset Lancar (A)	2.100	-
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	1.150	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	1.150	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(90)	
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(200)	
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(20)	
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.920	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	1.710	
Aset Lain-Lain	500	
Jumlah Aset Lainnya (E)	2.210	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	9.380	-
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	100	
Utang Pajak	125	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	225	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	2.760	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	2.760	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	2.985	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.395	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	9.380	-

*1

Keterangan:

*1. Awal Rp335 – Setoran kas dan bank BLU ke kas negara Rp150.

6. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Alokasi APBN	900	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130	
Pendapatan Hibah BLU	435	
Jumlah Pendapatan (A)	1.465	-
BEBAN		
Beban Pegawai	970	
Beban Barang dan Jasa	200	
Beban Pemeliharaan	10	
Beban Perjalanan Dinas	20	
Jumlah Beban (B)	1.200	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	265	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	50	*1
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	50	*2
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	-	
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	265	
POS LUAR BIASA		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	265	-

Keterangan:

- *1. Pengakuan pendapatan atas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni Rp50.
 - *2. Penyetoran pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni Rp50 ke kas negara.
7. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD	900	
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	
Pendapatan PNBP Umum	50	*1
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	1.455	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	970	
Pembayaran Jasa	200	
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	50	*2
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	1.250	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen	100	
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	600	
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	720	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(720)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	1.560	
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	1.560	
Arus Keluar Kas:		
Penyetoran ke Kas Negara	150	*3
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	150	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	1.410	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	
Arus Keluar Kas:		
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)	-	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M= C+F+I+L)	895	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	3.520	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	185	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	125	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.000	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	1.710	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	500	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100	

Keterangan:

- *1. Arus masuk kas atas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni Rp50.
 - *2. Arus keluar kas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu alokasi dana DIPA rupiah murni Rp50 ke kas negara.
 - *3. Arus keluar kas atas setoran sebagian kas dan bank BLU Rp150 ke kas negara.
8. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi penyetoran ke kas negara sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	265			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	(150)			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	295			
(F) Ekuitas Akhir (A + E)	6.395			

*1

Keterangan:

*1. Setoran surplus dari Kas dan Bank BLU ke rekening kas negara Rp150.

H. Ilustrasi 8: Transaksi-Transaksi Akrual dan Penyesuaian

Dalam rangka kebutuhan pelaporan interim, rekonsiliasi, dan/atau penyusunan Laporan Keuangan tahunan 20X1 terdapat transaksi-transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

1. Terdapat Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan yang berasal dari transaksi:
 - c. pendapatan jasa layanan umum dari masyarakat – DIPA PNBP sebesar Rp33 belum dilakukan pengesahan; dan
 - d. belanja pemeliharaan BLU – DIPA PNBP sebesar Rp50 belum dilakukan pengesahan.

tidak terdapat dispensasi jadwal ulang dalam pengesahan pendapatan tersebut di KPPN mitra kerja.
2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dana alokasi DIPA rupiah murni, seluruh saldo uang persediaan/kas di bendahara pengeluaran, baik tahun berjalan maupun tahun anggaran yang lalu, telah selesai dipertanggungjawabkan. Atas saldo kas di bendahara pengeluaran pada awal tahun 20X1 sebesar Rp100 telah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan pada 1 Februari 20X1.

3. Berdasarkan buku pembantu pencatatan kas dan bank BLU yang menggunakan mata uang asing, terdapat perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi hasil revaluasi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp11.
4. Terdapat reklasifikasi Kas dan Bank BLU sehubungan dengan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan kas melalui pembelian instrumen investasi jangka pendek sebesar, Rp85.
 - b. ketentuan amanat penugasan terhadap BLU untuk membentuk Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan, sebesar Rp25.
5. Berdasarkan buku pembantu potongan pajak, saldo pajak yang telah dipotong atau dipungut dan belum disetor pada awal tahun 20X1 yang berasal dari pungutan bendahara atas transaksi belanja yang kena pajak tahun sebelumnya sebesar Rp125 telah disetor pada 5 Februari 20X1. Sedangkan pajak yang belum disetor oleh bendahara atas transaksi belanja yang kena pajak tahun 20X1 adalah sebesar Rp Rp5.
6. Berdasarkan buku pembantu untuk masing-masing piutang dari kegiatan operasional BLU dan kegiatan non operasional BLU diperoleh informasi bahwa kualitas piutang ketertagihannya adalah diragukan sehingga beban penyisihan atas saldo piutang dari kegiatan operasional BLU dan saldo piutang dari kegiatan non operasional BLU masing-masing adalah Rp120 dan Rp7.
7. Berdasarkan buku pembantu persediaan dari aplikasi Persediaan, pemakaian persediaan yang menjadi beban persediaan sebesar Rp35.
8. Berdasarkan buku pembantu aset tetap dari aplikasi Aset Tetap, beban penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan masing-masing sebesar Rp10, Rp26, dan Rp7.

Terhadap transaksi-transaksi akrual dan penyesuaian tersebut dapat dicatat perjurnalannya dan dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian terhadap Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan:
 - a. transaksi pendapatan jasa layanan umum dari masyarakat – DIPA PNBPNP sebesar Rp33 yang belum disahkan:

Buku Besar Kas		D	K	Buku Besar Akrual		D	K
				111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	33	
				424XXX	Pendapatan Jasa Layanan Umum		33

- b. transaksi belanja pemeliharaan – DIPA PNPB sebesar Rp33 yang belum disahkan:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D	K		D	K	
			525114	Belanja Pemeliharaan	50
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	50

2. Jurnal atas perekaman dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan atas penyeteroran uang persediaan/kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp100 ke kas negara:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D	K		D	K	
			219511	Uang Muka dari KPPN	100
			111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100

3. Jurnal atas pengakuan pendapatan keuntungan selisih kurs belum terealisasi hasil revaluasi mata uang asing dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp11:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D	K		D	K	
219721	Utang kepada BLU	11	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	11
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	11	311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	11
			111911	Kas dan Bank BLU	11
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	11
			311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	11
			491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	11

4. Jurnal reklasifikasi melalui memo penyesuaian dari Kas dan Bank BLU menjadi investasi jangka pendek sebesar Rp85, dan dari Kas dan Bank BLU menjadi dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp25:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D	K		D	K	
			1133XX	Investasi Jangka Pendek BLU	85
			166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	25
			111911	Kas dan Bank BLU	110

5. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian atas saldo transaksi pajak yang belum disetor pada akhir tahun 20X1:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
D	K		D	K	
			219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	120
			111826	Kas Lainnya di BLU	120

6. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian atas beban penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang dari kegiatan operasional BLU dan piutang dari kegiatan non operasional BLU masing-masing adalah Rp120 dan Rp7:

Buku Besar Kas	D	K	Buku Besar AkruaI	D	K
			5946XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	120
			1166XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	120
			5947XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	7
			1167XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	7

7. Jurnal penyesuaian atas identifikasi beban persediaan sebesar Rp35:

Buku Besar Kas	D	K	Buku Besar AkruaI	D	K
			5931XX	Beban Persediaan	35
			1171XX	Persediaan	35

8. Jurnal penyesuaian atas identifikasi beban penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan masing-masing sebesar Rp10, Rp26, dan Rp7:

Buku Besar Kas	D	K	Buku Besar AkruaI	D	K
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10
			591121	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	26
			591313	Beban Penyusutan jaringan	7
			137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	7

9. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	TA 20X1				TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggran	% Real. Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000	555	(1.445)	27,75	
Pendapatan PNBP Lainnya		50	50		
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.000	505	(1.495)	25,25	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.000	130	(1.870)	6,50	
Pendapatan Hibah terikat - uang		375	375		
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A)	2.000	555	(1.445)	27,75	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	2.000	900	(1.100)	45,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Badan Layanan Umum	1.300	300	(1.000)	23,08	
Belanja Gaji dan Tunjangan	500	70	(430)	14,00	
Belanja Jasa	300	200	(100)	66,67	
Belanja Pemeliharaan	300	10	(290)	3,33	
Belanja Perjalanan	200	20	(180)	10,00	
Belanja Modal	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Badan Layanan Umum	500	20	(480)	4,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500	20	(480)	4,00	
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	3.800	1.220	(2.580)	32,11	
SURPLUS / (DEFISIT) (C= A-B)		(665)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		100			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)		100			
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		100			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)		100			
Pembiayaan Neto (D= D I - D II)		-			
SILPA/ (SIKPA) (E = C + D)		(665)			

Keterangan: Tidak ada penyajian atas transaksi akrual dan penyesuaian di LRA.

10. Laporan Keuangan berupa LPSAL atas transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU Awal	1.750	
Penggunaan SAL	(100)	
Sub Total (A)	1.650	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (B)	(665)	
Penyesuaian (SiLPA/SiKPA):		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN: (C)	700	
Pendapatan alokasi APBN	900	
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(50)	
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	(150)	
Pengembalian pendapatan BLU TAYL (D)	-	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (E =B+C+D)	35	
Sub Total (F=A+E)	1.685	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (G)	-	
Lain-Lain (H)	11	*1
Saldo Anggaran Lebih BLU Akhir (I=F+G+H)	1.696	

Keterangan:

*1. Penambahan nilai Kas dan Bank BLU karena adanya pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi Rp11.

*2. SAL BLU Akhir Rp1.696 terdiri dari:

- a. Kas pada BLU (Neraca) tidak termasuk Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Rp86.
- b. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU Rp1.085.
- c. Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain di Neraca) Rp525.

11. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
NERACA**

PER 1 JANUARI 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	*2
Kas Lainnya dan Setara Kas	5	*5
Kas pada Badan Layanan Umum	69	*1/3/4
Investasi Jangka Pendek-BLU	1.085	*4
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	300	
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	25	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(150)	*6
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(12)	*6
Persediaan	365	*7
Jumlah Aset Lancar (A)	1.687	-
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya	1.150	
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	1.150	-
Aset Tetap		
Tanah	1.100	
Peralatan dan Mesin	880	
Gedung dan Bangunan	1.900	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350	
Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin	(100)	*8
Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	(226)	*8
Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(27)	*8
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	3.877	-
Piutang Jangka Panjang		
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	-	-
Aset Lainnya		
Dana Kelolaan	1.710	
Aset Lain-Lain	525	*4
Jumlah Aset Lainnya (E)	2.235	-
JUMLAH ASET (A s.d. E)	8.949	-

URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Uang Muka dari KPPN	-	*2
Utang Pajak	5	*5
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	5	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	2.760	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	2.760	-
JUMLAH KEWAJIBAN (F s.d. G)	2.765	
EKUITAS		
Ekuitas (H)	6.184	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	8.949	-

Keterangan:

- *1/3/4. Awal Rp185 + pendapatan BLU belum disahkan Rp33 – belanja BLU belum disahkan Rp50 – Reklasifikasi ke Investasi jangka pendek Rp85 dan dana yang dibatasi penggunaannya Rp25 + Keuntungan selisih kurs belum terealisasi Rp11 = Rp69.
 - *2. Awal Rp100 – Penyelesaian uang persediaan alokasi DIPA rupiah murni Rp100 = Rp0.
 - *4. Penambahan dari reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Investasi jangka pendek Rp85, dan ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Pos Aset Lain-Lain) Rp25.
 - *5. Awal Rp125 – Pengurangan Kas Lainnya di BLU dan Utang Pajak sehubungan dengan penyetoran pungutan pajak Rp120 = Rp5.
 - *6. Penambahan penyisihan piutang tidak tertagih sehubungan dengan pengakuan beban penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang kegiatan operasional dan non operasional masing-masing Rp120 dan Rp7.
 - *7. Awal Rp400 – Pengurangan Persediaan Rp35 sehubungan pemakaian persediaan = Rp365.
 - *8. Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan sehubungan dengan pengakuan beban penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan masing-masing Rp10, Rp26, dan Rp7.
12. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Alokasi APBN	900	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	163	*1a
Pendapatan Hibah BLU	435	
Jumlah Pendapatan (A)	1.498	-
BEBAN		
Beban Pegawai	970	
Beban Persediaan	35	*7
Beban Barang dan Jasa	200	
Beban Pemeliharaan	60	*1b
Beban Perjalanan Dinas	20	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	43	*8
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	127	*6
Jumlah Beban (B)	1.455	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	43	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	61	*3
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	50	
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	11	
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (D)	11	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	54	-
POS LUAR BIASA		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	-	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	54	-

Keterangan:

- *1a. Awal Rp130 + Penambahan pengakuan pendapatan BLU yang belum disahkan Rp33 = Rp163.
 - *1b. Awal Rp10 Penambahan pengakuan belanja BLU yang belum disahkan Rp50 = Rp60.
 - *3. Awal Rp50 + Penambahan pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi Rp11 = Rp61.
 - *6. Awal Rp0 + Penambahan pengakuan beban penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang kegiatan operasional dan non operasional masing-masing Rp120, dan Rp7 = Rp127.
 - *7. Awal Rp0 + Penambahan pengakuan beban persediaan Rp35.
 - *8. Awal Rp0 + Penambahan pengakuan penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan masing-masing Rp10, Rp26, dan Rp7 = Rp43.
13. Laporan Keuangan berupa LAK atas transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

**SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD	900	
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	130	
Pendapatan dari Hibah	375	
Pendapatan PNBPN Umum	50	
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	1.455	
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	970	
Pembayaran Jasa	200	
Pembayaran Pemeliharaan	10	
Pembayaran Perjalanan Dinas	20	
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	50	
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	1.250	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	205	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	
Arus Keluar Kas:		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20	
Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen	100	
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	600	
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	720	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(720)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BABUN Investasi)	1.560	
Jumlah Arus Masuk Kas (G)	1.560	
Arus Keluar Kas:		
Penyetoran ke Kas Negara	150	
Jumlah Arus Keluar Kas (H)	150	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G - H)	1.410	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	
Penerimaan Transitoris lainnya	33	*1a
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	33	
Arus Keluar Kas:		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	120	
Pengeluaran Transitoris lainnya	50	*1b
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	170	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L = J - K)	(137)	
Kenaikan/(Penurunan) Kas (M = C + F + I + L)	758	
Penyesuaian atas Selisih Kurs	11	*3
Koreksi Saldo Kas	-	
Saldo Awal Kas	2.625	
Saldo Akhir Kas	3.394	
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	69	
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	5	
Investasi Jangka Pendek BLU	1.085	
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	1.710	
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	525	
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	(17)	*1
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	*2

Keterangan:

*1. Awal Rp0 + pendapatan BLU belum disahkan Rp33 – belanja BLU belum disahkan Rp50 = (Rp17).

*1a. Awal Rp0 + pendapatan BLU belum disahkan Rp33.

*1b. Awal Rp0 + belanja BLU belum disahkan Rp50.

- *2. Awal Rp100 – Penyelesaian uang persediaan alokasi DIPA rupiah murni Rp100 = Rp0.
- *3. Awal Rp0 + Penambahan pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi Rp11 = Rp11.

14. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi akrual dan penyesuaian sebagai berikut:

SATUAN KERJABADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	3	4	5	6
(A) Ekuitas Awal	6.100			
(B) Surplus / (Defisit) - LO	54			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN				
(C) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:	180			
Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan	-			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-			
Lain-Lain	180			
(D) Transaksi antar Entitas	(150)			
(E) Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas (B+C+D)	84			
(F) Ekuitas Akhir (A+ E)	6.184			

Keterangan: Surplus Rp54 berasal dari penyajian di LO.

I. Ilustrasi 9: Transaksi Kas dan Bank BLU yang Menggunakan Mata Uang Asing

BLU memiliki rekening bank BLU yang digunakan untuk transaksi yang menggunakan mata uang asing Dollar Amerika Serikat, dan terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	Saldo Mutasi Transaksi Dolar	Saldo Buku Dolar	Kurs Pelaporan	Kurs Transaksi	Kurs Rata2 (WA)	Pendapatan Penjabaran Rupiah	Belanja Penjabaran Rupiah	Konversi ke Rupiah	Selisih Kurs Terealisasi	Kas BLU Neto Rupiah	Selisih Kurs Belum Terealisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13
saldo awal	saldo awal	1,000		10,000							10,000,000	100,000
1 Apr 20X1	pendapatan	5,000	6,000		10,500	10,417 *1	52,500,000 *4				62,500,000	(2,000,000)
1 Mei 20X1	pendapatan	2,000	8,000		10,200	10,363 *2	20,400,000 *5				82,900,000	(200,000)
15 Mei 20X1	konversi	(500)	7,500		10,050	10,363 *3			(5,025,000) *9	(156,500) *11	77,718,500	131,500
15 Jun 20X1	belanja	(1,000)	6,500		9,500	10,363 *3		(9,500,000) *7			68,218,500	(600,000)
25 Jun 20X1	total	6,500					72,900,000 *6	(9,500,000) *8	(5,025,000) *10	(156,500) *12	68,218,500	
Nilai Kas 30 Juni 20X1	Pengesahan Unrealised		6,500	10,100							65,650,000	(2,568,500)
Nilai Kas 31 Desember 20X1	Total	-	6,500	10,300	-	10,363	-	-	-	-	66,950,000	(1,268,500)
	Pengesahan Unrealised											1,300,000

Keterangan:

1. Kurs rata-rata Rp10.417 diperoleh dari perhitungan $((USD1.000 \times Rp10.000) + (USD5.000 \times Rp10.500)) / (USD1.000 + USD5.000)$.
2. Kurs rata-rata Rp10.363 diperoleh dari perhitungan $((USD6.000 \times Rp10.417) + (USD2.000 \times Rp10.200)) / USD8.000$.
3. Kurs rata-rata Rp10.363 tidak berubah karena tidak ada penambahan uang dari pendapatan.
4. Pendapatan penjabaran Rupiah Rp52.500.000 diperoleh dari perhitungan pendapatan kas dan kurs transaksional $USD5.000 \times Rp10.500$.
5. Pendapatan penjabaran Rupiah Rp20.400.000 diperoleh dari perhitungan pendapatan kas dan kurs transaksional $USD2.000 \times Rp10.200$.
6. Rp72.900.000 merupakan jumlah pendapatan penjabaran Rupiah yang secara periodik dilakukan pengesahan pendapatan dengan KPPN sesuai SP3B/SP2B BLU. Jurnal yang terbentuk dari pengesahan pendapatan sesuai SP3B/SP2B BLU tersebut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
219721	Utang kepada Kas BLU	72.900K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	72.900K
424xxx	Pendapatan BLU XXX	72.900K	424xxx	Pendapatan BLU xxx	72.900K
			111911	Kas dan Bank BLU	72.900K
			111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	72.900K

7. Belanja penjabaran Rupiah (Rp9.500.000) diperoleh dari perhitungan pengeluaran/belanja kas dan kurs transaksional $USD1.000 \times Rp9.500$.
8. (Rp9.500.000) merupakan jumlah belanja penjabaran Rupiah yang secara periodik dilakukan pengesahan belanja dengan KPPN sesuai SP3B/SP2B BLU. Jurnal yang terbentuk dari pengesahan belanja sesuai SP3B/SP2B BLU tersebut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
	D	K		D	K
525xxx	Belanja - BLU	9.500K	525xxx	Beban - BLU	9.500K
537xxx	Belanja Modal - BLU		132xxx	Aset tetap belum diregister	
115631	Piutang dari Kas BLU	9.500K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	9.500K
			111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	9.500K
			111911	Kas dan Bank - BLU	9.500K

9. Konvesrsi ke Rupiah (Rp5.025.000) diperoleh dari perhitungan pengambilan Dollar untuk ditukar dengan Rupiah pada kurs transaksional USD500 x Rp10.050.
10. (Rp5.025.000) merupakan jumlah konversi dari Dollar ke Rupiah dan tidak dilakukan pengesahan.
11. Selisih kurs terealisasi (Rp156.500) diperoleh dari perhitungan USD500x(Rp10.050-Rp10.363).
12. (Rp156.500) merupakan jumlah negatif selisih kurs terealisasi yang dilakukan pengesahan secara periodik sebagai belanja selisih kurs terealisasi. Dalam hal jumlah positif, dilakukan pengesahan secara periodik sebagai pendapatan selisih kurs terealisasi.

Jurnal yang terbentuk dari pengesahan belanja selisih kurs terealisasi sesuai SP3B/SP2B – BLU tersebut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akruai		
	D	K		D	K
525112	Belanja	156.500	525112	Beban	156.500
	Barang BLU			Barang BLU	
115631	Piutang	156.500	111914	Kas dan	156.500
	dari Kas			Bank BLU	
	BLU			Belum	
				Disahkan	
			111914	Kas dan Bank	156.500
				BLU Belum	
				Disahkan	
			111911	Kas dan	156.500
				Bank BLU	

13. Kas BLU Neto Rupiah merupakan saldo akumulasi nilai uang BLU yang dijabarkan dalam Rupiah secara transaksional.
14. Selisih kurs belum terealisasi merupakan perhitungan selisih kurs transaksi dengan kurs pelaporan terhadap nilai mutasi Dolar dengan dikurangi hasil nilai selisih kurs terealisasi. Contoh perhitungan selisih kurs belum terealisasi positif Rp131.500 diperoleh dari perhitungan ((Rp10.050-Rp10.100)xUSD500))-(-Rp156.500).
15. Rp65.650.000 merupakan nilai Kas dan Bank BLU mata uang asing yang dijabarkan dan disajikan di Neraca per 30 Juni 20X1 berasal dari perhitungan USD6.500xRp10.100.
16. (Rp2.568.750) merupakan akumulasi jumlah selisih kurs belum terealisasi yang dilakukan pengesahan pada periode pelaporan keuangan semesteran (30 Juni 20X1) sebelum laporan keuangan semesteran (30 Juni 20X1) disusun, sebagai pengurang ekuitas di LPE dan Kas dan Bank BLU di Neraca. Dalam hal jumlah selisih kurs belum terealisasi positif diperlakukan sebagai penambah ekuitas di LPE dan Kas dan Bank BLU di Neraca. Dapat dihitung sederhana dengan

menselisihkan Rp65.650.000 – Rp68.218.500 = (Rp2.568.500). Jurnal yang terbentuk dari pengesahan kerugian selisih kurs terealisasi sesuai SP3B/SP2B – BLU tersebut:

Buku Besar Kas				D	K	Buku Besar Akrual				D	K
311313	SAL	Selisih	2.568K			311313	SAL	Selisih	2.568K		
		Kurs Belum Terealisasi						Kurs Belum Terealisasi			
		BLU						BLU			
115631	Piutang				2.568K	111914	Kas dan Bank				2.568K
	dari Kas						Belum Disahkan				
	BLU					111914	Kas dan Bank	2.568K			
							BLU Belum Disahkan				
						111911	Kas dan Bank				2.568K
							BLU				

Catatan: Pada periode pelaporan keuangan 30 Juni 20X1 (semesteran) tidak dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat dan menyajikan pendapatan atau beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi.

17. Rp66.950.000 merupakan nilai Kas dan Bank BLU mata uang asing yang dijabarkan dan disajikan di Neraca per 31 Desember 20X1 berasal dari perhitungan $USD6.500 \times Rp10.300$.
18. (Rp1.268.500) dapat dihitung sederhana dengan menselisihkan $Rp66.950.000 - Rp68.218.500 = (Rp1.268.500)$ merupakan akumulasi jumlah selisih kurs belum terealisasi pada periode pelaporan keuangan tahunan (31 Desember 20X1), dan tidak digunakan sebagai nilai pengesahan selisih kurs belum terealisasi dengan KPPN pada 31 Desember 20X1, tetapi digunakan reklasifikasi atau penyesuaian dengan memo penyesuaian dari ekuitas di LPE ke pengakuan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO sebesar Rp1.268.500.
19. Rp1.300.000 merupakan selisih antara akumulasi jumlah selisih kurs belum terealisasi pada periode pelaporan keuangan tahunan dan semesteran $(Rp1.268.500) - (Rp2.568.500) = Rp1.300.000$. Selisih positif sebesar Rp1.300.000 dilakukan pengesahan selisih kurs belum terealisasi di KPPN, dan berdampak mengoreksi pengakuan selisih kurs yang dicatat sebelumnya sebagai pengurang ekuitas di LPE pada 30 Juni 20X1 sebesar Rp2.568.500 menjadi Rp1.268.500 atau selisih sebesar Rp1.300.000. Jurnal yang terbentuk dari pengesahan kerugian selisih kurs terealisasi sesuai SP3B/SP2B – BLU tersebut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
	D	K		D	K
115631	Piutang dari Kas BLU	1.300K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	1.300K
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	1.300K	311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	1.300K
			111911	Kas dan Bank BLU	1.300K
			111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	1.300K

Catatan:

- a. Atas pengesahan selisih kurs belum terealisasi sesuai SP3B/SP2B – BLU sebesar Rp1.300.000,-, saldo buku besar akun 311313 pada 31 Desember 20X1 disajikan sebesar Rp1.268.500.
- b. Selanjutnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan Satker BLU melakukan jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengakuan beban/kerugian selisih kurs belum terealisasi di LO yang mengoreksi ekuitas di LPE sebesar Rp1.268.500 sebagai berikut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrua		
	D	K		D	K
			596212	Kerugian Selisih Belum Terealisasi	1.268.500
			311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	1.268.500

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001